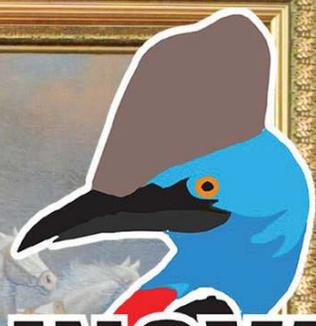


Edisi 5
JUNI 2021

M A J A L A H

KASUARI INOVASI[®]



EMPAT TAHUN KEPEMIMPINAN
Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani

HERMUS INDOU

Dari Pengembala Sapi kini jadi Orang Nomor Satu Manokwari

Gubernur Dominggus Mandacan

Kururkan Rp. 7 miliar
Guna Pembangunan Gedung Inovasi

UKIR SEJARAH BARU

Profesor Charlie Heatubun
Raih Piala Adhigana 2020

STAR Project

Upaya Pemulihan Populasi Hiu Belimbing
melalui Translokasi Ex-situ Pertama di Dunia

ISSN : 2686-4827

Grammatophylum scriptum
DOK. BALITBANGDA PB



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

SALAM REDAKSI



Tim Majalah Kasuari Inovasi. DOK. BALITBANGDA PB

**Salam sejahtera bagi kita semua
Assalamualaikum Wr. Wb**

Salam jumpa kembali para pembaca setia Majalah Kasuari Inovasi di Tahun 2021.

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Majalah Kasuari Edisi Kelima dapat dirampungkan.

Kami segenap redaksi Majalah Kasuari sangat senang pada kesempatan ini kembali dapat menyajikan informasi-informasi seputar aktifitas pembangunan di Provinsi Papua Barat terutama yang terkait dengan aktifitas kelitbangan dan inovasi daerah.

Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat setiap enam bulan dengan tujuan mendeskripsikan, mendokumentasikan dan mensosialisasikan aktifitas kelitbangan dan inovasi daerah serta aktifitas pembangunan di Papua Barat kepada publik.

Edisi Kelima menyajikan informasi bulan Desember 2020 sampai Mei 2021 yang dikemas dalam empat belas rubrik, meliputi profil tokoh, laporan khusus, opini, serba-serbi, galeri, kearifan lokal, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, advetorial, mitra pembangunan, panorama, promosi dan profil organisasi perangkat daerah. Dengan beberapa topik utama dari laporan khusus tentang Empat tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, Dukungan Gubernur untuk pembangunan Gedung Inovasi dan StAR Project: Upaya pemulihan populasi Hiu Belimbing melalui Translokasi Ex-Situ Pertama di Dunia. Selain itu ada profil tokoh Bupati terpilih Kabupaten Manokwari 2021-2024 dan beberapa rubrik menarik lainnya.

Harapan kami semoga sajian pada Edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surat Pembaca

Informasi disertai dengan gambar pada setiap halaman Majalah Kasuari Inovasi sangat informatif dan menarik sehingga memudahkan para pembaca baik peneliti, mahasiswa maupun masyarakat dengan mudah untuk memahami pekerjaan dan perkembangan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah di Tanah Papua.
(Melan, GIZ - FORCLIME)

Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada Balitbangda Papua Barat yang memperkenalkan Papua Barat beserta segala kelebihannya melalui Majalah Kasuari Inovasi. Kami berharap inovasi serta kajian yang ditampilkan ini berguna bagi stakeholder teknis dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau perencanaan program ke depannya menjadi Papua Barat sebagai daerah yang berdaya saing tinggi dengan daerah lain di Indonesia.
(Makliin Ayatanoi, DLH Manokwari)

Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Balitbangda Papua Barat atas karya-karya yang luar biasa khususnya dengan hadirnya Majalah Kasuari Inovasi. Menurut saya majalah ini sangat bermanfaat karena memberikan informasi secara umum tentang wajah Provinsi Papua Barat dalam kajian ilmiah. Semoga Majalah Kasuari Inovasi semakin update dan upgrade dalam memberikan informasi kepada pembaca.
(Balandina, Warga Masyarakat)

PAPUA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Ayo Pakai MASKER!

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si
Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat

Anjuran Pemerintah Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19
Dengan Gunakan Masker Mulai Dari Diri Kita
Untuk Keselamatan Bersama
#IniSaPuMaskerKoPuMana?
#SaPuMaskerMelindungiKo
Demi Keselamatan Kitorang Pu Diri dan Keluarga.

DAFTAR ISI

PROFIL TOKOH

Dari Penggembala Sapi Kini Jadi Orang
Nomor Satu Manokwari —5

LAPORAN KHUSUS

Ukir Sejarah Baru: Profesor Charlie
Heatubun Raih Piala Adhigana 2020 —9

Revisi RTRW dan RKTP Perlu
Direalisasikan —11

Mentan RI Tantang Gubernur
Papua Barat Buka Lahan 10.000 Hektar
Untuk Lumbung Pangan —13

Gubernur Papua Barat Temui
Kepala Staf Presiden —15

Gubernur Papua Barat Apresiasi Kinerja
Balitbangda Papua Barat —16

Kabalitbangda Mengapresiasi
Kodam XVIII/Kasuari —18

Gubernur Papua Barat Temui
Wakil Presiden RI —20

Empat Tahun Kepemimpinan
DM dan ML —22

Kreatif, Inovatif dan Sinergi
Jadi Kunci —26

Akselerasi Pencapaian Perhutanan Sosial
dan Reforma Agraria di Provinsi
Papua Barat —33

Peremajaan Sawit Harus Libatkan
Masyarakat —38

OPINI

UTAYOH dan Kebangkitan Perempuan
di Kota Pala —40

SERBA-SERBI

Herman Baru: Inventor Prototip Oven
Roma 828 Naisorei —41

Capaian Indeks Daya Saing Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2020 —44

Pentingnya Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat
Di Papua Barat —47

Pengelolaan Wisata Papua Barat
Harus Berbasis Konservasi dan
Orang Asli Papua —50

GALERI —54

KEARIFAN LOKAL

Kwokok, Sagu dan Hubungannya
dengan Alam —60

Bambu Merambat “Upah” Sumber
Pangan Alternatif Suku Maybrat —62

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Gubernur Dominggus Mandacan
Kucurkan Rp 7 Miliar Guna
Pembangunan Gedung Inovasi —66

IPTEK

StAR Project: Upaya Pemulihan Populasi
Hiu Belimbing Melalui Translokasi
Ex-Situ Pertama di Dunia —70

SMART Perangkat Yang Friendly
“Dalam Mendukung Pengelolaan
Kawasan Konservasi Papua Barat” —73

Eksplorasi Situs Purbakala
Teluk Wondama —75

ADVERTORIAL —78

MITRA PEMBANGUNAN

Papua Barat Berkomitmen
Mengalokasikan 70% Luas Daratan
Sebagai Kawasan Lindung —80

Survei Cepat Identifikasi Potensi
Mata Pencaharian Alternatif Di Kawasan
Mangrove Teminabuan —82

PANORAMA —84

PROMOSI

PMI dan Kolaborasi Produktif Mendorong
Kewirausahaan di Papua —86

PROFIL OPD

Fokus Pengembangan Komoditi
Unggulan Daerah Hingga Skala Rumah
Produksi —90

PROFIL TOKOH

**“Menurut saya,
Tuhan tidak bekerja
di ruang hampa, tapi
Tuhan bekerja melalui
orang lain pada waktu
dan tempat yang
dirancangnyanya.”**

Hermus Indou, S.IP., MH.
Bupati Kabupaten Manokwari



Tak ada yang menduga ketika seorang penggembala sapi bahkan pembantu penjual pisang goreng dan penjual es lilin di sekolah, kini menjadi seorang Bupati? Ya, dialah Hermus Indou, yang saat ini menjadi Bupati Kabupaten Manokwari periode 2021-2024.

“Saat masih kecil dulu, saya menjadi penggembala sapi, juga menjadi tukang pegang termos air panas dari penjual pisang goreng dan menjual es lilin di SMP Negeri Warmare,” cerita Bupati Manokwari, Hermus Indou tentang masa kecilnya saat ditemui Tim Majalah Kasuari Inovasi di ruang kerjanya, April 2021.

Tak hanya itu, ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Manokwari, Hermus Indou menjadi pesuruh dari teman-teman sekolahnya untuk membeli sesuatu di luar sekolah. “Saya biasa disuruh teman-teman untuk beli pisang goreng. Setelah beli pisang goreng itu, saya juga dapat jatah, sehingga bisa makan pisang goreng juga,” kenangannya. Hal ini dilakukan Hermus Indou muda, agar dirinya tidak kelaparan di sekolah. Karena pada masa itu, adalah masa-masa yang sangat sulit baginya untuk mendapatkan uang, apalagi dengan kondisi ekonomi keluarganya yang serba kekurangan.

Satu lagi kisah hidup Bupati Manokwari yang baru dilantik Februari 2021 ini adalah ketika melakukan perjalanan menggunakan Kapal Putih (Pelni) dari Manokwari ke Yogyakarta. Hermus Indou muda yang saat itu statusnya sebagai mahasiswa ketibansial. Dirinya ketinggalan kapal di Sorong. Entah saat itu karena ingin mengetahui beberapa bagian Kota Sorong, jadi ia dan temannya berani pergi agak jauh dari pelabuhan, namun saat kembali ke pelabuhan, kapalnya sudah bertolak.

Situasi itu membuat dirinya down, apalagi dalam kondisi tak punya uang dan tak punya kenalan di Sorong. Namun, selang beberapa waktu ada kapal putih yang ia ingat adalah Kapal Dobonsolo yang masuk ke pelabuhan Sorong dan berangkat tujuan Ambon. Dengan Iman dan Doa, Dirinya berani mengambil tindakan “Pelarian”. Artinya tanpa tiket dan uang, dirinya memutuskan untuk ikut Kapal Dobonsolo, dengan harapan, keluh kesahnya sebagai mahasiswa bisa dimengerti oleh petugas kapal. Ternyata petu-



Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou, S.IP., MH.
DOK. HUMAS PROTOKOLER KAB. MANOKWARI

gas kapal tidak peduli, Hermus dan teman pelariannya justru diturunkan di Ambon. Mereka tak peduli mau jadi apa Hermus dan temannya di Ambon, yang namanya pelarian pasti dibegitukan. Hermus kian sedih, bahkan seperti kehilangan harapan. Di Sorong yang masih satu daratan saja sudah susah, apalagi ini di Ambon. Namun Hermus berdoa minta pertolongan Tuhan. “Ya, memang Tuhan itu baik, ternyata Tuhan sudah menyiapkan Kepala Operasional Pelni Ambon yang adalah anak Doreri untuk menolong

Dari Penggembala Sapi Kini Jadi Orang Nomor Satu Manokwari

saya,” kata Hermus.

Kepala operasional Pelni Ambon yang dimaksudnya adalah Bapak Rumpfabe. Putra Teluk Doreri itu akhirnya membantu dua tiket kapal untuk Hermus dan temannya. “Hanya dengan 1 (satu) baju saya bertahan selama seminggu perjalanan pulang ke Jogja lewat Surabaya, untuk kemudian saya menyelesaikan skripsi dan diwisdudakan,” tutur Hermus Indou tentang kisah pelariannya demi menyelesaikan studinya di Yogyakarta.

Itulah tiga kisah perjalanan hidup Hermus Indou yang paling membekas di hatinya. Dari proses kehidupan itu, dirinya belajar tentang perjuangan hidup dan kemahakuasaan Tuhan. “Menurut saya, Tuhan tidak bekerja di ruang hampa, tapi Tuhan bekerja melalui orang lain pada waktu dan tempat yang dirancangnya,” ucapnya.

Karena itu Hermus berprinsip, siapapun yang kelak dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan peradaban, menghasilkan sesuatu yang baik bagi manusia, menghargai orang lain dan orang-orang yang berjasa dalam pembangunan sebuah daerah dan juga kemajuan sebuah suku dan lain sebagainya, itu hal yang penting, untuk harus tetap dijunjung tinggi.

“Karena kita tidak akan mencapai kemajuan itu dari diri kita sendiri, tetapi ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk berdiri mengasahi kita dan menolong kita”. Berangkat dari pemikiran itu, maka motto hidup Hermus Indou yang menjadi pegang-

annya adalah “Diberkati Untuk Memberkati Orang Lain”

Proses panjang yang dilewati seorang Hermus Indou sampai saat ini menjadi Bupati Kabupaten Manokwari di luar prediksinya. Menjadi Bupati hari ini tidak terlepas dari peristiwa tak terduga yang terjadi tahun lalu atas terpanggilnya Bupati Demas Paulus Mandacan, sehingga pada saat itu partai politik juga sejumlah elemen masyarakat mendatanginya untuk meminta kesediaannya mencalonkan diri sebagai Bupati bersama Drs. Edy Budoyo sebagai wakil Bupati.

Keputusan untuk maju sebagai Bupati dan melepaskan karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Provinsi Papua Barat adalah keputusan yang berat. Melihat perjalanan karirnya dalam birokrasi pemerintahan sampai saat terakhir ia menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat ia dan keluarga harus bergumul untuk memutuskan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mencapai karir dan posisinya sebagai ASN sampai saat ini penuh perjuangan, juga bersusah payah dan ia mengungkapkan bahwa ASN dari suku besar Arfak yang hari ini menduduki jabatan eselon 2 (dua) di Pemerintah Provinsi Papua Barat jumlahnya sangat sedikit, sehingga meninggalkan posisi itu sangat berat dan membutuhkan keputusan yang tepat, dimana dirinya mengatakan bahwa posisi sebagai ASN itu adalah sesuatu yang sudah pasti, sedang masuk dunia politik adalah hal yang belum pasti. Namun kepekaan terhadap suara Tuhan yang menjadi kunci Hermus berani meninggalkan posisi nyamannya sebagai ASN dan jabatan kepala biro. “Ya saya harus rela meninggalkan yang sudah ada dan berdiri untuk menghadapi posisi baru ini dan saya kira ini juga adalah kehendak Tuhan untuk saya, karena itu saya menjalani tugas yang baru ini dengan penuh ucapan syukur”.

Menjabat Bupati Kabupaten Manokwari yang merupakan tanggung jawab yang cukup berat, melihat kondisi dan masalah-masalah yang terjadi, sehingga harus ada perencanaan yang sangat baik untuk membangun dan memajukan kabupaten ini sebagai ibukota Provinsi Papua Barat juga sebagai kota peradaban, terutama pada aspek fisik, kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan mem-

buka ruang bagi investasi-investasi luar yang tentunya ramah lingkungan, dan juga mendorong percepatan pertumbuhan UMKM berbasis ekonomi produktif dan konsumtif dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Selain itu Bupati berharap Orang Asli Papua (OAP) juga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang aktif dalam menyediakan dan melayani kebutuhan masyarakat di Manokwari secara kontinyu. Pemerintah akan berupaya dengan mendorong dan merangsang masyarakat asli Papua untuk mampu berdiri diatas kaki mereka sendiri. Ungkapan Bupati ini sudah terangkum dalam visi “**Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban Di Tanah Papua Dan Ibukota Provinsi Papua Barat Yang Religius, Berdaya Saing, Inovatif, Maju, Mandiri, Dan Sejahtera**”. Untuk mewujudkan visi ini sesuatu yang tidak mudah tetapi membutuhkan kerja keras, tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga seluruh elemen masyarakat, jelasnya.

Sebagai Bupati Manokwari yang juga pernah menjadi bagian dalam anggota Tim Kajian Reaktivisasi Provinsi Irian Jaya Barat, dan Manokwari sebagai ibukota Provinsi tahun 2000-2003, tentunya ia mengikuti perkembangan dan pencapaian Provinsi Papua Barat sampai saat ini menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan itu adalah yang luar biasa. Menurutnya pertama, pembangunan harus berorientasi masa depan, apapun yang dibangun hari ini harus berpikir tentang kelangsungan hidup generasi sesudah kita di masa yang akan datang. Untuk itu upaya pengelolaan sumberdaya alam dan juga kegiatan pembangunan lainnya harus bersifat ramah lingkungan, menghargai dan melestarikan ekosistem yang ada. Kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus meletakkan pondasi yang baik dan untuk kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. “Jangan sampai pondasi yang kita bangun itu tidak benar, lalu generasi mendatang membangun kembali pondasi yang sama,



Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Periode 2021-2024. DOK.FOKUS STUDIO MANOKWARI

itu bukan pembangunan berkelanjutan”. Selanjutnya diungkapkan “Jadi kalau generasi kita sekarang membangun dari nol menjadi angka satu, maka generasi yang akan datang harus melanjutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itulah yang disebut pembangunan berkelanjutan yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan level” jelasnya. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dimulai dari aspek tata ruang wilayah atau kawasan-kawasan, untuk dikelola dengan baik dan memperhatikan kelestariannya, baik kawasan pertanian maupun kawasan hutan. Selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui pengembangan komoditas unggulan

daerah di Kabupaten Manokwari.

Hermus Indou termasuk dalam jajaran Putra terbaik Arfak yang memiliki perjalanan karir yang gemilang dalam birokrasi baik pemerintahan, organisasi kepemudaan serta organisasi profesi dan sosial masyarakat lainnya, mulai dari Kabupaten Manokwari sampai Provinsi Papua Barat. Hal ini terlihat dalam sejumlah jabatan struktural yang pernah diembannya.

Memulai karir sebagai CPNS tahun 2001 pada bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Manokwari dan sebagai staf pada bagian yang sama tahun 2003. Tahun 2003 merupakan awal perjalanan yang baik dalam karirnya dimana sejumlah posisi diembannya, mulai dari menjadi staf asisten pribadi (Aspri) Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, juga sebagai staf bagian DIKLAT SETDA Kabupaten Manokwari dan ditahun yang sama dirinya menjadi Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Provinsi Papua Barat selama 2 (dua) periode 2003-2012. Selama setahun Hermus pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat dan kemudian ditahun 2013-2017 dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Biro Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Barat tahun 2017-2020. Sebelum Hermus memastikan diri maju sebagai calon Bupati Kabupaten Manokwari, dirinya mempunyai jejak karir di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dilantik sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Barat.

Hermus juga aktif dan mempunyai banyak pengalaman dalam sejumlah organisasi diantaranya organisasi kepemudaan pernah menjadi Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat selama 2 (dua) periode tahun



Bupati Manokwari bersama keluarga. DOK.PRIBADI

2008-2016, sebagai wakil ketua DPD GAMKI kemudian sebagai ketua DPP GAMKI Provinsi Papua Barat tahun 2006-2014, tahun 2012-2016 sekaligus menjabat dua posisi sebagai ketua DPD Barisan Muda KASGORO 1957 dan DPD Pemuda Tani-HKTI Provinsi Papua Barat. Saat ini juga Hermus aktif sebagai ketua Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat sejak tahun 2016 hingga sekarang dan beberapa organisasi lainnya.

● Penulis : Arissa Mori Muzendi/Balitbangda PB
Editor : Alberth Yomo



Biodata:

Hermus Indou, S.IP.,MH lahir di Jatubou, 15 Agustus 1976 saat ini menjabat sebagai Bupati terpilih Kabupaten Manokwari periode 2021-2024.

Hermus adalah anak ke 2 (dua) dari Bapak Noak Indou (Almarhum) dan Ibu Marice Dowansiba, dan menikah dengan Febelina Wondiwoy, SE serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak Anepina Chintya Indou, Israel Semen Indou dan Olivia Ivelensia Indou.

Riwayat pendidikan, Hermus memulai pendidikan di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Minyambouw, lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Warmare lulus tahun 1993, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Manokwari, lulus tahun 1995. Hermus melanjutkan program sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) di Yogyakarta dan lulus tahun 1999. Tahun 2006 lulus dari Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar.

**Ukir Sejarah Baru:
Profesor Charlie Heatubun
Raih Piala Adhigana 2020**

Provinsi Papua Barat mencatat sejarah baru dengan memperoleh penghargaan prestisius dalam ajang Anugerah Aparatur Sipil Negara 2020 yang diberikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si pada akhir Tahun 2020. Profesor Heatubun ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan se-Indonesia dan menerima Piala Adhigana 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Desember 2020. Prof. Heatubun terpilih dari 955 calon yang mewakili seluruh Indonesia termasuk aparaturnya yang bertugas di luar negeri, dan masuk dalam 30 nomine untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan. Dalam ajang ini, selain mendapat predikat Juara 1 untuk kategori PPT Teladan 2020, Prof. Heatubun juga menerima kenaikan pangkat istimewa, piagam penghargaan dan insentif.

Prestasi ini adalah sebuah sejarah baru bagi Provinsi Papua Barat bahkan bagi Tanah Papua karena Prof. Heatubun merupakan ASN pertama dari Tanah Papua yang berhasil mendapatkan Juara 1 Piala Adhigana dan menjadi PPT Teladan se-Indonesia tahun 2020.

Ajang Anugerah ASN merupakan penghargaan bagi ASN sebagai individu maupun organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata, dapat mengilhami, menggerakkan serta membangkitkan semangat ASN yang lain dalam peningkatan kualitas SDM aparatur.

Anugerah ASN 2020 mengusung tema "ASN Berkinerja dan Berdampak Nyata". Sama dengan tahun sebelumnya, ajang Anugerah ASN 2020 dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan, PNS Inspiratif, dan *The Future Leader*.



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan Kementerian PANRB Tahun 2021. DOK. BALITBANGDA PB

Untuk mendapatkan nomine terbaik bagi masing-masing kategori, peserta yang diikutkan dalam Anugerah ASN 2020 ini mengikuti beberapa tahapan seleksi. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, penilaian portofolio, publikasi kandidat, presentasi dan wawancara, serta penilaian rekam jejak dan integritas.

Seleksi yang cukup ketat yang dimulai dari administrasi, pendalaman materi yang diusulkan, pendalaman bukti dan fakta terkait materi yang didaftarkan yang berkontribusi nyata di daerahnya.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat ini kemudian terpilih lagi dalam 10 nomine Pejabat Pimpinan Tinggi (PTT) Teladan, selanjutnya mengikuti tahap verifikasi lapangan.

Foto bersama setelah penyerahan penghargaan PPT Teladan pertama, kedua dan ketiga oleh Menteri Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. DOK. BALITBANGDA PB



Revisi RTRW dan RKTP Perlu Direalisasikan



Pembahasan Teknis RKTP Papua Barat 2021-2040. DOK. YANCE DE FRETES/CI

berperan penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan yang tepat pada kedua ekosistem ini tidak hanya dapat mendukung visi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan tetapi juga mendukung pencapaian target nasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, rencana Pembangunan Rendah Karbon, dan target dalam menurunkan emisi karbon sebanyak 29-41% di tahun 2030.

Melalui kajian dengan pendekatan *Environmental Sensitive Area* (ESA) atau kawasan lingkungan sensitif yang dilakukan pada proses revisi RTRW, diidentifikasi terdapat 82% kawasan di Papua Barat yang perlu dilindungi dan rentan terhadap perubahan (termasuk mangrove dan gambut). Selanjutnya, pada dokumen RKTP yang telah diselesaikan pada akhir tahun 2020 diberikan arahan dalam pemanfaatan kawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis spasial dengan melakukan tumpang susun (*overlay*) beberapa peta tematik, Pemerintah Provinsi Papua Barat memetakan 6 jenis pemanfaatan kawasan dimana terdapat dua kawasan dominan yaitu kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut seluas 3.550.761 ha (34,52%) dan kawasan untuk konservasi seluas 3.123.184 ha (30,36%) yang terdiri dari kawasan untuk konservasi daratan dan perairan. Perlindungan hutan alam dan gambut sebagai kawasan dominan di Papua Barat juga penting dalam mendukung target penyimpanan karbon.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir. Hendrik Runaweri MM., pada saat pelaksanaan sosialisasi RKTP Papua Barat menyatakan penyusunan RKTP bersifat partisipatif sebagai upaya Pemda dalam mengelola hutan secara terpadu dan memastikan manfaat hutan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Papua Barat akan menerbitkan RKTP 2021-2040 setelah mendapatkan revisi dari berbagai pihak terkait dan menetapkan RKTP sebagai arahan dalam pengelolaan hutan di Papua Barat. Selanjutnya, Pemerintah Papua Barat juga mulai menyusun dokumen RPHJP dengan melibatkan 21 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di seluruh Papua Barat”, ujarnya.

Revisi RTRW dan penyelesaian RKTP sebagai dokumen acuan dan landasan dalam



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si bersama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan. DOK. BALITBANGDA PB

an serta tahap presentasi dan wawancara sebelum memperebutkan gelar anugerah ASN 2020 pada bulan desember 2020.

Dalam pengumuman resmi yang dibacakan langsung pada puncak acara Anugerah ASN 2020 oleh Menteri PANRB Republik Indonesia Bapak Tjahjo Kumolo, Prof. Heatubun didapuk sebagai Juara 1 pada kategori PPT Teladan 2020 dan berhak menerima kenaikan pangkat istimewa, Piala Adhigana, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Dalam ajang tersebut Prof. Heatubun, menjadikan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat melalui penancangan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan adalah yang pertama di Indonesia dan dunia, sebagai materi yang

diusung dalam mengikuti lomba anugerah ASN 2020 ini, dimana peran signifikan yang diemban, Prof. Heatubun, sebagai Kepala Balitbangda dalam membantu Gubernur Provinsi Papua Barat memotori dan menginisiasi semangat dengan kolaborasi berbagai Mitra Pembangunan dalam mengawal dan memastikan setiap komitmen dapat berjalan dengan baik dan terus melakukan berbagai inovasi, terobosan dan akselerasi untuk pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di Papua Barat.

Beberapa prestasi Prof. Heatubun yang ikut mendongkrak pencapaian ini antara lain sukses sebagai Ketua penyelenggara *International Conference on Biodiversity Ecotourism and Creative Economy* (ICBE) atau Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif di

Manokwari Tahun 2018 kemudian memperkenalkan konsep dan inisiatif provinsi konservasi sebagai solusi cerdas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua secara global hingga menghasilkan Deklarasi Manokwari tanggal 12 Oktober 2018 yang berisi 14 butir kesepakatan dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua.

Komitmen tersebut kembali diwujudkan dengan disahkannya peraturan daerah khusus (PERDASUS) tentang Pembangunan Berkelanjutan Nomor 10 tanggal 20 Maret 2019 yang berisi komitmen pemerintah daerah untuk melindungi minimal 70 persen luas hutan dari luas daratan dan 50 persen dari luas lautan.

● Penulis : Ferry Hurulean/Balitbangda PB
Editor : Alberth Yomo

Mentan RI Tantang Gubernur Papua Barat Buka Lahan 10.000 Hektar Untuk Lumbung Pangan



Finalisasi Revisi RTRW Papua Barat. DOK. YANCE DE FRETES/CI



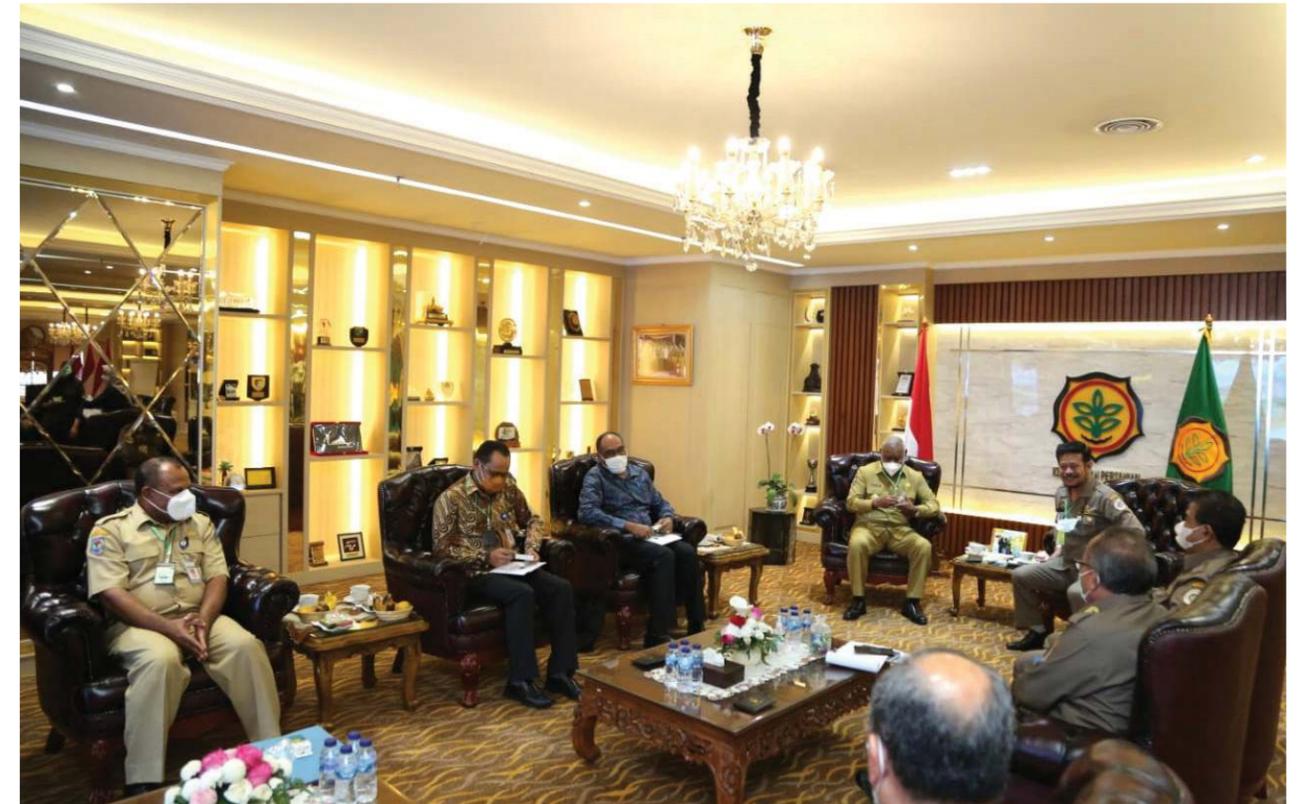
Sosialisasi RKTP Papua Barat. DOK. YETI KURNIASARI/CI

mengelola kawasan konservasi Papua Barat perlu diupayakan realisasinya dalam memastikan pembangunan dan penataan ruang yang berjalan sesuai dengan visi yang

tercantum dalam kebijakan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Pemerintah Provinsi sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

● Penulis : Tim Media/Balitbangda PB
Editor : Jimmy Wanna



Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Menteri Pertanian RI yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Papua Barat, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Lahan di Papua Barat masih cukup luas untuk dikelola. Untuk menanam Padi saja, lahan yang sudah dimanfaatkan baru 7 ribu hektar, sementara 4 ribu hektar terbengkalai karena terbatasnya Sumber Daya Manusia. Selain itu ubi kayu, ubi jalar dan keladi sebagai pangan lokal Papua tak terlalu menjanjikan sebagai pangan pengganti. Sagu yang masuk komoditi unggulan di Papua Barat juga belum dapat diharapkan. Demikian halnya dengan sayuran, Papua Barat masih mendatangkan

berton-ton sayuran dari luar Papua, padahal sayuran itu bisa dikembangkan di Papua Barat, jika diseriusi. Ini merupakan gambaran singkat tentang kondisi riil pemanfaatan lahan pertanian di Provinsi Papua Barat.

Mencermati kondisi itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melakukan kunjungan penting ke Jakarta pada akhir Januari 2021, bertemu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. "Gubernur Papua Barat ingin ada optimalisasi lahan, penataan dan

pembudidayaan secara serius yang dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Ir. Jacob Fonataba, M.Si.

Beberapa usulan Gubernur yang disampaikan kepada Menteri Pertanian antara lain meminta dukungan untuk kegiatan budidaya dan pembangunan sarana industri pengolahan hasil pertanian, dukungan bantuan alat

Pimpinan dan Seluruh Staf
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**
Menguucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H
Minal Aidin wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut. M.Si, FLS
Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat



“Gubernur Papua Barat ingin ada optimalisasi lahan, penataan dan pembudidayaan secara serius yang dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia.”



mekanisasi pertanian untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan usulan untuk mendukung pembangunan industri pengolahan sawit di Papua Barat.

Hal berikutnya, terkait pangan lokal, Gubernur berharap ada perhatian Pemerintah Pusat untuk mengembangkan

tanaman ubi kayu, ubi jalar, keladi dan sagu. Gubernur minta ada industri yang dapat mengolah sagu menjadi beras analog atau bahan lainnya yang bersumber dari sagu. Selain itu, Gubernur juga berharap ada bantuan terhadap pengembangan hortikultura di Pegunungan Arfak, sehingga membatasi sayuran yang didatangkan dari luar Papua.

Menanggapi usulan Gubernur Papua Barat, Mentan RI menyambut baik dan menerima usulan Gubernur Papua Barat, sesuai potensi daerah, yang memuat spesifik komoditi (Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan). Tanaman Pangan seperti ubi jalar, ubi kayu dan keladi. Tanaman Hortikultura seperti sayuran & buah. Tanaman Perkebunan seperti sagu, kakao, kopi dan pala. Permintaan spektakuler, Mentan RI kepada Gubernur Papua Barat untuk menyiapkan kawasan lahan dengan skala di atas 10.000 Ha, untuk kegiatan *Food Estate* (Lumbung Pangan), yang akan dikembangkan dengan pola karifan lokal berbasis masyarakat adat.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Gubernur Papua Barat dan tim bertemu Yori Antar salah satu Arsitektur Nusantara untuk membahas pengembangan wisata di Pegunungan Arfak. DOK. BALITBANGDA PB

Gubernur Papua Barat bersama rombongan saat melakukan diskusi dengan Kepala Staf Presiden RI. DOK. BALITBANGDA PB

Gubernur Papua Barat Temui Kepala Staf Presiden

“Bahas Pengembangan Ekonomi Hijau, Perlindungan Hak-hak masyarakat adat Papua.”

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengadakan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, pada Senin 25 Januari 2021.

Beberapa hal dibahas antara lain Pengembangan Ekonomi Hijau Papua Barat, Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua dalam kaitannya dengan Reforma Agraria dan Percepatan Perhutanan Sosial serta Pengembangan Kapasitas dan Layanan Dasar Orang Asli Papua. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si yang mendampingi Gubernur dalam pertemuan itu menjelaskan beberapa topik yang dibahas yaitu konsep kawasan strategis nasional Papua Barat, pengembangan komoditi lokal unggulan non deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal dan upaya perlindungan ekosistem mangrove

dan ekosistem esensial.

Gubernur juga menyampaikan pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli Papua. Gubernur Papua Barat juga menyinggung tentang percepatan penyelesaian Rumah Sakit Provinsi dan percepatan pembangunan SMA Unggulan Papua Barat yang akan bekerja sama dengan YKPP/SMA Taruna Nusantara, kepada Kepala Staf Presiden. Moeldoko menyambut baik kunjungan Gubernur dan akan membantu sesuai dengan kapasitasnya.

Usai pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur beserta rombongan menyempatkan waktu bertemu Yori Antar yang dijuluki sang Pendekar Arsitektur Nusantara, menyampaikan perjalanannya ke Pegunungan Arfak Desember 2020 lalu. Gubernur dan rombongan meminta saran pengembangan wisata di Pegunungan Arfak.

Setelah itu, Gubernur Papua Barat mengi-

kuti Acara Peluncuran Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua Barat Tahun 2029-2048 oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan dilanjutkan penandatanganan MoU antara Yayasan IDH dan Balitbangda Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya Gubernur Papua Barat bertemu Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Perekonomian membahas INPRES Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Pada malam harinya, Prof. Heatubun juga mengikuti virtual meeting dengan Dirjen Cipta Karya terkait percepatan pembangunan Papua Barat membahas tentang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Rumah Sakit dan SMU Unggulan di Papua Barat, dan diakhiri dengan diskusi terkait implementasi dan persiapan penandatanganan MoU & MTA Project Star (*Restocking* Hiu Belimbing) bersama Conservation International-Indonesia.

Agenda perjalanan yang diikuti Gubernur Papua Barat didampingi Prof. Heatubun ini merupakan bagian dari upaya mencari dukungan untuk pelaksanaan program-program strategis yang sudah direncanakan.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Yance de Fretes



Gubernur Papua Barat Apresiasi Kinerja Balitbangda Papua Barat

“Dari Pameran Ekspose Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah.”

Badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat menggelar Pameran dan Ekspose Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah pada Rabu, 23 Februari 2021 bertempat di Café laut Mansinam Beach Hotel & Resort Manokwari, Papua Barat. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengekspose hasil-hasil riset dan Inovasi daerah tahun 2020 hasil kolaborasi bersama mitra pembangunan dan perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk peran Balitbangda yang signifikan dalam menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi yang telah dilakukan agar dapat diketahui oleh pemerintah daerah dan setiap pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan guna akselerasi pembangunan di Provinsi Papua Barat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam laporan Kepala Balitbangda Provinsi

Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si. yang dikemas dalam sebuah video singkat tentang seluruh kegiatan Balitbangda di tahun 2020 dan juga tampilan video kolaborasi Balitbangda bersama Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat dan Perguruan Tinggi (Unipa) dalam melaksanakan kerjasama kelitbang dan inovasi daerah. Prof. Heatubun menyampaikan bahwa Situasi pandemi Covid-19 tahun 2020 melumpuhkan berbagai aspek secara global, hal ini juga membuat pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan *Work From Home* (WFH) beberapa waktu. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi Balitbangda Provinsi Papua Barat untuk tetap produktif dan melakukan terobosan yang luar biasa guna mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun Provinsi Papua Barat.

Selama rentang waktu perjalanan sejak tahun 2017 sampai saat ini, Balitbangda Papua

Peluncuran dan Penyerahan Buku Kelitbang dan Inovasi Daerah Tahun 2020 oleh salah satu penulis kepada Kepala Asisten Kodam Kasuari XVIII. DOK. BALITBANGDA PB

Barat telah menghasilkan beberapa produk penelitian yang inovatif, baik dalam bentuk regulasi, data dan informasi ilmiah, rekomendasi serta produk-produk inovasi lainnya hasil kerjasama dengan OPD teknis dan mitra pembangunan Papua Barat. Hasil riset tersebut dikemas dan disebarluaskan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pada acara tersebut, Gubernur Papua Barat meluncurkan 6 (enam) buah buku kelitbang dan Inovasi daerah, dan menyerahkan 6 sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pemegang hak cipta. Selain itu, Gubernur Papua Barat menyerahkan rekomendasi hasil-hasil riset Balitbangda Provinsi Papua Barat tahun 2020 berupa *Master Plan* dan *Detail Engineering design* (DED) energi baru terbarukan Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Minyambow Kab. Pegunungan Arfak dan Sosmorof Kab. Manokwari Selatan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk ditindaklanjuti. Enam buku kelitbang dan inovasi daerah yang diluncurkan Gubernur Papua Barat adalah: Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Kajian Bidang Ekonomi: *Kawasan Ekonomi*

Khusus Provinsi Papua Barat, Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua, Taksonomi, Ekologi, dan Silvikultur Merbau, Perikanan Tangkap di Kabupaten Teluk Wondama, dan Mamberamo: Cerita Kisah Perjalanan.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat beserta Ibu Juliana Mandacan selaku ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat, Rektor Universitas Papua, pejabat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat, pimpinan mitra pembangunan, serta para akademisi dan inovator. Tentunya semua hadirin mengikuti acara dengan mematuhi standar protokol kesehatan yang sudah diterapkan.

Dalam sambutannya Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengapresiasi kinerja Balitbangda Papua Barat yang terbentuk tahun 2017 tetapi dapat melakukan berbagai terobosan yang luar biasa. Dirinya menegaskan bahwa sesuai dengan fungsi dan peran strategis badan litbang daerah sebagai lembaga yang sudah selangkahnya ada di dalam struktur pemerintahan daerah, karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat.



Beberapa produk inovasi dalam Pameran Ekspose Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

“Meningat tugas-tugas pokok dan fungsinya yang luas dan sangat strategis, maka saya mengharapkan keberadaan badan litbang daerah terus mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan dengan tetap bekerjasama dengan OPD teknis terkait dan bersama mitra pembangunan untuk berakselerasi memberikan terobosan-terobosan dalam melaksanakan pembangunan melalui rekomendasi hasil-hasil penelitian dan inovasi yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat yang signifikan”, tegas Mandacan.

Lebih lanjut Mandacan mengatakan bahwa Litbang sebagai pemberi penyedia berbagai rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan. Dari hasil-hasil kelitbang dan inovasi ini diharapkan dapat melahirkan berbagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam menutup sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa bila semua kegiatan kelitbang dan inovasi di Provinsi Papua Barat dikerjakan dan dibangun dengan hati nurani yang tulus, maka akan menghasilkan produk-produk kelitbang dan inovasi yang berkualitas dan bermanfaat untuk mengawal pembangunan Papua Barat menuju pembangunan berkelanjutan dalam wadah Provinsi Berkelanjutan.



Kunjungan Gubernur Papua Barat dan seluruh tamu undangan ke Pameran Produk Inovasi. DOK. BALITBANGDA PB

Pada kesempatan tersebut Gubernur didampingi Forkopimda, pimpinan OPD dan para undangan juga berkesempatan mengunjungi pameran produk-produk inovasi yang ditampilkan, hasil Kerjasama dengan mitra pembangunan/LSM, Unipa dan kerajinan tangan mama-mama Papua. Produk-produk yang ditampilkan diantaranya: produk-produk turunan rumput laut, kopi Anggi dan Minyambouw, produk Cokelat Ransiki, Ikan Asar inovasi Bapak Herman Baru, produk cokelat Pipiltin, noken hasil kerajinan tangan mama-mama Papua, produk-produk makanan karya Papua Muda Inspiratif, produk makanan dari buah merah dan pandan hutan serta berbagai produk inovasi lainnya. Gubernur sangat mengapresiasi produk-produk inovasi yang dipamerkan, hal ini diapresiasi dengan memborong sebagian besar produk-produk yang ditampilkan dan berharap agar produk-produk inovasi tersebut dapat ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas juga berkolaborasi dengan OPD teknis terkait sehingga produk-produk ini dapat dipasarkan dalam jumlah dan skala yang lebih besar baik di Manokwari maupun diluar Manokwari.

● Penulis : Lince Baransano/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Kepala Balitbangda dan Kepala Dinas TPH Bun Papua Barat didampingi Kasdam XVIII Kasuari meninjau kebun kasuari green. DOK. BALITBANGDA PB

Kabaltbangda Mengapresiasi Kodam XVIII/Kasuari

“Karena Mengubah Lahan Karang Jadi Kebun Sayuran.”

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si. memberikan apresiasi kepada pihak Kodam XVIII/Kasuari yang mengundang dirinya bersama tim Balitbangda dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun) Provinsi Papua Barat untuk mendiskusikan rencana kerjasama di bidang riset, inovasi dan pengembangan pertanian berkelanjutan di Papua Barat. “Ini sua-

tu kehormatan bagi saya pribadi maupun bagi Balitbangda Papua Barat,” ucap Prof. Heatubun dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Ster Kodam Kasuari, pada Jumat 5 Maret 2021.

Prof. Heatubun menjelaskan, kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pihak Kodam XVIII/Kasuari sudah berlangsung lama paska penandatanganan MoU antara Pangdam XVIII/Kasuari dan Gubernur Papua Barat. Selanjutnya Balitbangda

Papua Barat akan mendukung itu dan melakukan PKS terkait dengan bidang kerja Balitbangda dalam hal kelitbang (riset) dan inovasi daerah.

Pejabat Pratama Teladan se-Indonesia Tahun 2020 ini juga sangat terkesan melihat upaya prajurit TNI Kodam XVIII/Kasuari yang membuat kebun Kasuari Green di atas lahan bebatuan karang pada video yang ditayangkan pihak Kodam Kasuari. “Ini suatu inovasi yang bisa dikembangkan dan disebarluaskan. Balitbangda Papua Barat dengan sumberdaya yang ada akan bahu membahu bersama Kodam XVIII/Kasuari untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan terutama mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Kami akan juga membantu Kodam XVIII/Kasuari dalam menginventarisasi produk inovasi, terutama terkait inovasi pelayanan publik dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh



Kepala Balitbangda dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat didampingi Kasdam XVIII Kasuari meninjau kebun kasuari green. DOK. BALITBANGDA PB

personil Kodam XVIII/Kasuari,” tutur Prof. Heatubun.

Sementara itu, Kepala Dinas TPH Bun Provinsi Papua Barat, Dr. Yacob S. Fonataba, M.Si. yang menyaksikan video praktek pertanian yang dilakukan Prajurit TNI Kodam XVIII/Kasuari pada lahan bebatuan karang, turut memberikan apresiasi. “Saya berterima kasih, karena pihak Kodam Kasuari telah mengurangi beban kami,” tandasnya.

Membuat kebun sayuran di atas lahan bebatuan karang oleh Prajurit TNI Kodam XVIII/Kasuari, lanjut Fonataba, bisa jadi model untuk dikembangkan lebih lanjut di Papua Barat. Apalagi kondisi pasokan pangan di Provinsi Papua Barat memiliki gap yang besar antara permintaan dan penawaran, sehingga upaya memperkuat pangan lokal penting untuk dilakukan.

Sebelumnya, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Djoko Andoko dalam pengantar pertemuan itu mengatakan, menyikapi perkembangan terkini terkait mewabahnya virus covid-19, maka pihak TNI terpanggil untuk membantu Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk memperkuat sisi ketahanan pangan. Karena itu, TNI akan menggalakan program Kampung Tangguh dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Brigjen Djoko berharap kolaborasi antara Kodam XVIII/Kasuari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa diperkuat, sehingga dapat membantu masyarakat di Papua Barat. “Tinggal bicara saja, di bagian mana kami bisa berkontribusi, kami siap membantu Pemerintah Daerah,” tutur Brigjen Djoko Andoko.

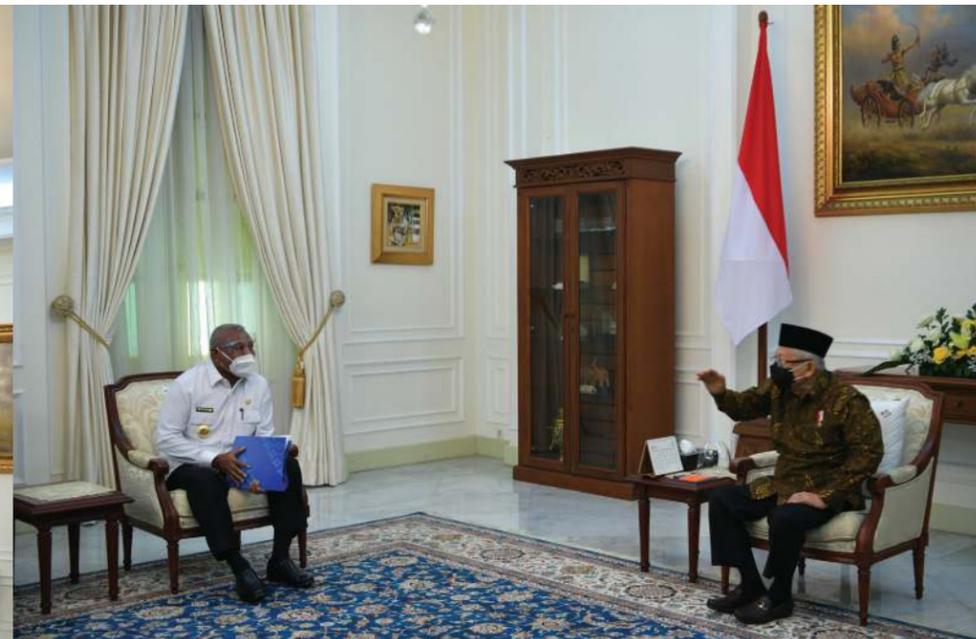
Setelah penjelasan Kasdam XVIII/Kasuari, dilanjutkan dengan penjelasan oleh Aster Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf. Hengki Yuda Setiawan. Dirinya mengatakan, peran Kodam XVIII/Kasuari sangat kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami siap membantu di segala lini,” tandasnya.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, pihak Kodam XVIII/Kasuari juga telah memulai dengan *pilot project* menanam di lahan bebatuan karang. “Kami tunjukkan bahwa apa yang terlihat tidak mungkin bisa menjadi mungkin untuk dilakukan,” ujarnya.

Hengki Yuda juga memaparkan rencana Kodam XVIII/Kasuari untuk melakukan pembagian dan penanaman ribuan bibit sayuran di Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari. “Kami akan ajak masyarakat untuk menanam sayuran di sepanjang pinggir jalan,” ucapnya.

Usai pertemuan di ruang Ster Kodam, Kasdam XVIII/Kasuari didampingi sejumlah Perwira Tinggi Kodam XVIII/Kasuari, antara lain Irdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Steverly Christmas Parengkuan, Kapok Sahli Kodam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Drajat Brima Yoga, Waaster Kasdam XVIII/Kasuari Letkol Arm Tejo Basuki dan Waaslog Kasdam XVIII/Kasuari Letkol Inf Anton Siswanto bersama Kepala Balitbangda dan Kepala Dinas TPH Bun Provinsi Papua Barat meninjau Kebun Kasuari Green yang dibuat para Prajurit TNI Kodam XVIII/Kasuari di atas lahan bebatuan karang, yang memiliki luas kurang lebih 2 hektar itu.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Gubernur Papua Barat Temui Wakil Presiden RI

“Usulkan *Major Projects* dan *Quick Wins* Provinsi Papua Barat Tahun 2022.”

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, te-

pat, fokus, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang dike-

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Wapres RI Ma'ruf Amin didampingi oleh pimpinan OPD terkait. DOK. BALITBANGDA PB

tuai Tim Pengarah Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agenda Audiensi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Wakil Presiden dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021 diterima dan dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. K.H Maruf Amin, dan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Plh Kepala BAPPEDA Prov Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Prov Papua Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Prov Papua Barat, dimana dalam

pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat menyampaikan dokumen usulan yang disusun dalam *Major Projects* dan *Quick Wins* Provinsi Papua Barat tahun 2022 kepada Wakil Presiden selaku ketua Tim Pengarah, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan antara lain, penyusunan *Major Projects* dan *Quick Wins* oleh Gubernur Papua Barat sebagai arahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (RAKORTEKBANG) tahun 2021 yang difasilitasi oleh Bappenas dan Bappeda Provinsi Papua Barat dimana pada Rakor tersebut dilakukan penyiapan dokumen oleh perangkat daerah sebagai pedoman pembangunan bagi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan sebagai media penyaluran perencanaan pusat dan daerah khususnya tahun 2022.

Dalam audiens tersebut Gubernur Papua Barat menyampaikan prioritas strategis percepatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen *Major Projects* dan *Quick Wins* antara lain:

Penataan Kawasan Strategis Pariwisata



Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan. DOK. BALITBANGDA PB

Nasional (KSPN) Papua Barat yang sesuai dengan Visi Pembangunan Berkelanjutan yang konservasi, keanekaragaman hayati, budaya dan religi dengan simpul utama Sorong – Raja Ampat yang telah terbangun

dengan simpul Manokwari- Pegunungan Arfak (Kawasan Danau Anggi, Museum Keanekaragaman Hayati dan Kebun Raya Gunung Meja Dan Museum Coklat Ransiki)

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan pendirian pendidikan vokasi atau pusat (balai) latihan kerja dan pendirian sekolah menengah umum (SMU) Unggulan dalam rangka menghasilkan siswa unggul yang berwawasan nasionalisme dengan kurikulum yang setara dengan SMU Taruna Nusantara. Peningkatan layanan dasar kesehatan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) sebagai rumah sakit rujukan yang sudah terbangun 60 persen. Peningkatan nilai produk unggulan daerah non deforestasi berorientasi ekspor yaitu Pengembangan Pusat Teknologi dan Inovasi Kakao dan Kopi di Ransiki Manokwari Selatan dan pakan ternak di Masni Kabupaten Manokwari.

Pembangunan infrastruktur terkait aksesibilitas pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah, berupa jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan laut serta penyediaan sarana transportasi laut. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Strategis Provinsi Berfungsi Lindung Mahkota Permata Tanah Papua, Kawasan Ketahanan Pangan (*Food Estate* Berbasis Sagu/Pangan Lokal).

Penguatan masyarakat adat dan Orang Asli Papua berupa pemetaan hak ulayat, registrasi dan penerbitan sertifikat hak komunal serta pemberian hak pengelolaan hutan adat.

Penyampaian tersebut, diami dan diapresiasi oleh Wakil Presiden Prof. K.H Maruf Amin, dan menyatakan akan mendukung usulan prioritas yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, sekaligus menyampaikan arahan selaku ketua tim Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis pasca pertemuan ini seperti yang diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2020.

● Penulis : Tim Media/Balitbangda PB
Editor : Jimmy Wanma

Empat Tahun Kepemimpinan DM dan ML



Wawancara Gubernur Papua Barat Drs. Domingus Mandacan oleh Kompas.id. DOK. BALITBANGDA PB

Pada 12 Mei 2021, genap empat tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan (DM) dan Mohamad Lakotani (ML). Kedua Putra terbaik Papua Barat ini berhasil meletakkan fondasi pembangunan yang menjadi ciri khas bagi Papua Barat, dengan lahirnya Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Dengan Perdasus ini, Papua Barat sekarang dikenal juga dengan sebutan lain, yakni Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Perdasus ini ibaratnya sebuah pagar yang memagari halaman rumah wilayah Provinsi Papua Barat, untuk mencegah penyerobotan oleh pihak luar. Penataan dan pengelolannya ditentukan oleh tuan rumah, deng-

an memastikan bahwa generasi mendatang akan menikmati udara, air, alam dan keanekaragaman hayati yang sama kualitasnya seperti yang dinikmati saat ini.

Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam konteks pembangunan berkelanjutan? Berikut pernyataan Gubernur Papua Barat, Drs. Domingus Mandacan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si yang diwawancarai di Manokwari, pada Rabu 21 April 2021.

Perlu diketahui, luas Hutan di Papua Barat adalah 8.679.864,18 Ha atau 61,83 persen dari total luas wilayah, termasuk laut. Ini menjadi sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Oleh sebab itu dalam berbagai

kesempatan, Domingus Mandacan selalu menyampaikan kepada masyarakat dimana saja dengan dengan kalimat : mari kita jaga hutan, hutan jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita juga jaga laut, laut jaga kita. Kita birukan langit, kita hijaukan bumi. Kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka.

Pemerintah Papua Barat telah berkomitmen melalui Deklarasi Manokwari 2018, untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan di Papua Barat, minimal 70 persen luas tutupan hutan, dan menjaganya dengan menetapkan regulasi Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Kemudian merevisi RTRW Papua Barat, guna mengakomodir komitmen 70 persen

kawasan lindung. Juga sedang mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat, sehingga masyarakat akan melindungi hutannya karena kesejahteraannya meningkat dan budaya serta adat istiadat yang menjadi identitas orang asli papua tetap terpelihara sampai dengan generasi yang akan datang.

“Kami juga menerapkan kebijakan no palm oil atau tidak ada pemberian ijin baru bagi usulan pembukaan areal hutan untuk kelapa sawit. Kami memfokuskan diri untuk pengembangan ekonomi hijau dengan memprioritaskan komoditas unggulan daerah *non deforestasi*,” ujar Gubernur Domingus Mandacan.

Pemerintah Papua Barat hanya melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah ada, dan difokuskan pada areal kebun yang dikelola oleh masyarakat atau petani, terutama petani orang asli papua. Bagi kebun-kebun yang izinnya bermasalah berdasarkan hasil evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit kami akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi temuan yang ada.

Juga telah dilakukan evaluasi terhadap proses perijinan dan substansi perkebunan kelapa sawit bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mitra pembangunan Yayasan Econusa. Dari 576.090,83 Hektar luasan yang dievaluasi 383.431,5 hektar masih berupa hutan yang berpotensi untuk diselamatkan. Sampai sejauh ini sudah ada beberapa Perusahaan Kelapa Sawit yang ijinnya telah dicabut, seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Pemerintah Papua Barat juga telah menetapkan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat adat dan hak kepemilikannya. Pemrov Papua Barat tetap bersikap mengedepankan proses dialog dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat serta berupaya mencari solusi dan alternatif usaha lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama meningkatkan komoditas *non deforestasi* dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejah-

teraan masyarakat.

Terkait hal itu, Pemerintah Papua Barat juga sedang mencoba berbagi inisiatif untuk mendapatkan keuntungan nilai ekonomi dari upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dan budaya termasuk mengusulkan skema insentif transfer fiskal berbasis ekologi melalui Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan luasan tutupan hutan di Provinsi Papua Barat.

Kami juga telah membentuk kelompok kerja Perhutanan Sosial dan Satuan Tugas



Wawancara Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si oleh Kompas.id. DOK. BALITBANGDA PB

Reformasi Agraria. Banyak kendala yang dihadapi terkait pembentukan hutan adat. Pertama tahapan pra kondisi untuk menyiapkan kelembagaan masyarakat adat dan juga menyiapkan rencana bisnis hutan adat untuk mengikuti persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kami berusaha untuk mendorong pengembangan ekowisata sebagai salah satu

komoditas lokal unggulan *non deforestasi* bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi-asosiasi pengelola ekowisata untuk mengembangkan potensi ekowisata di wilayahnya.

Saat ini juga kami sedang mengusulkan konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat dengan mengembangkan simpul Sorong-Raja Ampat dan simpul Manokwari – Pegunungan Arfak sebagai bagian dari program percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020. Dimana Raja Ampat telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi prioritas nasional dan akan dikembangkan juga sebagai salah satu geopark di Indonesia. Khususnya untuk simpul Manokwari – Pegunungan Arfak kami mengusulkan penataan sekitar Danau Anggi Kembar (Anggi Giji dan Anggi Gida). Pendirian Sains Teknopark Kakao dan Kopi di Ransiki yang terintegrasi dengan perkebunan kakao dan museum coklat, pendirian museum sejarah alam keanekaragaman hayati dan juga terintegrasi dengan kebun raya gunung meja di Manokwari.

Kendala yang sering kami hadapi disamping infrastruktur kepariwisataan dan aksesibilitas adalah sumber daya manusia yang masih rendah sehingga sedang dibangun Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia pendidikan Fokasi di Ransiki Manokwari Selatan yang akan mendidik tenaga terampil yang akan bekerja pada sektor pariwisata yang sedang kami bangun.

Selain Kakao kami memiliki begitu banyak potensi komoditas di Papua Barat, namun kami telah menetapkan prioritas komoditas local unggulan daerah *non deforestasi* yaitu kakao, kopi, pala, kelapa dalam, rumput laut, sagu dan ekowisata.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pengembangan komoditas local unggulan ini adalah membentuk satuan tugas ekonomi hijau berbasis komoditas local unggulan *non deforestasi*, dengan fokus pada bagian hilir dengan mencari pasar atau market, kemudian memperbaiki rantai pasok dan produktifitas di hulu. Membantu pengenalan dan produksi produk sampai ke luar negeri, khususnya kakao dan Ekowisata. Khususnya ke Amerika Serikat, Eropa, Australia dan juga Selandia Baru.

Mengkoordinasikan semua *stakeholder* termasuk mitra pembangunan untuk pengembangan komoditas lokal unggulan *non deforestasi* bekerjasama membangun industri dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah pembangunan pusat pengembangan inovasi dan teknologi produk kakao di Manokwari Selatan dan mendorong aktivitas ekspor.

Gubernur Mandacan juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah membantu membangun infrastruktur jalan trans nasional di Papua Barat.

Membangun infrastruktur tidak menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi jadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kita tahu kondisi yang ada, masyarakat kita banyak bermukim di lereng-lereng gunung, di puncak, di pesisir dan di pulau-pulau dan di daerah terpencil lainnya. Sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur.

Jalan yang sudah dibangun adalah dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw dan Manokwari, lalu dari Manokwari ke Manokwari Selatan, Teluk Wondama sampai tembus di Kabupaten Nabire. Sekarang dalam tahap peningkatan, diharapkan tahun depan sudah rampung. Untuk bagian selatan juga sedang dibangun. Fak-fak dan Kaimana yang belum tembus, tapi sedang dikerjakan. 2-5 Tahun ke depan sudah bisa tembus dan bisa juga tembus ke wilayah Papua Selatan.

Membangun jalan dan jembatan, tentu ada kawasan yang rusak. Tapi tentunya melalui proses pengusulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia jika melalui kawasan yang dilindungi. Tapi di satu sisi kita harus bangun. Ketika kita bangun, itu bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan mengembangkan potensi yang ada di daerah itu. Jalan yang terbuka juga memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Masuk wilayah adat juga selalu dengan pendekatan budaya. Kita bangun infrastruktur, agar semua sektor bisa maju.

Di sektor pertambangan, Gubernur juga akan meninjau kembali praktek-praktek yang berlangsung selama ini, agar tidak ber-

dampak negatif dan merugikan masyarakat, baik dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sejak Tahun 2015 Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat mendeklarasikan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Kemudian dengan berjalannya waktu, pada momen ICBE Tahun 2018 itu menghasilkan Deklarasi Manokwari yang berisi 14 butir, salah satu yang menguat adalah komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi tutupan hutan 70 persen dari luas total hutan yang ada di Provinsi Papua Barat. Kemudian tindak lanjut dari Deklarasi Manokwari yang dijadikan sebagai patokan maupun arahan di dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan ditetapkan Perdasus Nomor 9 Tentang Masyarakat Hukum Adat dan Perdasus Nomor 10 Tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Bukan sekadar komitmen tapi juga bagaimana untuk melindungi tutupan hutan dan bagaimana untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati yang ada, tetapi juga masyarakat adat yang ada di Papua Barat. Pengelolaannya ditekankan kepada mereka. Ini juga diikuti dengan berbagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi kita bisa melihat bahwa Papua Barat mendorong bagaimana pengembangan ekonomi hijau terutama komoditas unggulan lokal

“Kami juga menerapkan kebijakan *no palm oil* atau tidak ada pemberian ijin baru bagi usulan pembukaan areal hutan untuk kelapa sawit. Kami menfokuskan diri untuk pengembangan ekonomi hijau dengan memprioritaskan komoditas unggulan daerah *non deforestasi*.”

non deforestasi yang kemudian sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Pembentukan satuan tugas, dan juga diikuti dengan langkah-langkah kongkrit lainnya.

Gubernur Papua Barat sudah meluncurkan KSP (Kawasan Strategis Provinsi) berfungsi lindung. Itu yang dikenal dengan *The Crown Jewel of Tanah Papua*. Kawasan Lindung Mahkota Permata Tanah Papua yang luasannya itu mencapai 2,3 Juta Ha, meliputi empat Kabupaten (Tambrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni).

Kawasan konservasi yang ada, kemudian diperluas, jadi satu kawasan lindung yang besar. Saat ini sedang dikerjakan secara legalitas untuk dimasukan ke dalam tata ruang Provinsi atau *spatial planning* kita yang sedang dalam proses revisi. Dengan ditetapkan rencana tata ruang kita yang baru, itu akan mengakomodir 70 persen kawasan lindung. Dimana akan terdapat juga KSP Mahkota Permata Tanah Papua. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan diikuti juga oleh komitmen teresterial hutan di darat juga diikuti untuk melindungi laut dan pesisir di Papua Barat. Dengan RZWP3K yang sudah ditetapkan, Perdanya juga sudah jadi kawasan konservasi laut meliputi 2,5 Juta Ha, mencakup seperempat dari seluruh luasan konservasi laut yang ada di seluruh Indonesia.

Kita berharap Pemerintah Pusat juga bisa memberikan reward terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bentuk insentif yang diusulkan skemanya dalam bentuk Transfer Fiskal berbasis ekologis, yang mekanismenya dalam bentuk Dana Alokasi Umum itu.

Jika melalui DAK atau Dana Otsus akan kurang memberikan motivasi yang kuat bagi daerah yang memiliki kawasan hutan, sehingga akan mendorong daerah-daerah lainnya di Indonesia untuk memperhatikan kelestarian hutan. Apabila sub indikator luas wilayah dimasukan maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian NDC (Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).

Ketua *Steering Committee Indigenous People and Local Community, Governors Climate and Forests (GCF) Task Force*, sedang mendorong pelaksanaan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di Tanah Papua. Ini di-



Diskusi terbatas Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang tantangan dan peluang pengakuan masyarakat adat serta penyiapan wilayah adat di Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

harapkan membantu memberikan kontribusi yang besar terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat adat di seluruh dunia dan juga kontribusi terhadap perubahan iklim yang ada.

IPLC dalam beberapa bulan terakhir mengkoordinasikan antara perhutanan sosial dan reforma agraria, disamping itu mendorong kampung-kampung atau wilayah adat ini memiliki SK Hutan Adat yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan adanya SK Hutan Adat, kita harap penjagaan dan pelestarian terhadap Hutan bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai.

Paradigma Kawasan Lindung yang kita ingin kita bangun, pertama dengan mensejahterakan masyarakat adat dulu, sehingga dengan sadar akan melestarikan hutan mereka. Karena hutan yang ada di Papua ini berbeda dengan yang ada di tempat lain di luar Tanah Papua. Hutan ini dimiliki oleh masyarakat adat, bukan hutan yang kosong kemudian mudah diambil alih oleh Pemerintah begitu saja.

Tentunya dengan *review* yang dilakukan bersama mitra pembangunan, dengan ko-

misi pemberantasan korupsi terkait dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, dan ini berkontribusi nyata terhadap perijinan kelapa sawit.

Kebijakan yang diambil Gubernur adalah *No Palm Oil*. Tidak ada lagi pemberian ijin atau usulan baru pembukaan lahan bagi kelapa sawit. Kondisi tutupan hutan di Papua saat ini 85-90 persen masih *Virgin Forest/Intect Forest* yang belum terjamah.

Dalam tiga tahun terakhir ada perubahan paradigma yang signifikan terutama arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Saat ini Pemerintah Papua Barat berusaha lebih pro kepada masyarakat adat. Jaman dulu mindset pemimpin daerah adalah mendatangkan korporasi dengan alasan untuk mendongkrak APBD. Tapi pada saat ini, apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Papua Barat adalah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar itu kepada masyarakat adat. Sehingga didorong pengembangan komoditas unggulan *non deforestasi*. Kita tidak anti investasi, tapi kita sangat hati-hati melihat investasi yang mau masuk ke Papua Barat.

Kalau korporasi masuk, kemudian masyarakat ini hanya sebagai pekerja saja, ya lebih baik tidak usah. Kita ingin lewat ekonomi kerakyatan yang didorong saat ini memberikan kemandirian bagi mereka. Sehingga mereka akan mandiri, berdaya dan membuat perubahan dalam hidupnya. Kita dorong investasi yang lebih ke hilir, misalnya yang terkait distribusi dan pemasarannya.

Pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya langkah untuk menghindari kemiskinan *absolute* yang akan melanda masyarakat kita, terutama orang asli papua. Saat ini kita disebut provinsi termiskin nomor dua di Indonesia, tetapi kemiskinan ini hanyalah kemiskinan nilai intrinsik, karena tidak ada uang cash di masyarakat. Tetapi mereka sangat kaya dengan natural kapital yang ada, hutan, laut, danau, yang begitu kaya. Tidak perlu uang cash untuk mendapatkan makanan bagi kehidupan mereka, karena semuanya telah tersedia, mereka tinggal ambil saja di hutan, laut atau di danau. Karena itu kita menghindari, jangan sampai kemiskinan *absolute* itu menjadi nyata, dimana hutan tandus, air tercemar, hewan buruan hilang, dan pada suatu ketika masyarakat Papua akan menadahkan tangan ke atas dan meminta-minta. Karena mereka tidak punya kekuatan dan modal alam lagi.

Karena itu Balitbangda Papua Barat bersama para mitra pembangunan sedang merancang suatu formula yang memanfaatkan *Natural Capital* yang dimiliki masyarakat adat Papua, menjadi suatu insentif yang diberikan oleh pemerintah maupun dunia internasional melalui skema-skema yang ada. Sehingga mereka tidak perlu merusak hutan atau mencemarkan sungai. Perlu diingat, kita ini masih hidup di planet yang sama. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan hutan dan laut papua akan mempengaruhi hajat hidup orang lain di tempat lain atau bagian lain yang ada di dunia.

Seperti kata Gubernur Papua Barat, kita tidak mungkin hidup di planet yang sakit. Tugas utama kita adalah mewarisi mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka. Beban pembangunan akan lebih besar, jika modal alam kita ini sudah rusak.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Pemaparan materi oleh Kepala Balitbangda dalam kegiatan Rakornis Penelitian dan Pengembangan Daerah Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2017. DOK. BALITBANGDA PB

Kreatif, Inovatif dan Sinergi Jadi Kunci

“Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Papua Barat Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.”

Salah satu paradigma UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, dimana daerah diberi kewenangan untuk merumuskan, menetapkan dan melaksana-

kan kebijakan secara mandiri. Untuk itulah peran strategis dari fungsi kelitbang-an dan inovasi daerah sangat dibutuhkan. Selanjutnya pasal 219 UU Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk “Badan”.

Salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Secara teknis PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat Balitbangda Provinsi Papua Barat, dengan tipe B untuk mewadahi fungsi badan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang.

Peran strategis dari visi Balitbangda Provinsi Papua Barat adalah sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yaitu, **Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat**, dengan tugas pokok yang diemban adalah melaksanakan fungsi strategis mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat di bidang Kelitbang-an



Pertemuan internal seluruh ASN dan THL dilingkup Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

dan Inovasi Daerah. Tugas dan fungsi Balitbangda sendiri sesuai substansi pokok RPJMD adalah berkontribusi terhadap pencapaian misi pertama yaitu “Menciptakan

tata kelola pemerintahan yang berbasis aparatur yang bersih serta otonomi khusus yang efektif, dimana Balitbangda mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kelitbang-an dan inovasi dengan kewenangan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan aktivitas kelitbang-an dan inovasi pemerintah-

Penandatanganan Deklarasi Manokwari oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si Tahun 2018. DOK. BALITBANGDA PB

an dalam negeri dan otonomi khusus di daerah, untuk terus mengawal dan mengkoordinir segala proses pembangunan berkelanjutan dengan tugas pokok dan memainkan peran strategis Kelitbang-an dan Inovasi daerah yaitu :

- Sebagai institusi pemerintah daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi di daerah dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan kelitbang-an dan inovasi daerah.

- Sebagai *think tank* dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan peningkatan kapasitas daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya percepatan otonomi daerah.

- Sebagai lembaga profesional dan bersifat semi akademik yang mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak atau kemitraan pembangunan seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, mitra pembangunan (NGO lokal, nasional dan internasional) yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat yang sangat *leadership* terutama dengan melihat urgensi Balitbangda sebagai lembaga semi akademik di birokrasi Pemerintah Daerah yaitu:

- Kelitbang-an sebagai dasar terciptanya inovasi daerah guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

- Hasil kelitbang-an dan inovasi daerah harus didukung data dan fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Kelitbang-an dan inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah



Diseminasi Hasil Penelitian kerjasama mitra pembangunan perguruan tinggi UNIPA. DOK. BALITBANGDA PB

lam pelaksanaannya tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, dan bukan merupakan isu penting khususnya kemitraan dengan berbagai pihak;

- Peran Balitbangda tidak ditempatkan sebagai Perangkat Daerah yang strategis, walaupun faktanya bahwa secara operasional peran Balitbangda Provinsi Papua Barat sangat strategis dan banyak sekali memberikan masukan serta berperan aktif dalam membantu Pimpinan Daerah, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam kebijakan pemerintah daerah, yang berdampak pada perubahan paradigma pembangunan di Papua Barat yang telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Provinsi Konservasi) dengan Deklarasi Manokwari sebagai arahan utama Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;

- Program dan kegiatan tidak sinergi dengan perangkat daerah lain, bahwa hasil-hasil riset yang dihasilkan, dan kolaborasi antara Balitbangda dengan para mitra pembangunan dalam percepatan pembangunan khususnya kegiatan yang berdampak pada capaian OPD tertentu ternyata tidak ditindaklanjuti sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/program untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah;

- Masih minimnya sumber daya manusia serta tidak sesuai kebutuhan akan tenaga yang dibutuhkan oleh Balitbangda khususnya tenaga peneliti yang tidak tersedia, tentunya ini sangat menyulitkan fungsi dan peran Balitbangda sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi kelitbang dan inovasi daerah;

- Peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Balitbangda yang terbatas kepada kemampuan manajerial, serta kemampuan dasar sebagai struktural di pemerintahan, hanya sedikit yang diarahkan kepada dasar-dasar riset serta kerjasama dengan para Mitra Pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas melalui advokasi, penelitian bersama, kolaborasi ber-

Rapat koordinasi antar mitra pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat baik NGO lokal, nasional dan internasional. DOK. BALITBANGDA PB

sama terutama dalam mengawal butir-butir Deklarasi Manokwari;

- Banyak hasil penelitian dan kerjasama yang dihasilkan Balitbangda Provinsi Papua Barat yang dianggap tidak berdampak langsung, walaupun faktanya banyak sekali yang sudah dihasilkan dan berdampak langsung beberapa contoh diantaranya adalah pembangunan ekonomi hijau yang mulai diterapkan dan mulai berhasil seperti revitalisasi hasil produk kakao (coklat ransiki), rumput laut, kopi, energi terbarukan, Perdatus pembangunan berkelanjutan, konsep pembangunan berkelanjutan, inisiatif kawasan konservasi baru, *review* perizinan, *review* RTRW, komoditas unggulan, potensi wisata OAP, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), pendampingan dan pemberdayaan bagi anak-anak muda papua yang memiliki jiwa kewirausahaan melalui Papua Muda Inspiratif (PMI);

- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai terutama gedung kantor, yang representatif dimana operasional kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai saat ini masih menggunakan ruang kerja pinjaman dari Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Barat, dimana Balitbangda menggunakan 3 ruangan untuk melaksanakan tugas dengan jumlah tenaga baik ASN dan tenaga harian lepas (THL) berjumlah 52 orang;

Sasaran strategis kinerja pelayanan Balitbangda adalah "Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah",



dan sebagai indikator kinerja sasaran adalah tingkat implementasi inovasi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2017 – 2020.

Walaupun diperhadapkan dengan hambatan dan tantangan yang banyak tetapi dengan kepemimpinan Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, selaku kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, dalam pelayanannya dapat memberikan dampak yang luar biasa bahkan mempengaruhi paradigma kebijakan di Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi konservasi/berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di tengah situasi pandemi Covid-19 dimana pembatasan orang berkumpul, *work from home* (WFH) serta pengurangan intensitas pertemuan menyebabkan banyak kegiatan yang tertunda dan terhambat, bahkan banyak ca-

paian yang didapatkan melalui berbagai kebijakan, dan langkah-langkah inovatif yang dilakukan, hasil kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, mitra pembangunan dan OPD lainnya dengan semangat kolaborasi untuk mengkomodir indikator kerja utama sehingga bisa menjadi arahan bagi Balitbangda untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan masukan kepada pimpinan daerah, khususnya dalam pencapaian target RPJMD, sesuai arahan dalam 14 butir Deklarasi Manokwari, Keterbatasan waktu dan sumber daya tenaga peneliti terutama saat pandemi covid-19 dan tenaga ahli yang melaksanakan tugas tidak mengurangi semangat untuk terus berkarya guna mencapai target dan sasaran strategisnya.

● Penulis : Ferry Hurulean/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

Peran strategis dari visi Balitbangda Provinsi Papua Barat adalah sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yaitu, Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat, dengan tugas pokok yang diemban adalah melaksanakan fungsi strategis mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat di bidang Kelitbang dan Inovasi Daerah.

KEGIATAN BALITBANGDA PROVINSI PAPUA BARAT | TAHUN 2017 - 2020

No	Uraian kegiatan	Output Kegiatan	Tahun Pelaksanaan				Jumlah
			2017	2018	2019	2020	
1	Renstra Balitbangda 2017 - 2020	Dokumen	1				1
2	Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS)	Kegiatan		1	1	1	3
3	Master Plan Kelitbangan Provinsi Papua Barat 2017 - 2022	Dokumen	1				1
4	Rencana Kerja (RENJA)	Laporan	1	1	1	1	4
5	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Laporan	1	1	1	1	4
6	Laporan <i>Monitoring Form</i> 55e	Laporan	1	1	1		3
7	Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi	Laporan		1	1	1	3
8	Laporan Keuangan (CALK, BKU, LRA, Neraca, KIB B/aset, Rekening Koran, Rekonsialisasi Barang dan Keuangan)	Laporan	1	1	1	1	4
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen	1	1	1	1	4
10	Pembuatan Website Balitbangda	Website		1			1
11	Hasil Penelitian/kajian/analisis	Dokumen	3	5	7	4	
12	Regulasi Perdasus/Perdasi/Perda	Draf Perdasi/Rapergub		2			2
13	<i>Memorandum of Understanding (MoU)/ Letter of Agreement (LoA)</i> Perjanjian Kerjasama	Perjanjian	2	2	3	3	10
14	Buku hasil penelitian	Edisi		3	3	6	12
	Terbitan	Eksemplar		1200	1200	1800	4200
15	Jurnal Igya ser hanjop	Edisi			1	2	3
	terbitan	Eksemplar			500	1000	1500
16	Majalah Kasuari Inovasi	Edisi			2	2	4
	terbitan	Eksemplar			700	700	1400
17	Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	HaKI (Hak Cipta)					22
	Merk/Logo	Merk				11	
	Desain Industri	Desan Industri				2	
	Hak Cipta	Hak Cipta				7	
	Kekayaan Intelektual Komunal/KIK	KIK				2	

CAPAIAN-CAPAIAN KEGIATAN BALITBANGDA | KURUN WAKTU 2017 - APRIL 2021

No	Capaian Kegiatan	Tahun
1	Menghadirkan skema pendanaan global dengan pembiayaan bertajuk <i>Green Climate Fund</i> (GCF) untuk membantu negara berkembang menanggulangi dampak perubahan iklim, dimana Pemerintah Daerah yang memiliki visi membangun secara berkelanjutan berpeluang besar untuk mengakses dana perubahan iklim tersebut guna membiayai berbagai program pembangunan	2018
2	Pelaksanaan <i>International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy</i> (ICBE) 2018 atau Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif, digelar di Manokwari, Papua Barat, 7-10 Oktober 2018. Tema pertemuan ini adalah Provinsi Berkelanjutan Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua	2018
3	Deklarasi Manokwari. Merupakan hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditanda tangani pada tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan Visi Bersama Tanah Papua yaitu: Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat	2018
4	Pendampingan bersama wirausahawan muda Papua yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif (PMI), yang merupakan sebuah gerakan kolaboratif muda/i dengan Visi, bersatu, bersinergi, dan berkarya untuk kesejahteraan Tanah Papua	2019
5	Pembentukan Satgas Komoditas. Dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Satgas ini dibentuk dengan SK Gubernur Papua Barat dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan di Provinsi Papua Barat	2019
6	Mahkota Permata Tanah Papua. Pembentukan inisiatif baru Kawasan Strategis Provinsi Papua Barat yang berfungsi lindung, yaitu kawasan "Mahkota Permata Tanah Papua (<i>Crown Jewel of Tanah Papua</i>)" Mahkota permata tanah Papua yang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan proporsi kawasan berfungsi lindung sehingga mencapai 70% seperti tertuang dalam Deklarasi Manokwari tahun 2018	2019
7	Skema investasi hijau (GIBP) Papua dan Papua Barat adalah pusat informasi mengenai komoditas potensial untuk dikembangkan sebagai elemen investasi hijau, tantangan dan peluang untuk pengembangan komoditas dan solusi pengembangannya.	2019
8	Penetapan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemetaan Masyarakat Adat pada tanggal 20 Maret 2019	2019
9	Penetapan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus Nomor 10 Tahun 2019) tentang Pembangunan Berkelanjutan	2019
10	Pengembangan dan pengelolaan coklat Ransiki, Gagasan ini dilakukan bersama dengan Mitra Pembangunan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau yang kemudian berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pipiltin Cocoa, Koperasi Petani Cokran "Ebier Suth".	2019
11	Pengajuan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai usulan instrumen fiskal dengan Indikator Luas Tutupan Hutan (Aspirasi Teminabuan), Bahwa pengajuan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai usulan instrumen fiskal dengan indikator luas tutupan hutan (forest cover) berupa hutan primer dan hutan sekunder, ini menjadi solusi berupa skema kebijakan baru bagi kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki tutupan hutan untuk mendapatkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).	2019
12	Pahlawan Konservasi Global/ <i>Global Conservation Hero</i> – kepada Gubernur Papua Barat (Los Angeles, Amerika Serikat 8 Juni 2019) Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan dunia Internasional atas upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga hutan, laut serta menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat asli Papua Barat dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan	2019

No	Capaian Kegiatan	Tahun
13.	Peringkat 18 Provinsi seluruh Indonesia Indeks Daya Saing Daerah /IDSD yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek dan BRIN yang merupakan Profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan	2020
14	Pembangunan Kawasan Inovasi Produk Cacao Ransiki yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda, Pemda Mansel, Koperasi Ebier Suth dan Mitra Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GEG)	2020
15	Konseptor dan inisiator program <i>talent scouting</i> Ilmuwan Muda Papua Bersama Yayasan Econusa yang bertujuan untuk mengorganisir mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi di Tanah Papua sebagai periset handal dan melakukan riset dengan tema pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dengan subtema ekologi, ekonomi dan sosial	2020
16	Peninjauan kembali perizinan perkebunan dan kehutanan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dimana ada 20 izin perkebunan skala besar dan hanya 8 yang aktif dengan luasan mencapai 500.000 Ha.	2020
17	Peringkat pertama Piala Adhigana dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan kepada Prof Dr Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, Kepala Balitbangda Pemerintah Provinsi Papua Barat.	2020
18	Major Projects dan Quick Wins berupa Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan pendirian pendidikan vokasi atau pusat (balai) latihan kerja dan pendirian sekolah menengah umum (SMU) Unggulan dalam rangka menghasilkan siswa unggul yang berwawasan nasionalisme dengan kurikulum yang setara dengan SMU Taruna Nusantara	2021
19	Major Projects dan Quick Wins berupa Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat yang sesuai dengan Visi Pembangunan Berkelanjutan yang konservasi, keanekaragaman hayati, budaya dan religi dengan simpul utama Sorong – Raja Ampat yang telah terbangun dengan simpul Manokwari- Pegunungan Arfak (Kawasan Danau Anggi, Museum Keanekaragaman Hayati dan Kebun Raya Gunung Meja dan Museum Coklat Ransiki)	2021



Jumpa pers setelah setelah pelaksanaan *Workshop* Mewujudkan Hutan Sosial, Hutan Adat dan Reforma Agraria Konteks Sosial Papua. DOK. BALITBANGDA PB

Akselerasi Pencapaian Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di Provinsi Papua Barat

Dinamika proses akselerasi dalam tiga kegiatan perhutanan sosial dan reforma agraria di Provinsi Papua Barat yang dimulai dari *workshop* status Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria pada tanggal 8-9 Februari 2021 di Mansinam Beach Hotel, *Coaching clinic* pada Tanggal 18-19 Maret 2021 di Hotel Vega Sorong dan *fieldtrip* pada Tanggal 20 Maret 2021 di Malaumkarta, Sorong. Dari ketiga kegiatan diperoleh informasi penting terkait potensi Tanah Objek Reforma Agrarian (TORA) yang menca-

pai 14.837,44 Ha, sedangkan luas Kawasan Perhutanan Sosial yang telah keluar Surat Keputusan di Papua Barat untuk Hutan Desa 52.198 Ha dan Hutan Kemasyarakatan 1.057 Ha. Kegiatan paralel melalui *coaching clinic* dilaksanakan setelah *workshop* untuk menyempurnakan dokumen-dokumen pengajuan proposal skema Hutan Adat serta *fieldtrip* untuk mengetahui langsung bagaimana proses-proses partisipatif di lapangan. Kegiatan ini merupakan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, *Governor*

Climate Forum, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat serta Yayasan EcoNusa dengan dukungan Dana dari *United Nations Development Programme* (UNDP).

Ketua *Steering Committee Taskforce Indigenous People and Local Community, Governor Climate Forum*, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si mengungkapkan bahwa tiga rangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan penting yang akan mem-



berikan dampak pada percepatan penetapan Hutan Adat di Tanah Papua dimana sampai saat ini belum satu pun ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi Gugus Tugas Masyarakat Adat yang berada dibawah Kantor Wilayah ATR/BPN dengan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu pembelajaran dalam ketiga proses yang telah dilewati ini agar dapat didokumentasikan menjadi pembelajaran penting di masa mendatang sekaligus untuk bekal bagi delegasi Indonesia di forum-forum internasional *Governor Climate Forum*. Selain itu rangkaian kegiatan ini tentunya sangat mendukung pencapaian Deklarasi Manokwari terutama mendorong masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan berkelanjutan di provinsi ini, tambah Prof. Heatubun.

Workshop dihadiri oleh 75 orang terdiri dari 42 orang *offline*, 33 orang *online* yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah ATR/BPN, DPRD Fraksi Otsus, Perguruan Tinggi dan perwakilan masyarakat adat serta Sekretariat *Governor Climate Forum* dan anggota *Steering Committee Taskforce IPLC* dari Kalimantan Timur dan Provinsi Aceh. Tujuan dari *workshop* untuk memberikan update pemahaman tentang konsep, ke-

Kegiatan *coaching clinic* Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat di Vega Hotel Sorong.
DOK. BALITBANGDA PB

bijakan dan implementasi dari perhutanan sosial dan reforma agrarian, mendiskusikan persoalan, hambatan, tantangan dan opsi-opsi solusi terkait pelaksanaan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di Tanah Papua serta menyusun agenda prioritas dari *Steering committee* bersama dengan Pokja Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam mendorong fasilitasi pengurusan, penetapan dan implementasi dari hutan sosial dan hutan adat. Target areal Perhutanan Sosial berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) di Provinsi Papua Barat seluas 650.476 Ha dan sampai tahun 2020 tercapai seluas 44.621,19 Ha yang berada pada 32 lokasi dengan skema hutan kemasyarakatan sebanyak tiga ijin seluas 857 Ha dengan jumlah anggota 69 orang, skema hutan desa sebanyak 28 ijin seluas 41.210 Ha diberikan kepada 1.592 kepala keluarga serta indikatif hutan adat di Kabupaten Sorong seluas 2.554,19 Ha.

Berdasarkan pada pengalaman tim di lapangan, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku dan Papua, Yusuf, S.P., M.Si menyatakan dalam diskusi dengan peserta dan wartawan, tantangan dan hambatan utama dalam mendorong Perhutanan Sosial terutama

ma untuk Skema Hutan Adat adat adalah sebagai berikut:

- Peraturan dan mekanisme Perhutanan Sosial belum banyak yang diketahui para pihak.
- Kurangnya informasi Perda/Produk Hukum daerah tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA).
- Informasi Perda/SK kepala daerah tentang pengakuan MHA beserta wilayah adatnya masih sangat minim.
- Perda/SK kepala daerah terkait pengakuan terhadap MHA seringkali merupakan produk lama, sehingga tidak diketahui apakah produk hukum dimaksud masih berlaku atau telah dianulir.
- Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak akan kebijakan tentang hutan hak/hutan adat sehingga seringkali proses-proses terkait hutan adat dianggap sebagai suatu "ancaman".
- Basis Peta Wilayah Adat dan hutan adatnya belum jelas atau pemetaan wilayah adat yang masih terbatas. Peta wilayah adat/hutan adat (lampiran perda-per-



Kegiatan *coaching clinic* Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat di Vega Hotel Sorong.
DOK. BALITBANGDA PB

da) yang ada seringkali tidak sesuai dengan kaidah perpetaan sehingga harus dilakukan proses geoprocessing/verifikasi yang memakan waktu lama.

- Hutan adat adalah bagian dari wilayah adat yang seringkali tidak jelas lokasinya, sehingga menyulitkan proses verifikasi awal.
- Jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia pendamping dan pemegang ijin yang masih terbatas
- Pembiayaan untuk mendukung proses pengurusan ijin dan pengembangan ekonomi pasca ijin dikeluarkan.

Hasil *Coaching Clinic* tanggal 18-19 Maret 2021, mendapati bahwa tiga Kabupaten yang telah memiliki Perda Pengakuan Wilayah Adat yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Teluk Bintuni menjadi perhatian untuk menghasilkan pengakuan Hutan Adat. Kegiatan ini melibatkan 24 perwakilan Masyarakat Adat, 6 Suku dan 14 Marga yang terdiri dari Suku Ambel, Kabupaten Raja Ampat, Suku Abun dari Kabupaten Tambrau, Suku Mare dari Maybrat dan Suku Imiah dari Kabupaten

Sorong Selatan. Selain itu pejabat pemerintah dari kelima kabupaten tersebut juga terlibat dalam kegiatan ini termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Hutan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maybrat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tambrau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sorong Selatan.

Pada Tanggal 25-26 Maret 2021, pertemuan koordinasi dengan *Governor Climate Forum*, Ketua dan Anggota *Steering Committee Taskforce Indigenous People and Local Community*, *Governor Climate Forum* serta Pemerintah Daerah terkait membahas pelaporan kegiatan dan tindak lanjut. Hadir dalam kegiatan ini termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat, Koordinator GCF Indonesia, Anggota SC IPLC *Taskforce* dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Aceh. Mewakili

Gubernur Papua Barat, Raymond R.H. Yap, SE, MTP selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini dan berharap agar hutan adat juga dapat segera diwujudkan di Tanah Papua. Ia juga menyampaikan prinsip keterbukaan dan partisipatif yang telah diterapkan dalam kegiatan ini, perlu dibudayakan untuk pelaporan dan tindak lanjut Kerjasama dengan Mitra Pembangunan. Dari serangkaian kegiatan ini, agenda bersama yang perlu diperhatikan dalam akselerasi pencapaian sekama hutan adat di Provinsi Papua Barat meliputi:

- Melengkapi data dan informasi pengurusan skema Perhutanan Sosial dari masyarakat adat terutama untuk skema Hutan Adat. Data-data yang dihasilkan dari *workshop* yang bersumber dari masyarakat adat, CSO/LSM pendamping dan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi dasar untuk melakukan *re-check*, dan *cross-check data*. Mendorong pemerintah kabupaten untuk mempercepat proses penyusunan PERDA pengakuan wilayah adat. Untuk Provinsi Papua Barat terdapat tiga kabupaten yang telah memiliki PERDA tersebut yaitu Kabupaten Tambrau, Sorong dan Teluk Bintuni. Termasuk yang perlu diajak adalah Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Bidang Hukum, Kepala Dinas Lingkungan



Diskusi bersama masyarakat adat di Kampung Malaumkarta Sorong terkait pemetaan hutan adat. DOK. BALITBANGDA PB

Hidup serta anggota DPR Fraksi Otsus karena perannya dapat mempercepat adanya PERDA pengakuan Wilayah Adat di kabupaten masing-masing.

- Mendorong percepatan proses pemetaan wilayah adat di tiga kabupaten tersebut. Selain itu juga mendorong penyusunan profil masyarakat adat dan rencana pengelolaan wilayah adat secara berkelanjutan. Kerjasama dengan CSO/LSM/Pendamping tetap harus dilakukan untuk dapat meleng-

kapi Data Potensi Hutan Adat untuk perencanaan pengelolaan pasca ijin diberikan.

Memfasilitasi proses sinergi kerja reforma agraria dengan perhutanan sosial dengan mendorong koordinasi antara Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dibawah Dinas Kehutanan Provinsi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria dibawah ATR/BPN.

Bekerjasama dengan *Social Forestry Taskforce* dan Balai Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua untuk memfasilitasi percepatan pengusulan hutan adat dari Tanah Papua terutama untuk target percepatan dari Kabupaten Tambrau, Sorong dan Teluk Bintuni. Diharapkan tahun 2021 sudah dapat menghasilkan paling tidak satu wilayah adat yang ditunjuk sebagai Hutan Adat di Tanah Papua.

- Penulis : Muhammad Farid/EcoNusa
Editor : Antoni Ungirwalu



Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan
Selamat Merayakan
HUT PEKABARAN INJIL ke - 166 Tahun
Mansinam, 5 Februari 1855 / 5 Februari 2021



Bupati Manokwari, Hermus Indou, S.IP, M.H saat melakukan penanaman kembali kelapa sawit di Kampung Mimboi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

Asisten Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Melkias Werinussa, SE, MH mewakili Gubernur Papua Barat melakukan penanaman kembali kelapa sawit di Kampung Mimboi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

Peremajaan Sawit Harus Libatkan Masyarakat

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan peremajaan (*Replanting*) Kelapa Sawit Rakyat, agar melibatkan masyarakat yang berada di sekitarnya.

“Mulai dari pembibitan, penebangan-*chipping* dan penanaman harus melibatkan masyarakat,” kata Gubernur Papua Barat melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, SE, MH. Arahan tersebut disampaikan pada acara penanaman perdana kelapa sawit rakyat di Kampung Membowi Distrik Masni pada Senin, 29 Maret 2021.

Gubernur juga mengingatkan tentang

persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi. Syarat peremajaan harus *clean and clear*, serta bermitra dengan BUMN dan perusahaan swasta. Untuk pembiayaan penanaman kembali disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS).

“Harus memperhatikan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah disetujui,” tandas Gubernur lagi.

Dikatakan pula bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mereview perijinan konsesi kelapa sawit, yang hasilnya telah diumumkan

kan dan rekomendasinya segera dilaksanakan.

Gubernur juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan program-program strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan pada sub sektor perkebunan. Setiap tahun disediakan anggaran untuk membantu petani dalam proses budidaya mulai dari hulu sampai hilir.

Dalam proses hilirisasi, pemerintah Papua Barat juga secara bertahap membangun industri pengolahan produk-produk pertanian menjadi produk-produk turunan yang memiliki nilai ekonomis. Pemerintah Papua Barat juga akan melakukan kajian untuk membangun industri berskala kecil yang berguna untuk mengolah minyak sawit menjadi minyak goreng yang dapat dikonsumsi dan dipasarkan di wilayah Papua Barat dan sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penanganan hasil produksi dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Hal lainnya yang ditegaskan Gubernur adalah Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi atau Provinsi Berkelanjutan telah menerapkan model pembangunan yang mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini lebih menekankan pada perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta memastikan terjaminnya kelangsungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat adat.

Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, S.IP, MH dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari akan tetap konsisten mendukung penuh upaya peremajaan sawit rakyat. Dalam kaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga akan membentuk satuan tugas yang diharapkan dapat membantu memberikan pendampingan kepada para petani sawit. “Kalau kita tidak serius mengurus peremajaan ini, maka kita akan mengalami masalah yang serius, terutama masalah kesejahteraan. Jadi ini harus diseriusi, supaya rakyat

“Saya bersama-sama dengan rakyat sudah menyiapkan lahan untuk mendirikan Pabrik. Jadi Bapak-Bapak (Pejabat dari Jakarta) jangan bosan-bosan untuk menerima kami. Kami orang Papua kalau ke sana, lalu tidak cepat dilayani, barangkali suara akan keras sedikit (supaya prosesnya bisa cepat),” tegas Hermus Indou.

Sedangkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Gulat Manurung dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak Koperasi Produsen Sawit Arfa Sejahtera yang telah berupaya keras mempersiapkan terlaksananya kegiatan penanaman perdana kelapa sawit rakyat program PSR di Kampung Membowi Distrik Masni. Dirinya



Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Dr. Yacob S. Fonataba, SP, M.Si saat melakukan penanaman kembali kelapa sawit di Kampung Mimboi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

berharap, upaya kerja keras ini kiranya dapat memberikan kesejahteraan bagi petani sawit Manokwari di masa mendatang.

Sebelum dilakukan penanaman bersama, digelar juga Temu Wicara yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Drs. K.H Imam Aziz, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Manokwari, Hermus Indou dan Sekjen Apkasindo, Rino Afrino.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

UTAYOH dan Kebangkitan Perempuan di Kota Pala



Penandatanganan berita acara pelantikan Bupati Fakfak.

Gubernur memimpin pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong Selatan (kiri).
DOK. REINDRA HALLATU

Kelompok pertama yang seharusnya diberi selamat atas keputusan pencalonan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom pada perhelatan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak 2020 adalah kelompok perempuan asli Papua dari semua kalangan, baik kalangan mama-mama Papua maupun perempuan milenial Fakfak.

Pasangan UTAYOH, demikian inisial Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih untuk periode 2020-2025 yang digunakan saat berkampanye. Keduanya maju melalui jalur perseorangan atau independen setelah tidak ada satupun dari 11 Partai Politik yang berminat mengusung UTAYOH pada akhir tahun lalu.

Sekarang UTAYOH akan fokus mewujudkan visinya membawa Fakfak yang terdepan, termaju dan sejahtera di Provinsi Papua Barat serta misinya yang akan memperkuat ekonomi pada basis rakyat, memperkuat akses Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur. Pada tahapan mewujudkan visi dan misinya untuk 5 tahun kedepan, maka pertarungan tahun lalu belum selesai.

UTAYOH memasuki babak kedua menghadapi 11 Partai Politik di parlemen. UTAYOH tentu tidak sendirian menghadapi lawan-lawan di parlemen yang akan saling menecak, menyandra program dan membuat mimpinya tidak terwujud.

Kekuatiran ini menjadi tantangan UTAYOH Ketika memperjuangkan dan memastikan harapan rakyat Fakfak untuk menjadi yang terdepan, termaju dan sejahtera dibawah nakhoda baru Fakfak dari kalangan muda. Pada aspek lain, kekuatiran juga bahwa UTAYOH dalam perjalanan 5 tahun kedepan kemungkinan melupakan semua janjinya kepada masyarakat Fakfak, dapat dipastikan yang akan merasakan sakit terkianati adalah kelompok perempuan.

Kelompok perempuan Fakfak merupakan ujung tombak pemenangan UTAYOH, sejak 120 tahun kehadiran Fakfak sebagai wilayah administrasi pemerintahan, barulah seorang perempuan asli Fakfak; terpilih sebagai Wakil Bupati. Kemenangan UTAYOH dapat dipandang sebagai kebangkitan perempuan kota pala ini dapat juga dikatakan sebagai kebangkitan ekonomi

keluarga karena perempuan pada masa kini sangat dekat dengan ekonomi keluarga. Jika berkunjung ke Fakfak, mampirilah ke pusat kuliner Fakfak sepanjang pantai mulai dari pelabuhan kapal di kota tua Fakfak. Para perempuan, mama-mama; muda dan tua menawarkan beraneka makanan untuk makan malam. Nasi bamboo, singkong rebus, ikan bubara goreng semua sajian makan malam dapat ditemukan.

Salah satu Program UTAYOH adalah menguatkan ekonomi pada basis rakyat, akses pemodal, pendampingan pengelolaan finansial dan menciptakan berbagai ekonomi alternatif untuk memperkuat ekonomi keluarga pada basis-basis rakyat terutama di kampung-kampung. UTAYOH diperhadapkan untuk demonstrasi setiap janji kampanyenya sekaligus perjuangannya di ruangan parlemen agar seluruh partai di DPRD Fakfak bersama UTAYOH membawa rakyat Fakfak menuju Fakfak yang terdepan, termaju dan sejahtera. Selamat berkarya.

● Penulis : Alberth Nebore
Editor : Alberth Yomo



Penghargaan Gubernur Papua Barat yang diserahkan oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si kepada Herman Baru sebagai Tokoh Inovasi Tahun 2020
DOK. BALITBANGDA PB

pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di kota Sorong dibidang pengolahan perikanan tangkap khususnya pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Usaha ini mempunyai prospek yang sangat menjanjikan mengingat Kota Sorong merupakan daerah sentra perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat dengan jumlah produksi tangkapan sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 menyebutkan nilai produksi perikanan laut di Kota Sorong sebesar 619.267.680 kg dan Kabupaten Sorong sebesar 223.079.500 kg. Selain itu hasil laut terutama ikan merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Kota Sorong yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2022.

Pengolahan ikan oleh masyarakat menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi bertujuan untuk menambah nilai produk, memperpanjang masa simpan dengan tujuan menciptakan keanekaragaman produk olahan turunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ikan. Hasil turunan seperti ikan asar atau ikan panggang dan ikan kering atau ikan asin sudah banyak diproduksi dan dijual di dalam dan di luar Kota Sorong tetapi proses ini masih terdapat banyak kekurangan terutama dari segi kualitas dan keamanan produk. Hal ini disebabkan oleh proses pengolahan yang dilakukan secara tradisional oleh pelaku usaha atau masyarakat. Secara tradisional, masyarakat melakukan pemanggangan/pengasapan ikan khususnya ikan tuna (*Thunnus spp.*) secara langsung di atas bara dan asap api. Pengolahan dengan cara ini akan mempengaruhi kualitas dari penampakan, kebersihan, aroma dan juga rasa serta dapat berpengaruh terhadap keamanan pangan dari produk ikan yang dihasilkan.

Kendala tersebut merupakan suatu permasalahan yang telah mempunyai solu-

Herman Baru Inventor Prototip Oven Roma 828 Naisorei

Inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan dan ataupun perakayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam produk maupun proses produksinya. Tujuan lain dari inovasi adalah menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik sehingga mempermudah pekerjaan manusia dalam mengembangkan usaha atau bisnis mereka.

Herman Baru merupakan putra asli suku Maybrat yang lahir di Kampung Rufases Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura, Jayapura tahun 1986. Pernah Bekerja menjadi Asisten Lapangan pada PT. Cokran Ransiki tahun 1988, PT. Freeport Indonesia di Tembagapura sebagai staff Warehouse tahun 1991 - 1992, PT. Freeport Indonesia di Tembagapura sebagai Kontraktor Binaan pada Inkubator Bisnis tahun 1994 – 2012 dan Wirausaha di Kota Sorong tahun 2013 sampai sekarang.

Herman Baru merupakan salah satu sosok



Ikan hasil proses pemanggangan yang telah siap untuk dikemas (*packaging*).
DOK. BALITBANGDA PB

si melalui tindakan inovatif bapak Herman Baru sebagai penemu atas karyanya berupa inovasi "Oven Roma 828 Naisorei". Herman Baru sama seperti masyarakat biasa pada umumnya tetapi dengan semangat juang yang tinggi serta curahan waktu, pikiran dan tenaga yang besar melalui ide, gagasan dan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kolaborasi antara penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi, ia berhasil menciptakan *Prototype* alat semi mekanis yang berguna bagi sesama umat manusia terutama bagi pengusaha di bidang perikanan tangkap.

"Oven ini awalnya merupakan rumah pengasapan ikan dengan para-para pengering terbuat dari bambu tetapi prosedur dan peralatannya sangat sederhana juga kurang efektif karena prosesnya sangat rumit. Hal ini membuat hingga para-para asar sempat terbakar habis, tetapi kejadian tersebut tidak lantas membuat saya putus asa. Justru saya semakin tertantang untuk terus menerus berjuang menggunakan ide, akal dan imajinasi saya siang dan malam untuk menyempurnakan rumah pengasapan ini. Saya sudah mengutak-atik hampir sebanyak tujuh kali percobaan, sampai akhirnya perjuangan panjang dari tahun 2013 terbayarkan dengan penemuan *oven stainless steel* pada tanggal 7 Februari 2017, yang telah menghabiskan uang sekitar Rp.

7.000.000,- untuk satu unit alat ini di bengkel pembuatan alat" ungkap Herman Baru.

Rancang bangun *prototype* Oven Roma 828 Naisorei mengalami beberapa kali modifikasi terhadap rangka utama dan jenis bahan pendukung mulai dari penggunaan besi, aluminium, baja ringan dan terakhir keseluruhan alat menggunakan bahan dari *stainless steel*. Konstruksi alat tersebut terdiri dari rangka utama dan *body* dengan ukuran p x l x t : 200 x 40 x 150 cm dan luas penampang pengering ukuran 90 x 32 cm, menggunakan bahan bakar biomasa serta memiliki kapasitas proses 40 kg/2 jam atau dalam sehari mampu mengolah 240 kg ikan mentah menjadi ikan asar atau panggang.

Secara umum tahapan pengolahan ikan terdiri dari empat tahap yaitu penyiapan bahan baku, pemanggangan/pengeringan, pendinginan dan pengemasan. Produk ini memiliki keunggulan karena terdapat perlakuan khusus pada tahap penyiapan bahan baku dan tahap pemanggangan/pengeringan selain pada konstruksi alat yang didesain tertutup sehingga ikan tidak bersentuhan langsung dengan asap maupun api dan bara api tetapi proses pematangan ikan melalui penghantaran panas secara konduksi pada *stainless steel* dan radiasi panas yang terperangkap dalam oven untuk mempercepat proses pematangan ikan.

Pada tahap penyiapan bahan baku, ikan dibersihkan dari insang dan kotoran di perut, kemudian daging ikan dibalut dengan bumbu yang telah disiapkan secara khusus



Rancangan alat Oven Roma 828 Naisorei
DOK. BALITBANGDA PB



Peletakan bagian belahan ikan tuna ke penampang pengering menggunakan alas aluminium foil. DOK. BALITBANGDA PB

lalu dibungkus dengan daun pisang. Tahap pemanggangan atau pengeringan terdiri dari dua perlakuan, pertama: ikan yang sudah dibungkus dengan daun pisang diletakkan pada penampang pengering dengan waktu kurang lebih 40 – 50 menit bertujuan untuk mengeluarkan air dari daging ikan. Kedua, ikan diangkat dan daun pisang dilepas kemudian aluminium foil diletakkan di atas penampang pengering. Selanjutnya daging ikan diletakkan kembali di atas penampang pengering yang sudah dialas aluminium foil tersebut selama 50 - 70 menit sambil pembalikan ikan dilakukan setiap 10 menit sebelum diangkat untuk tahap pendinginan dan pengemasan.



Ikan panggang Fa Holo Wabur
DOK. BALITBANGDA PB

Produk olahan ikan yang dihasilkan dalam bentuk tuna panggang dan tuna roti dengan berbagai macam varian tergantung ukuran dan bentuk ikan. Dari segi kualitas dan rasa, produk ini sangat baik bahkan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Produk ini menghasilkan rasa tuna roti panggang yang khas dengan aroma yang kental, tekstur kompak dan lembut, permukaan bersih dan warna daging putih. Kemudian pengemasannya pun sangat baik dan rapi menggunakan *hand sealer* dan *vacum sealer* pada kemasan yang telah diberi label produk. Pengolahan tersebut juga secara langsung berdampak pada peningkatan nilai tambah dan daya saing dari produk ikan kering. Harga ikan mentah sebesar Rp. 21.000,-/kg dan harganya setelah diolah menjadi Rp. 40.000 – 45.000,-/potong. Harganya relatif tergantung bentuk dan ukuran.

Ir. Simson Masinggi, Ph.D merupakan salah satu pejabat Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia pada Tahun 2017 melakukan kunjungan ke Kota Sorong dan melihat Oven Roma 828 Naisorei dan produk ikan tuna belahan dan tuna roti. Ir. Simson Masinggi, Ph.D mengatakan "Selama ini produk ikan cakalang di daerah lain cukup terkenal secara nasional hingga mancanegara sekarang mereka akan kalah dengan kalian karena ikan mereka bersinggungan langsung dengan api, arang dan asap yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia misalnya kanker tetapi punya kalian bermutu tinggi karena ikan matang hanya dengan penghantar panas".

Dari semangat dan perjuangan yang dilakukan dalam menghasilkan inovasi dan menjalankan usahanya mulai tahun 2013 hing-

ga tahun 2017. Pada tahun 2020 Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan memberikan Penghargaan Papua Barat *Innovation Awards* dan uang pembinaan kepada Bapak Herman Baru pada kegiatan Malam Penganugerahan Inovasi Anak Negeri Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Desember 2020 di Manokwari. Dalam sambutan, Gubernur mengatakan pemberian penghargaan kepada Bapak Herman Baru bertujuan memberikan apresiasi kepada OAP yang telah berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan juga sebagai motivasi kepada masyarakat lainnya agar bisa berkreasi dan berinovasi bagi kemajuan dan daya saing daerah.

Selain itu, pendaftaran kekayaan industri Oven Roma 828 Naisorei telah dilakukan yaitu merek dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan terbit pada tahun 2019 dengan Nomor: IDM 000651009 tanggal 12 Agustus 2019 bernama *Papua Fa Holo Wabur Grilled Fish* yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Kota Sorong. Pendaftaran ini dilakukan agar mendapatkan Perlindungan Hukum secara eksklusif atas kekayaan intelektual dari Bapak Herman Baru. Rencana pengembangan juga dilakukan terhadap legalitas lainnya yang telah masuk dalam progres pelaksanaan dan akan direncanakan di tahun 2021 diantaranya yaitu, pengurusan Hak Paten; Sertifikat HCCP; Sertifikat BPOM; serta standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

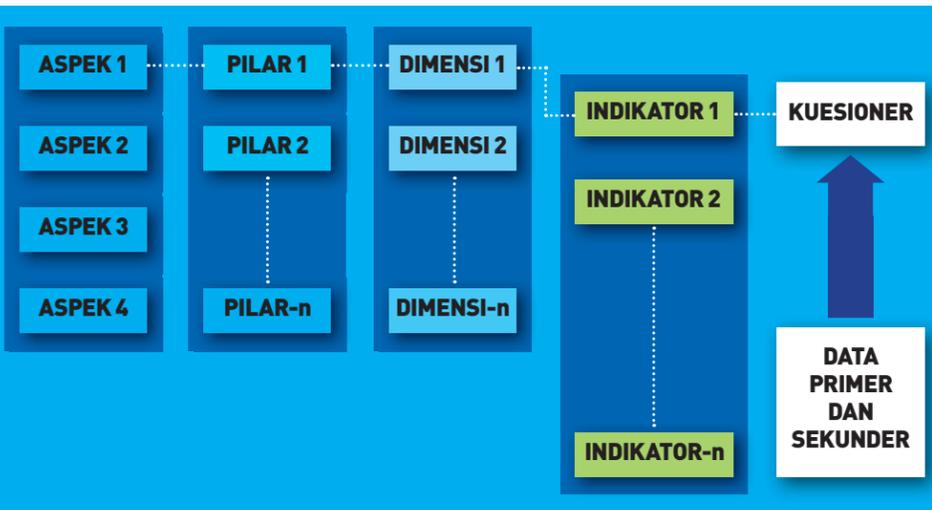
Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si mengatakan pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat serta Perlindungan Kekayaan Intelektual perlu dilakukan dalam rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Kami juga telah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat untuk memfasilitasi pendaftaran dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual masyarakat di Provinsi Papua Barat termasuk akan memfasilitasi pendaftaran Hak Paten Oven Roma 828 Naisorei milik Bapak Herman Baru di pada Tahun 2021, ungkap Prof. Heatubun.

Selain telah menjadi karya inovasi dalam proses pengolahan ikan, usaha ini juga telah menyerap tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi dalam menekan laju kemiskinan dan jumlah tingkat pengangguran terbuka. Data BPS Tahun 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sangat tinggi yaitu sebesar 22,17 persen dari rata-rata nasional sebesar 9,22 persen. Angka tersebut menempatkan Papua Barat sebagai provinsi termiskin kedua di Indonesia setelah Papua. Untuk tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi sebesar 6,24 persen diatas rata-rata nasional sebesar 5,28 persen.

Herman mengatakan usaha yang dia jalani masih sebatas *home industry* dan telah menyerap empat orang tenaga kerja yang berasal dari kalangan keluarga dekat. Saat ini, alat Oven Roma 828 Naisorei telah diproduksi sebanyak tiga unit, maka diperkirakan jumlah tenaga kerja yang sudah terserap sebanyak 12 orang. Lebih lanjut pria berusia 61 tahun ini mengatakan alat ini adalah titipan Tuhan kepada rakyat Papua melalui saya, maka saya berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua dapat melihat alat ini untuk diaplikasikan ke masyarakat selaku usaha perikanan tangkap dalam rangka membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dan harapannya ikan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama harus bisa diekspor ke luar negeri.

● Penulis : Viktor Kambu/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020



Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan Program Nasional dalam mendukung Visi, Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (Kemenristek/BRIN RI) melalui Direktorat Sistem Inovasi dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pembentukan ekosistem ino-

Bagan Alur Susunan Aspek, Pilar, Dimensi dan Indikator IDSD.
DOK. KEMERINSTEK/BRIN

vasi untuk mengelola produk unggulan daerah, mempercepat pembangunan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah.

Pelaksanaan pengukuran IDSD bertujuan untuk memetakan tingkat daya saing daerah baik level Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mendorong kemandi-

rian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0. Hasil pengukuran kegiatan ini sebagai dasar (*baseline*) pemerintah daerah dalam melakukan perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan terhadap aspek, pilar dan dimensi serta indikator pembangunan di daerah.

Pengukuran IDSD meliputi 4 (empat) aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator dengan tahapan kegiatan meliputi sosialisasi, pengumpulan data, penginputan data, verifikasi data, penghitungan nilai, pemetaan dan pengumuman nilai IDSD yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni – 30 November 2020.

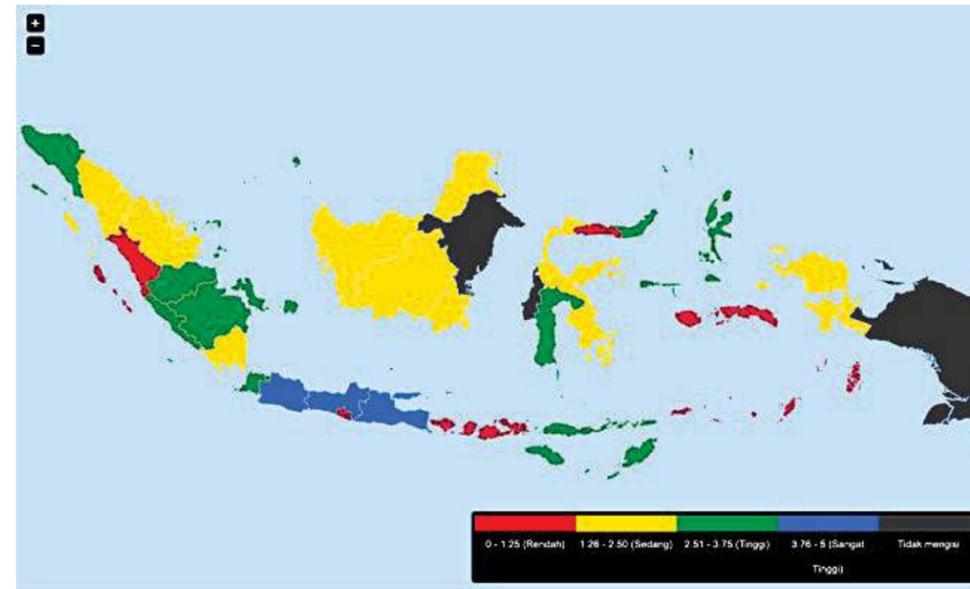
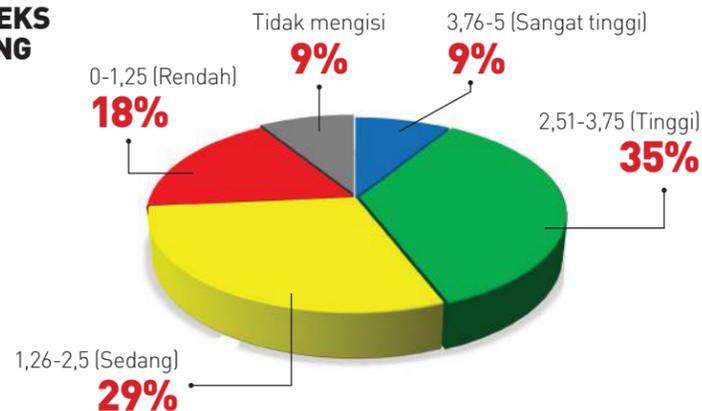
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019 yang diikuti oleh 199 provinsi/kabupaten/kota terdiri dari 25 provinsi, 136 kabupaten dan 38 kota dan pada tahun 2020 diikuti 301 pemerintah daerah terdiri dari 31 provinsi, 216 kabupaten dan 54 kota. Provinsi Papua Barat untuk pertama kalinya melaksanakan pengukuran IDSD pada tahun 2020 bersama lima kabupaten lainnya yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Kaimana dari 13 kabupaten/kota se-Propinsi Papua Barat yang mengikuti sosialisasi dan koordinasi awal pelaksanaan IDSD tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri RI dan Kemenristek/BRIN RI melalui video *conference* pada hari Rabu, 1 Juli 2020.

Pengumpulan data terhadap data primer dan data sekunder dilaksanakan dengan me-

Diagram jumlah provinsi berdasarkan kategori daerah dengan tingkat daya saing rendah hingga sangat tinggi serta yang tidak mengisi/mengikuti.

DOK. KEMERINSTEK/BRIN

DATA INDEKS DAYA SAING DAERAH WILAYAH PROVINSI PERIODE 2020



nyebarkan kuesioner ke responden sumber data yang meliputi kementerian/ lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, instansi vertikal, lembaga perguruan tinggi, lembaga keuangan bank dan non bank termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Papua dan Papua Barat kemudian diinput secara mandiri atau *online* melalui laman: <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/> yang disediakan oleh Kemenristek/BRIN RI.

Hasil pemetaan IDSD ditampilkan melalui skor nilai dari 0 – 5 dengan kategori nilai rendah untuk daerah dengan tingkat daya saing rendah hingga nilai sangat tinggi untuk daerah dengan tingkat daya saing sangat tinggi. Dari hasil penilaian dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Kemenristek/BRIN RI terhadap 31 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak tiga provinsi masuk kategori daerah dengan tingkat daya saing sangat tinggi, 12 provinsi dengan tingkat daya saing tinggi, 10 provinsi dengan tingkat daya saing sedang dan enam Provinsi dengan tingkat daya saing rendah serta tiga provinsi tidak mengikuti program ini yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat

Peta kabupaten/kota berdasarkan kategori daerah dengan tingkat daya saing rendah hingga sangat tinggi serta yang tidak mengisi/mengikuti.

DOK. KEMERINSTEK/BRIN

Peta provinsi berdasarkan kategori daerah dengan tingkat daya saing rendah hingga sangat tinggi serta daerah yang tidak mengisi/mengikuti.
DOK. KEMERINSTEK/BRIN

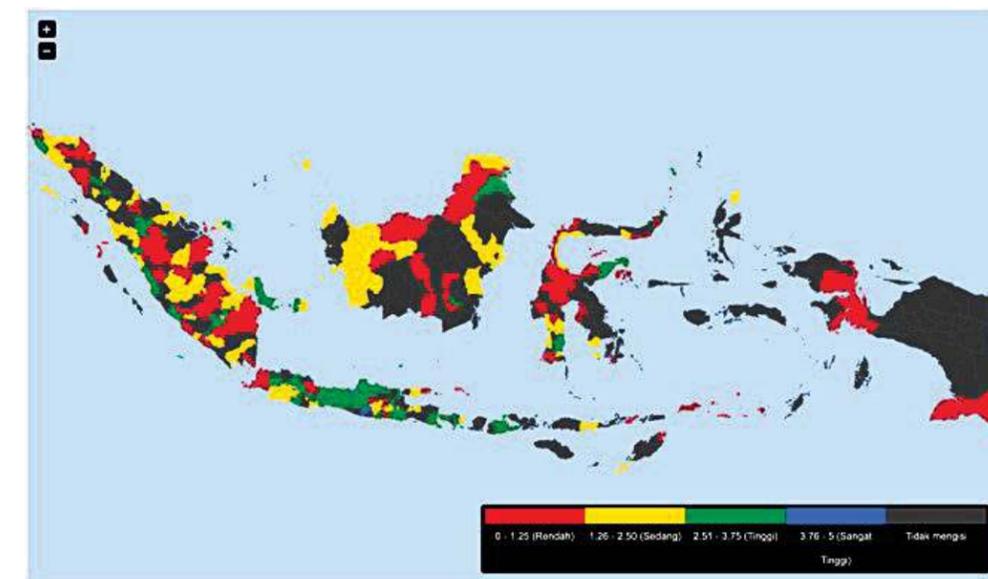
19 dengan nilai sebesar 2,23986.

Dari 12 kabupaten dan satu kota, lima diantaranya dapat mengikuti penilaian IDSD tahun 2020, sedangkan delapan kabupaten lainnya tidak mengikutinya karena terkendala dalam kelengkapan data dan informasi. Dari lima kabupaten yang mengikuti penilaian ini diperoleh hasil sebagai berikut, Manokwari sebesar 1,1013, Manokwari Selatan sebesar 1,13831, Teluk Bintuni sebesar 0,158923, Teluk Wondama sebesar 0,281994 dan Kabupaten Kaimana sebesar 0,839038.

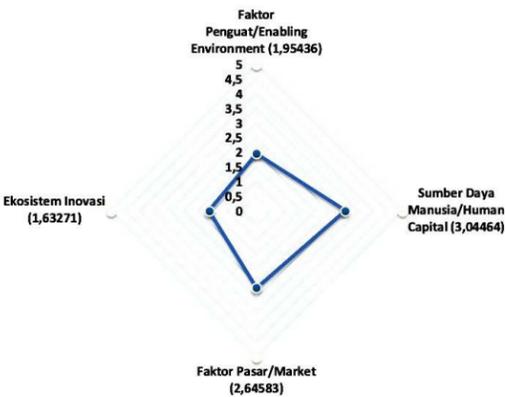
dan Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, Papua Barat berada pada kategori daerah dengan tingkat daya saing sedang dengan nilai IDSD sebesar 2,31939. Nilai tersebut menempatkan provinsi ini masuk dalam 20 besar dari 31 Provinsi yang mengikuti pengukuran IDSD tepatnya di urutan ke 18 berada satu tingkat di bawah Provinsi Sulawesi Tengah di urutan 17 dengan nilai IDSD sebesar 2,41372 dan di atas Provinsi Riau di urutan

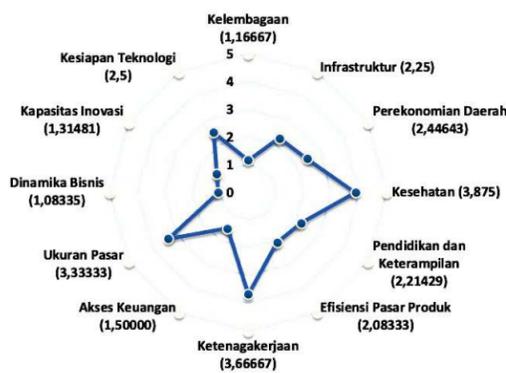
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengharapkan partisipasi dari semua kabupaten/kota untuk mengikuti program pengukuran dan pemetaan IDSD ini agar mengetahui tingkat daya saing daerah antar kabupaten/kota di provinsi dan nasional. "Saya berharap agar para bupati dan walikota menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera melaksanakan pengukuran IDSD ini agar dapat mengetahui tingkat daya saing masing-masing daerah, bagi lima kabupaten yang sudah melaksanakan kegiatan ini agar di tahun 2021 tetap di-



ASPEK DAYA SAING PAPUA BARAT PERIODE 2020



PILAR DAYA SAING PAPUA BARAT PERIODE 2020



lanjutkan dan bagi yang belum agar segera mempersiapkannya,” tutur Gubernur.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan intervensi terhadap program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap aspek pembangunan yang memiliki nilai rendah. Sesuai hasil pemetaan terlihat yang paling terendah adalah aspek ekosistem inovasi diikuti dengan aspek pasar/*market*, aspek penguat *enabling environment* dan aspek sumber daya manusia/*human capital*.

Parameter 12 pilar merupakan penjabaran dari keempat aspek pembangunan sehingga menjelaskan lebih detail bidang pri-

Diagram pilar indeks daya saing Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

DOK. KEMERINSTEK/BRIN

Diagram sebaran 97 indikator IDSD pada lembaga/OPD Tahun 2020 (bawah). DOK. KEMERINSTEK/BRIN

oritas yang perlu dilakukan evaluasi dan intervensi berdasarkan nilai terendah seperti pilar akses keuangan, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, kelembagaan dan seterusnya.

Gubernur Papua Barat berpesan agar hasil pengukuran IDSD Tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah terutama bagi OPD dalam mendorong sinergitas program dan kegiatan antar sektor terutama pada aspek, pilar dan dimensi pembangunan dengan nilai paling rendah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di tingkat nasional.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si mengatakan hasil pemetaan IDSD ini memberikan informasi yang lengkap dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan diagram jaringan laba-laba sehingga memudahkan kita mengetahui sektor-sektor yang masih ren-

dah nilainya. Indikator-indikator yang masih rendah tersebut, misalnya minimnya perusahaan pemula berbasis teknologi/*startup* di Provinsi Papua Barat yang merupakan salah satu indikator pada dimensi kewirausahaan, pilar dinamika bisnis, aspek ekosistem inovasi atau pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang belum maksimal. Hal ini disebabkan masih minimnya interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam membentuk kolaborasi *triple helix*, *quadruple helix* bahkan *quintuple helix*.

Lebih lanjut Prof. Heatubun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik instansi pemerintah, lembaga perguruan tinggi, swasta dan pihak lainnya yang telah bekerjasama dalam membantu pelaksanaan pengukuran IDSD Papua Barat. “Sebagai koordinator dan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ini secara kelembagaan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengukuran IDSD Papua Barat tahun ini, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 tetapi kita mampu menyelesaikan kegiatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, keberhasilan ini merupakan bukti kerja keras kita semua,” jelas Prof. Heatubun.

● Penulis : Viktor Kambu/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Rapat Pembahasan Pengumpulan Data IDSD Tahun 2020 di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Diseminasi Kekayaan Intelektual Desain Industri oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada 4 Agustus 2020 di Aston Niu Hotel, Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Di Papua Barat

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia dalam menghasilkan suatu karya ciptaan atau temuan yang terdiri dari hak cipta yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan hak kekayaan industri yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Pemegang HaKI baik perorangan maupun kelompok diberikan hak eksklusif dari negara sehingga dapat melarang siapapun yang tanpa persetujuan menggunakan atau menyalahgunakan hasil ciptaan atau temuannya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) bekerjasama deng-

an Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua Barat telah memfasilitasi pendaftaran HaKI yang diimplementasikan dalam bentuk nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21 Juli 2020 di Manokwari.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat di Provinsi Papua Barat agar dapat digunakan secara leluasa untuk mendapatkan keuntungan tanpa kuatir adanya pelanggaran HaKI. Pelanggaran terhadap penggunaan HaKI sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Pelaksanaan pendaftaran HaKI terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari sosialisasi, pendataan, verifikasi berkas dan pendaftaran. Sosialisasi dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada tanggal 4 Agustus 2020 di Aston Niu Hotel Manokwari dengan mengundang instansi terkait dan masyarakat pemilik kekayaan intelektual sekaligus dilakukan pendataan.

Pendaftaran HaKI difasilitasi oleh Balitbangda Papua Barat melalui aplikasi *web* yang telah disediakan oleh Kemenkumham Republik Indonesia setelah verifikasi berkas oleh petugas dari Balitbangda dan Kemenkumham Papua Barat.

Tahun ini, pendaftaran HaKI yang telah difasilitasi oleh Balitbangda sebanyak 21 kekayaan intelektual terdiri dari 11 merek, 6 (enam) hak cipta, 2 (dua) desain industri dan 2 (dua) Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Dari jumlah tersebut, delapan diantaranya sudah terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia dan telah memperoleh sertifikat HaKI yaitu (1) Buku Pengembangan dan Pengelolaan Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam Manokwari; (2) Buku Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat; (3) Buku Potensi Komoditas Unggulan Daerah Papua Barat; (4) Majalah Kasuari Inovasi; (5) Lagu Tangisan Rimba; (6) Lagu Dipanggil Papua; (7) Buah Hitam dan (8) Sagu Buah Hitam. Sedangkan 14 usulan HaKI lainnya masih dalam proses pendaftaran di Kemenkumham Republik Indonesia.

Pendaftaran dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Provinsi Papua Barat akan terus dilaksanakan dan dikembangkan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 dan juga sesuai Renstra Balitbangda Provinsi Papua Barat di Bidang

TABEL DAFTAR NAMA HAKI YANG TELAH DIDAFTARKAN

No.	Nama	Pemilik	Jenis	Keterangan
1	Buku Pengembangan dan Pengelolaan Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam Manokwari	BALITBANGDA PB	Hak Cipta	Terdaftar
2	Buku Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat	BALITBANGDA PB	Hak Cipta	Terdaftar
3	Buku Potensi Komoditas Unggulan	BALITBANGDA PB	Hak Cipta	Terdaftar
4	Majalah Kasuari Inovasi	BALITBANGDA PB	Hak Cipta	Terdaftar
5	Lagu Tangisan Rimba	Vocal Grup Haleluya 94	Hak Cipta	Terdaftar
6	Lagu Dipanggil Papua	Kristoni Monepa	Hak Cipta	Terdaftar
7	Buah Hitam	UNIPA	KIK	Terdaftar
8	Sagu Buah Hitam	UNIPA	KIK	Terdaftar
9	Logo ICBE	BALITBANGDA PB	Merek	Dalam Proses
10	Logo Majalah Kasuari Inovasi	BALITBANGDA PB	Merek	Dalam Proses
11	Logo Jurnal Igya Ser Hanjop	BALITBANGDA PB	Merek	Dalam Proses
12	Logo The Crown Jewel Of Tanah Papua	BALITBANGDA PB	Merek	Dalam Proses
13	Ferdy's Bakery	Dian Anggi	Merek	Dalam Proses
14	Papua Exotis	Meiji Akwan	Merek	Dalam Proses
15	Senja Papua Kuliner	Merry C.H Rumainum	Merek	Dalam Proses
16	IDEF	Paskalis Pigai	Merek	Dalam Proses
17	Kitong Pu Selai	Glen Mauri	Merek	Dalam Proses
18	Anggi Mart	Simon Tabuni	Merek	Dalam Proses
19	Papua Gardens	Frans Wabdaron	Merek	Dalam Proses
20	Design Baju Olahraga	BALITBANGDA PB	Desain Industri	Dalam Proses
21	Desain Baju Batik Papua Motif Teluk Doreri	BALITBANGDA PB	Desain Industri	Dalam Proses

Pembinaan Masyarakat Daerah sub bidang Inovasi dan Teknologi. Pengembangan ini dilakukan dengan membentuk kelembagaan HaKI dan menyiapkan fasilitas pendukung sehingga meningkatkan jumlah HaKI yang akan didaftarkan serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya regulasi daerah yang mengatur tentang HaKI Papua Barat.

Kekayaan Intelektual di Papua Barat masih banyak yang belum didaftarkan untuk dilindungi, menurut Kepala Balitbangda Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor rendahnya antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan kekayaan intelektual diantaranya pengetahuan tradisional seperti cerita rakyat, tarian adat, tumbuhan endemik, makanan tradisional hingga ciptaan seperti buku dan lagu atau kekayaan industri seperti invensi dari inventor yang te-

lah menjadi inovasi.

"Kami bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Papua Barat akan mendirikan Pos Pelayanan HaKI di Balitbangda dan akan dikembangkan menjadi Sentra atau Unit Pelayanan HaKI di Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sehingga akan lebih maksimal dalam melaksanakan pendaftaran dan perlindungan HaKI terutama KIK atau masyarakat adat dan juga kekayaan industri yang berpotensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat serta mendorong penetapan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua Barat tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua yang akan diusulkan pada tahun 2021," ucap Prof. Heatubun.

● Penulis : Viktor Kambu/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Penyerahan Sertifikat HaKI Majalah Kasuari Inovasi oleh Gubernur Papua Barat kepada Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-21 di halaman kantor Gubernur Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB





Pengelolaan Wisata Papua Barat Harus Berbasis Konservasi dan Orang Asli Papua

Staf Khusus Presiden (SKP), Billy Mambrasar bersama Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, melakukan audiens secara virtual dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Kamis (25/2/2021).

Pertemuan *online* ini membahas potensi pengembangan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam kurun waktu 3 bulan, guna mendorong program nasional dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu pengembangan titik-titik baru pariwisata ini dapat membangkitkan industri pariwisata di Papua Barat yang terpuruk se-

jak tahun 2020 karena pandemi covid-19. Dalam pertemuan itu, SKP Billy Mambrasar menyampaikan amanat Menteri menyusun rencana Aksi yang bisa segera dieksekusi sebelum akhir tahun.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong pariwisata di Papua Barat. Kata Prof. Charlie, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan merupakan arah kebijakan pembangunan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang telah tertuang dalam PERDASUS Nomor 10 tahun 2019 dan Deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi tahun 2015.

Sebagaimana ditulis dalam buku "Orang Asli Papua (OAP) Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua", bahwa Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis memiliki banyak kawasan konservasi. Beberapa kawasan konservasi ini telah dikembangkan sebagai kawasan pariwisata berbasis konservasi yang sangat tinggi keunggulannya dibanding dengan kawasan lain di Indonesia.

Beberapa kawasan wisata berbasis konservasi yang memiliki keunggulan komparatif tinggi sebagai kawasan pariwisata-

ta di Papua Barat adalah Raja Ampat, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, dan Cagar Alam Pegunungan Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat terdiri dari lima wilayah pengelolaan, yaitu Wilayah I Ayau Asia, Wilayah II Teluk Mayalibit, Wilayah III Selat Dampier, Wilayah IV Kofiau dan Wilayah V Misool serta satu Wilayah KKP Kawe dengan pengelolaan secara Kolaboratif.

KKP merupakan inisiatif pemerintah daerah Raja Ampat sejak tahun 2008 dan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia Nomor 36/Kepmen- KP/2014 ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Sebagaimana KKP Raja Ampat, Teluk Triton yang terletak di Kabupaten Kaimana merupakan KKP yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2014. Sasaran umum pengelolaan KKP Kaimana meliputi 4 (empat) wilayah pengelolaan, yai-

tu wilayah pengelolaan Buruway, Kaimana, Teluk Arguni serta Etna dan Yamor.

Selanjutnya KKP ini dicadangkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dengan SK Nomor 523/60/3/2018 untuk diajukan penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Selain wilayah pesisir dan laut, Provinsi Papua Barat juga memiliki kawasan konservasi yang luas di wilayah pegunungan, yakni wilayah Pegunungan Arfak. Dalam konteks pengelolaan, kawasan konservasi Pegunungan Arfak masuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam bentuk Cagar Alam dengan luas 158.414 ha. Sejak tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 820/KPTS/Um/11/1982 kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan luas 68.325 ha. Luas ini kemudian berubah menjadi 63.750 ha.

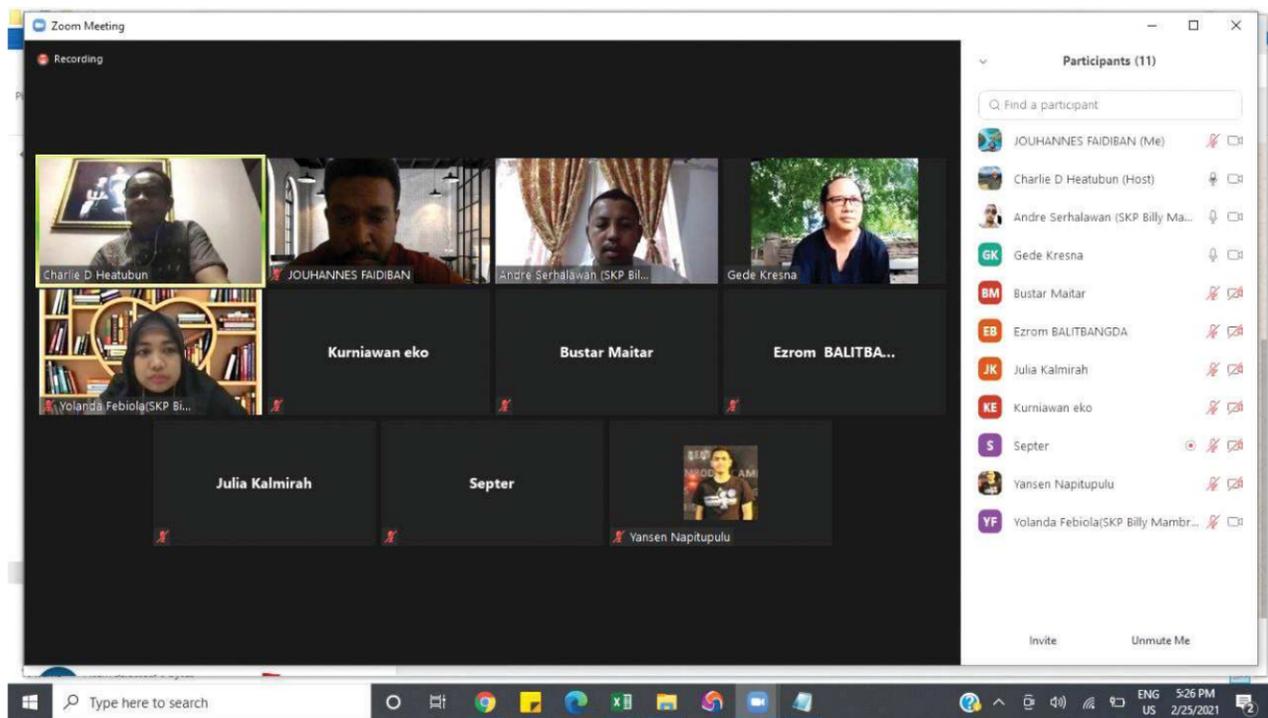
Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA) berada di ketinggian 15 m hingga lebih dari 1.000 mdpl dengan gunung Humeihbou sebagai puncak tertinggi. Meskipun sebagian besar kawasan ini berupa pegunungan, wilayah ini memiliki koridor ke daerah dataran

Pemandangan Puncak Kobrei Anggi Pegunungan Arfak dipagi hari. DOK. BALITBANGDA PB

rendah, sehingga membentuk unit ekologi yang lengkap. Sedikitnya 320 jenis burung, 350 jenis kupu-kupu dan 110 jenis mamalia, serta 2.770 anggrek ditemukan di wilayah ini.

Pada kawasan-kawasan konservasi ini telah berkembang usaha-usaha pariwisata alam dengan memanfaatkan keunikan objek dalam kawasan tersebut. Raja Ampat dan Kaimana berkembang kegiatan pariwisata bahari, yang memanfaatkan bentang laut dan perairan berterumbu karang, serta berbagai jenis biota kharismatik seperti hiu paus, pari manta dan berbagai jenis burung cendrawasih.

Kawasan pegunungan Arfak berkembang wisata alam pegunungan berupa *bird watching* (pengamatan burung), pengamatan kupu-kupu sayap burung, keindahan bentang alam sekitar danau Anggi Gida dan Anggi Giji, pengamatan flora dan fauna liar serta agrowisata kebun campuran.



Virtual meeting Pemerintah Papua Barat bersama SKP Billy Mambrasar membahas rencana pengembangan pariwisata Papua Barat. DOK.SKP BILLY MAMBRASAR

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pemerintah Daerah mulai mengembangkan pariwisata berbasis konservasi yang saat ini telah menjadi trend dalam kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan bahwa pariwisata berbasis konservasi merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, untuk pengembangannya di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekowisata.

Pengembangan pariwisata berbasis konservasi lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan jasa ekosistem disamping untuk perlindungan biodiversitas sumberdaya alam

atau manfaat langsung berupa hasil hutan bukan kayu (subsektor kehutanan) dan kegiatan perikanan tangkap (subsektor perikanan). Jasa ekosistem ini adalah manfaat/ nilai alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Jasa ini merupakan landasan sistem sumberdaya alam dan digunakan untuk menggambarkan interaksi manusia dan alam. Demikian, jasa ekosistem mendukung ekosistem alamiah sumberdaya, mata pencaharian dan kesejahteraan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Konsepsi ini menggambarkan interaksi yang berbeda dalam proses menghubungkan struktur dan proses biofisik lingkungan dengan manfaatnya bagi manusia. Hal ini menggambarkan ekosistem tidak hanya sebagai penyedia jasa ekosistem tetapi kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan.

Pariwisata berbasis konservasi merupakan kegiatan pemanfaatan jasa ekosistem/ lingkungan untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomi baik langsung, tidak lang-

sung maupun ikutan. Manfaat langsung dapat dirasakan oleh pengelola kawasan wisata atau objek dan stafnya. Manfaat tidak langsung dapat dirasakan oleh pengelola hotel/homestay/resort, dan manfaat ikutan dapat dirasakan oleh penyedia souvenir.

Pengembangan pariwisata berbasis konservasi di Raja Ampat, Teluk Triton, dan Pegunungan Arfak telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan OAP. Perubahan dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sebagai akibat konservasi sumberdaya alam dan habitat serta kegiatan pariwisata telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang negatif.

OAP yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Kaimana, Raja Ampat dan Pegunungan Arfak jumlahnya relatif sedikit namun menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak kesejahteraan atas pemanfaatan aset alam yang dijaga berdasarkan modal sosial yang dimiliki secara turun-temurun. Karena hidup



Pantai Ermun di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana. DOK. YANCE DE FRETES/CI

dalam kawasan konservasi maka "ruang gerak" menjadi terbatas sebab secara *de jure* ada aturan-aturan yang membatasi akses.

Namun mereka memiliki aset penghidupan berupa aset alam, aset fisik, aset sumberdaya manusia, aset sosial dan aset finansial yang bervariasi dalam jumlah dan kualitas, tetapi telah mampu mendorong roda perekonomian daerah ke arah pertumbuhan yang positif dan menciptakan perubahan sosial dalam kehidupan mereka. Hanya saja perubahan sosial dan nilai manfaat ekonomi yang dirasa baru berada pada tingkat fondasi dan belum terdistribusi secara merata bagi semua OAP.

Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola pariwisata berbasis konservasi yang afirmatif merupakan salah satu jalan menuju peningkatan manfaat ekowisata, terutama liveaboard dan resort di wilayah Raja Ampat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ba-

gaimana *stakeholders* pariwisata berkolaborasi meningkatkan akses pasar bagi pelaku wisata OAP di kawasan-kawasan wisata yang miskin pengunjung namun memiliki atraksi yang luar biasa.

Kapabilitas pengusaha wisata berbasis konservasi seperti pemilik homestay harus ditingkatkan untuk memberikan layanan kelas resort sehingga mencegah tumbuhnya wisata masal.

Dalam konteks akselerasi manfaat yang adil dan merata diantara OAP maka upaya membangun kaitan ekonomi antara ekowisata dengan sektor ekonomi lain, terutama pertanian perlu ditingkatkan agar komunitas lokal yang tidak terlibat langsung dalam ekowisata juga mendapat manfaat ekowisata.

Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan harus bisa memastikan bahwa usaha di sektor pariwisata memiliki prospek

dan memiliki *forward linkage* dan *backward linkage*. Jadi apabila kebijakan yang dihasilkan mematkan usaha pariwisata maka itu berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus berkolaborasi dalam perencanaan terintegrasi untuk mempersiapkan sektor lain dalam menciptakan dukungan (*linkage*) bagi bertumbuhnya pariwisata berbasis konservasi di Papua Barat.

Secara ekonomi, matinya usaha pariwisata berarti musnahnya efek pengganda (output dan input) dari kegiatan-kegiatan terkait. Jika tidak dipertimbangkan secara matang, maka permasalahan ekonomi ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial yang makin meluas, demikian juga dari aspek lingkungan akan mengancam keselamatan kawasan-kawasan konservasi.

● Penulis : Annes Faidiban/Asisten SKP Billy Mambrasar | Editor : Alberth Yomo

GALERI



Pimpinan Pejabat Tinggi (PPT) Teladan 2020. Pemenang pertama Profesor Charlie Heatubun, Pemenang kedua Diana Kusumawati dan Pemenang ketiga Herman Suryatman. DOK. BALITBANGDA PB



Monitoring kepala Badan diruang kerja kantor Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Rapat koordinasi awal tahun 2021 Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Profesor Heatubun bersama Tim Staf Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Prof. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si didampingi istri Oktarina Simanjuntak bersama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam ajang Anugerah ASN 2020. DOK. BALITBANGDA PB



Reorientasi dan Pembekalan CPNS dan P3K Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

GALERI



Gubernur Papua Barat meninjau lokasi pembukaan empat ruas jalan di Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak. DOK. HUMAS PAPUA BARAT



Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama staf dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan UNIPA. DOK. BALITBANGDA PB



Tarian peyambutan Tumbu Tanah oleh masyarakat Distrik Testega. DOK. HUMAS PAPUA BARAT



Penyerahan buku hasil penelitian oleh Kepala Balitbangda Papua Barat kepada Dekan Fahutan UNIPA. DOK. BALITBANGDA PB



Tanam perdana dalam rangka ketahanan pangan keluarga oleh Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kepala Kajati Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, dan Bupati Kabupaten Manokwari di Kampung Warami Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan bantuan bahan pokok oleh Pangdam XVIII/Kasuari kepada masyarakat Kampung Warami, Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB



Gubernur Papua Barat, Forkopimda Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari bersama masyarakat serta siswa-siswi sekolah dasar di Kampung Warami, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB



Sambutan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dalam kunjungan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P dalam Acara Komunikasi Sosial dan Video Conference bersama para Tokoh Agama Papua dan Papua Barat di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan cenderamata oleh Panglima TNI kepada Gubernur Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Barat, Ibu Yuliana Mandacan kepada Panglima TNI. DOK. BALITBANGDA PB

Kwowok, Sagu dan Hubungannya dengan Alam

Pagi itu, Jumat (21/11/2020), mama Nelce Srekeflat dan suaminya Simson Sagisolo ditemani anak bungsunya yang berusia sekitar 10 tahun menyusuri jalan raya dari Kampung Kwowok menuju pertigaan Kampung Sira dan Manggroholo. Mereka berjalan kaki sejauh tiga kilometer di atas jalan yang sebagian terbuat dari timbunan karang dan sisanya dari rabat beton. Bersama seorang Pemuda kampung bernama Agus Wagarefe, kami mengikuti perjalanan keluarga ini selama 30 menit menuju pertigaan Sira Manggroholo.

Sebelumnya saya berada di Kampung Kwowok Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan untuk mencari jaringan internet, dan akan kembali ke tempat tinggal saya di Kampung Sira yang tidak ada jaringan internetnya. Sedangkan bapak Simson Sagisolo dan istrinya, berjalan ke pertigaan Sira dan Manggroholo mencari mobil angkutan umum untuk mengangkut sagu dari kampungnya ke Pasar Ampera Teminabuan.

“Sopir-sopir dong tidak mau masuk ke Kampung Kwowok, karena jalan masih rusak, kecuali kalau orang *pake (carter)*,” kata Simson Sagisolo.

Hal itu yang menyebabkan Simson dan istrinya berjalan kaki ke pertigaan Sira dan Manggroholo, agar mendapatkan taxi untuk mengangkut tiga sak sagu miliknya dan menjualnya di Pasar Ampera Teminabuan. Ternyata itupun tidak mudah, karena lebih dari satu jam kami menemani Bapak Sagisolo dan istrinya di pertigaan itu, namun taxi atau mobil yang akan ditumpang tak kunjung datang.

Kalaupun ada mobil yang lewat, itu sudah dipakai oleh orang dari kampung lain. “Biasanya mobil lancar tapi sepertinya hari



ini ada kampanye bupati, jadi orang pakai mobil,” jelas Simson lagi setelah berkomunikasi dengan salah satu sopir yang mobilnya sedang dipakai oleh orang lain.

Namun beruntung bagi Simson dan istrinya, setelah menunggu hampir dua jam ada sebuah mobil avanza yang masuk membawa penumpang ke Kampung Sira, sehingga mobil itu yang ditumpang untuk mengangkut sagu mereka ke Teminabuan.

Penasaran untuk melihat tempat mereka menjual sagunya di Teminabuan, saya memutuskan ikut bersama mereka dengan mobil itu. Kami pakai mobil itu kembali ke Kwowok, mengangkut tiga karung sagu, lalu keluar Kampung Kwowok menuju Teminabuan. Biaya taxinya Rp 30 ribu dari Kampung Sira ke Pasar Ampera Teminabuan. Kalau masuk ke Kampung Kwowok tambah Rp 10 ribu, jadi ongkos per orangnya Rp 40 ribu untuk sampai di Teminabuan.

Kurang lebih satu jam perjalanan, kami tiba di Pasar Ampera. Bapa Simson dan anaknya pergi ke tempat lain, sedangkan mama Nelce memindahkan tiga karung sagunya di depan sebuah toko yang bersebe-

rangan dengan Kantor Pos.

Mama jual sagu di sini? “Iya, mama dong dari kampung itu biasa jual sagu di sini,” ucap mama Nelce. Nampaknya jalan yang berada depan Kantor Pos Teminabuan hingga terhubung ke Pasar Ampera ini adalah tempat jualannya mama-mama dari Distrik Saifi, Seremuk, Salkma dan Sawiat. Ada yang jualan sayur, ubi-ubian, pisang bahkan daun gatal. “Kalau di sini, tempat untuk jual sagu,” jelas mama Nelce menunjuk tempatnya berjualan sagu yang berada di depan sebuah Toko.

Tanpa atap pelindung, tentu tak nyaman bagi mama Nelce dan seorang ibu dari kampung lain yang menjajakan sagunya. Saat sengatan matahari membakar kulitnya, kedua ibu ini kemudian berlindung di grup mama-mama yang berjualan sayuran. Karena tempat jualannya memiliki atap, sehingga aman dari sengatan terik matahari.

Tak seperti jualan gorengan, para penjual sagu sepertinya harus panjang sabar menanti pembeli. Setelah empat jam mama Nelce berdiri, duduk dan kadang berpindah-pindah tempat, akhirnya ada seorang pembeli yang membeli satu karung sagu



seharga Rp 200 ribu. Sudah jam lima sore, satu karung sagu belum laku, apakah dibawah pulang atau dijual murah kepada para penadah sagu di Pasar Ampera? Mama Nelce memilih untuk membawa sagunya ke penadah sagu. Walaupun dijual murah Rp 100 ribu, itu pilihan yang biasanya diambil, karena tak ingin memikul sagu yang berat itu kembali ke kampung. Apalagi dengan kondisi jalan dan transportasi yang tidak menguntungkan.

Hasil jualan sagu itu sebagian dipakai untuk membeli gula, minyak goreng, garam dan beberapa kebutuhan pokok. Sedangkan sebagian lagi ditabung untuk membiayai sekolah anaknya yang berada di SMP dan SMA. “Bukan hanya itu, bapa dengan mama juga biasa simpan uang untuk bantu orang dalam pembayaran harta,” kata bapa Simson.

Karena itu, bagi bapa Simson dan mama Nelce, sagu tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga dijual untuk membantu keuangan keluarganya. Pendapatan lainnya yang biasanya ikut membantu keluarganya adalah dari honor sebagai aparat kampung yang diterimanya per triwulan atau tiga bulan sekali. “Sebenarnya ada sayur genemo, pisang, singkong, tapi itu tidak dapat untung. Mungkin sagu saja yang bisa dapat uang besar,” jelasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Kampung Kwowok, Lewi Sagisolo mengatakan, perjalanan yang dilalui mama Nelce untuk menjual sagu ke pasar Teminabuan merupakan gambaran umum yang dihadapi semua warga Kampung Kwowok. Namun tak hanya sagu, semua hasil kebun juga sama, tidak memberi keuntungan secara signifikan. Kesannya seperti barter hasil kebun dengan uang transport dan sembako. Jadi tidak ada untung di sini.

Aktivitas pengolahan sagu Mama Nelce dan keluarga didusun di Kampung Kwowok. DOK. ALBERTH YOMO

Meski demikian, lanjut Lewi, tradisi untuk menanam sagu, menokok dan mengolah sagu menjadi papeda harus selalu hidup dalam kebudayaan mereka. Sagu bagi mereka adalah kehidupan, tanpa sagu tak ada kehidupan. Itulah ajaran yang diturunkan para leluhurnya, dan ajaran itu akan diteruskan juga kepada anak-anak mereka.

“Biar anak-anak pergi sekolah ke luar, kami orang tua selalu ingatkan, jangan lupa sagu. Orang tebang sagu untuk jual atau makan papeda, jangan lupa untuk tanam lagi. Supaya sagu itu tetap ada, dan orang Papua juga bisa tetap hidup,” tandasnya.

Tokoh Masyarakat lainnya, Yance Kemesfle berharap pengetahuan lokal dapat diajarkan kepada anak-anak generasi sekarang. Bukan saja tentang cara tebang, tokok dan ramas sagu, namun banyak pengetahuan lokal lainnya yang harus mereka tahu, seperti cara tangkap ikan dan udang di sungai, cara menanam di kebun, dan sebagainya. “Kalau tidak diajarkan sekarang, selesai sudah, semuanya akan hilang,” ucap Yance.

Kepala Kampung Kwowok, Samuel Kolin menambahkan, nama Kwowok berasal dari nama sebuah pohon. Marga Kolin yang menetap di Kampung Kwowok juga percaya memiliki asal usul dari pohon Merbau. Jadi cerita ini terus berkembang pada setiap generasi, sehingga mereka tidak sembarang. Semua yang ada di alam ini punya hubungan dengan kita manusia yang hidup, jadi harus selalu ingatkan anak-anak generasi sekarang, biar mereka tahu.

Dengan demikian maka tak heran jika ekosistem hutan di wilayah Kwowok masih tetap terjaga dengan baik, karena kepercayaan bahwa alam memiliki hubungan pribadi dengan mereka masih ada sampai hari ini. Sagu telah menjadi salah satu tanaman penting yang wajib dibudidayakan pada lahan-lahan marga di Kampung Kwowok. Selain sebagai penanda kepemilikan dusun, tanaman sagu telah berkontribusi dalam menjaga ekosistem alam di Kampung Kwowok dan sekitarnya.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

Bambu Merambat “Upah” Sumber Pangan Alternatif Suku Maybrat

Isu pemanasan global terkait krisis sumberdaya alam (SDA) dan kelangkaan pangan menjadi topik yang semakin hangat dibahas dalam berbagai forum dan kajian di berbagai belahan dunia. Namun sedari awal kita sadari bahwa alam sejak dahulu telah menyediakan berbagai sumber kebutuhan manusia baik sandang, pangan dan papan. Selain pertambahan jumlah penduduk dunia yang semakin tinggi, pola pemanfaatan yang cenderung destruktif serta pengelolaan yang tidak ramah lingkungan dianggap sebagai faktor terbesar yang menyebabkan ketersediaan SDA tersebut semakin tergerus pada level kritis atau langka. Di Papua SDA yang masih melimpah termasuk hutan alam yang menyediakan sumber pangan bagi masyarakatnya, keberadaan sumberdaya lokal ini mendapat tantangan besar terkait dikotomi sistem domestikasi pangan yang hanya terfokus pada satu produk pangan utama saja terutama komoditi beras. Dampak terbesar dapat dirasakan saat ini dengan adanya perubahan kultur dan ketergantungan pada produk tersebut dan banyak melupakan jenis pangan lokal lainnya yang telah digunakan sejak dahulu kala. Masyarakat lokal di Papua sudah mengenal produk pangan lokal unggulan baik berupa sagu, umbi-umbian dan pisang sebagai pangan utamanya. Terdapat 650 jenis tumbuhan yang meliputi 134 famili dan 378 genus yang telah teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan manusia. Lebih dari 231 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makan dengan bagian-bagian yang dimanfaatkan adalah pucuk, daun, batang, buah, biji, bunga, umbi dan akar. Salah satunya adalah bambu dimana diperkirakan terdapat 1.250 jenis bambu yang sudah dikenal dan 11% merupakan jenis asli Indonesia.

Bambu adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah tropis dan sub tropis. Termasuk dalam divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordo Graminales family Poaceae, sub family Bambusoideae (Heyne, 1987). Di Indonesia terdapat kira-kira 10 genus yaitu Arundinaria, Bambusa, Dendrocalomus, Dinochloa, Gigantochloa, Melloncanna,



1 Perawakan bambu merambat (*Dinochloa* sp.). DOK. YONAS KOSOMAH

2 3 Pucuk bambu merambat (Upah). DOK. YONAS KOSOMAH

Nastus, Phyllostachys, Schizostachyum dan Thyrsostachys (Nur Berlin, 1995). Sebagian besar jenis dan bagian bambu dimanfaatkan manusia, baik sebagai sumber bahan pangan dan papan. Salah satu yang menarik dan belum banyak diketahui khalayak adalah jenis bambu pemanjat atau bambu merambat yang telah dijadikan sebagai sumber pangan alternatif oleh suku Maybrat di Papua Barat. Berdasarkan karakter dan keunikannya jenis bambu ini berbeda dengan bambu pada umumnya, karena jenis bam-



bu ini memiliki kekhususan dalam bentuk pertumbuhan dan pemanfaatannya.

Bambu sendiri memiliki banyak jenis berdasarkan klasifikasi dan morfologinya. Diantarnya jenis bambu merambat (*Dinochloa* sp.) bambu tali (*Gigantochloa hasskarliana*) dan bambu leumpang (*Schizostachyum brachycladum* Kurz.)

Untuk jenis bambu merambat sebagian besar habitatnya ditemukan pada ekologi dataran rendah. Jenis bambu ini memiliki ukuran paling kecil namun penyebaran dan pertumbuhannya relatif mudah dibandingkan dengan tumbuhan bambu lainnya. Bambu ini disebut “bambu merambat” dikarenakan bambu ini tumbuhnya yang merambat (tepat berada di atas permukaan tanah) dan ada beberapa yang merebah bahkan mengitar pada pohon lain. Hal ini disebabkan jenis bambu merambat tidak dapat menopang bebannya sendiri. Berdasarkan ciri fisik pertumbuhannya, jenis ini dapat digolongkan dalam genus *Dinochloa*.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat lokal khususnya etnis di Papua masih sangat bergantung pada alam sekitarnya. Masyarakat Kampung Ayawasi memanfaatkan lingkungan biosifik hutan

Proses mengolah rebung dengan cara membakar api dan debu.
DOK. YONAS KOSOMAH



untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, maupun perumahan sesuai dengan kebutuhan subsistennya. Di hutan ditemukan berbagai jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan salah satunya adalah jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sayur. Salah satunya adalah pengetahuan masyarakat etnis Maybrat di Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat, dalam memanfaatkan tumbuhan bambu dengan sebutan lokal Upah (Bahasa Aifat) yang memiliki karakter dan jenis yang berbeda secara umum dengan jenis bambu yang dimanfaatkan sebagai sayur oleh masyarakat kampung Ayawasi.

Morfologi pertumbuhan jenis bambu merambat yang dimanfaatkan etnis Maybrat memiliki tipe pertumbuhan monopodial dengan batang yang tidak berbuluh, tumbuh rapat tidak tegak tetapi merambat. Tinggi tajuk 3-9 m dari permukaan tanah, jumlah batang sekitar 50-90 batang. Jenis bambu ini dijumpai tumbuh di dataran tinggi seperti di atas tanah yang berbatu atau di gunung-gunung sedangkan pada dataran rendah biasanya tumbuh di pinggir sungai atau tanah yang berawa. Jenis bambu merambat biasanya dimanfaatkan oleh

Teknik memasak rebung muda menggunakan bambu nasi.
DOK. YONAS KOSOMAH

masyarakat Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara sebagai bahan makanan tradisional yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Rumpun bambu merambat memiliki percabangan sangat berbeda dengan jenis lainnya, karena cabang lateral biasanya dorman dan akan tumbuh bila cabang utama terpotong. Selain itu bambu ini juga mempunyai sisa pelepah yang sangat kasar dan melekat pada buku-bukunya. Akan tetapi sejak ditemukannya bambu ini, sampai saat ini jenisnya belum teridentifikasi. Bambunya merambat hingga pucuk pohon, rebungnya hijau dengan lilin putih, pada batang muda ditutupi bulu putih melekat yang tersebar tapi mudah gugur, batangnya yang muda ditutupi oleh lilin putih dan berbulu putih. Pelepah berbulu tersebar putih, melekat tapi mudah gugur dan ditutupi oleh lilin putih ketika masih muda, berkuping membulat besar, terkeluk balik, hingga 7 mm tingginya, dengan bulu kejur yang panjang seperti bulu mata yang lentik hingga panjangnya 12-15 mm, ligula bergerigi tingginya sampai 3 mm, dengan bulu kejur panjang hingga 8 mm, daun pelepah buluh terkeluk balik. Bambu ini secara sepintas hampir serupa dengan yang pernah ditemukan di Papua Nugini dan Papua oleh E.A. Widjaja pada tahun 1993, tetapi berbeda pada rebungnya yang ungu berlilin putih dengan pelepah buluh mempunyai kuping yang besar membulat berkeluk balik dan berbulu kejur yang panjang.

Pemanfaatan bambu oleh masyarakat Kampung Ayawasi masih bersifat tradisional. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan bambu hanya untuk kebutuhan subsisten dan bukan untuk tujuan komersial guna meningkatkan pendapatan atau nilai jual hasil pengelolaan bambu tersebut. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan bambu masyarakat mengambil bambu dan langsung memanfaatkannya tanpa suatu proses, seperti dalam proses pembuatan bambu sebagai bahan makanan. Secara umum pengambilan rebung jenis *Dinochloa* sp. di sekitar lingkungannya yang dilakukan oleh 1-3 orang. Jarak habitat je-



Lebih dari 231 jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, salah satunya adalah bambu dimana diperkirakan terdapat 1.250 jenis bambu yang sudah dikenal dan 11% merupakan jenis asli Indonesia.

nis bambu merambat dari pemukiman ± 5 km yang ditempuh dengan berjalan kaki. Pengambilan rebung bambu *Dinochloa* sp. dengan cara dipatah menggunakan alat pisau atau parang memotong pucuk muda sebanyak yang dibutuhkan lalu diisi dalam noken yang sudah disiapkan untuk selanjutnya dibawa pulang sebagai salah satu hasil panen untuk kebutuhan pangan lokalnya.

Selain itu inti dari konstruksi etno-teknokonservasi pemanfaatan bambu merambat sebagai bahan makanan tradisional etnis Maybrat terbagi dalam 4 tahapan proses yaitu: Pertama Proses awal dibakar pada bara api; Kedua, Proses pengisian rebung dalam bambu; Ketiga, Proses pengisian dalam abu; Keempat, Proses perebusan di belanga/dandang. Pemanfaatan bambu merambat sebagai sumber bahan pangan alternatif yaitu bagian pucuk atau tunas muda yang disebut rebung merupakan bentuk kearifan lokal yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Pada etnis Maybrat kearifan lokal ini perlu dilestarikan baik terhadap habitat maupun pengetahuan lokal dalam menjaga entitas keunikan Papua dengan sumberdaya alamnya untuk dipertahankan kemanfaatannya.

● Penulis : Antoni Ungirwalu/UNIPA
Editor : Ezrom Batorinding

Aktivitas etnis Maybrat dalam mengolah Upah sebagai bahan makanan.
DOK. YONAS KOSOMAH



Peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan. DOK. BALITBANGDA PB

Gubernur Dominggus Mandacan Kucurkan Rp 7 Miliar Guna Pembangunan Gedung Inovasi

“Konsisten Memberikan Dukungan Selama Menjadi Gubernur”

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan (DM) melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Inovasi Produk Kakao di Ransiki, pada Jumat 19 Februari 2021.

Pengembangan Kakao sebagai salah

satu komoditas lokal unggulan *non deforestasi* di Papua Barat adalah program prioritas dan kebijakan utama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan komoditas

ini telah menjadi perhatian dan telah disusun dalam grand desain investasi hijau Papua Barat dan peta jalan pengembangan komoditas unggulan *non deforestasi* yang baru saja diluncurkan bulan Januari 2021 lalu di Jakarta, hasil kerjasama Pemda Provinsi Papua Barat dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Dan untuk lebih



Karyawan koperasi Eiber Suth, Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan. DOK. BALITBANGDA PB

mengefektifkan upaya-upaya ini, Gubernur Papua Barat telah membentuk satuan tugas komoditi unggulan (termasuk untuk komoditi Kakao) yang beranggotakan para pihak dari sektor hulu sampai hilir melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat nomor 500/112/6/2020. Juga termasuk salah satu anggotanya adalah pihak program pertumbuhan ekonomi hijau.

Saat ini Koperasi Eiber Suth telah mampu memproduksi coklat batangan walaupun masih dalam skala terbatas dikarenakan keterbatasan sarana prasarana produksi, salah satunya adalah gedung produksi.

Hal ini yang mendorong pemerintah memberikan perhatian untuk mendukung penuh pembangunan gedung yang bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi produknya, sehingga nilai tambah dari produk Kakao ini bisa ditingkatkan dan memberikan efek berganda pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya menjadikan Papua Barat menjadi daerah sentra pengolahan Kakao yang nantinya dikenal Indonesia maupun manca-nega-

ra. Pemerintah Daerah optimis akan hal ini mengingat komoditas Kakao dari Manokwari Selatan merupakan salah satu varietas Kakao unggulan di Indonesia yang memiliki beberapa cita rasa yang tidak dimiliki oleh Kakao di daerah lain.

Diharapkan melalui kegiatan pembangunan gedung ini, dapat mewujudkan dan meningkatkan kapasitas produksi baik secara kuantitas maupun kualitas dengan produk-produk yang inovatif serta berkualitas dan memiliki daya saing yang mumpuni, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Berorientasi ekspor serta juga dapat mendukung pengembangan pariwisata terutama wisata agro di Papua Barat.

Pemerintah provinsi akan terus memberikan perhatian untuk membantu pengembangan komoditi Kakao ini lewat pengembangan kelembagaan Balitbangda Provinsi Papua Barat yang akan mengembangkan pusat pengembangan teknologi dan inovasi produk-produk hasil perkebunan dan hasil hutan non kayu di *Sains Tekno Park* (STP) Papua Barat. Pembangunan gedung inovasi produk Kakao ini merupakan cikal bakal untuk menjadikan Ransiki dan Manokwari Selatan sebagai Pusat Kakao di Indonesia Timur.

Pembangunan gedung ini merupakan

contoh kolaborasi yang apik dalam menghimpun sumberdaya bersama guna mencapai tujuan bersama. Dimana Pemda Manokwari Selatan telah menyediakan lahannya, pihak pertumbuhan ekonomi hijau telah menyediakan perencanaan dan mesin-mesin pengolahan yang segera diisi bila gedung ini selesai dibangun. Pihak koperasi sebagai penerima manfaat serta Pemda Provinsi Papua Barat menyediakan dana pembangunan gedung dan melalui Balitbangda akan mengelola dalam rangka pemeliharaan dan keberlanjutan pengelolaan dan pengembangannya. Pendanaan pembangunan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Tujuh Milyar Rupiah yang dialokasikan dalam Dokumen Anggaran Balitbangda Provinsi Papua Barat.

Upaya pemasaran hasil telah dilakukan ekspor perdana enam ton dengan tujuan Eropa pada bulan Januari 2020 yang lalu, juga termasuk nilai tambah Kakao dan produk olahan lewat kerjasama mitra pembangunan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan perusahaan Coklat Pipiltin Cocoa di Jakarta yang memperkenalkan Coklat Ransiki 72 persen *single origin* – dimana Pemprov Papua Barat telah membawa produk ini untuk pertama kali ke

Hollywood, Los Angeles -Amerika dan menjadi oleh-oleh khas dalam acara Gala Dinner Penghargaan Pahlawan Konservasi Global kepada Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

Dan yang terbaru Cokelat Ransiki yang diproduksi Pipiltin Cocoa sudah 100 persen singel origin. Kita patut berbangga karena produk olahan Kakao dari Ransiki Manokwari Selatan bisa dijumpai diluar negeri seperti di Inggris, Perancis, Belanda dan Latvia.

Gubernur Papua Barat berharap kepada para pengurus koperasi serta petani Kakao dengan adanya pembangunan gedung ini nantinya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat membantu dalam meningkatkan nilai tambah produk, agar Kakao tidak hanya dijual baik dalam negeri maupun diekspor dalam bentuk biji kering, namun bisa berupa Kakao yang telah diolah menjadi cokelat baik bubuk, lemak cokelat, maupun cokelat batangan dan produk turunan lainnya. Dengan adanya pembangunan ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Manokwari Selatan dan Papua Barat umumnya.

Pahlawan Konservasi Global ini juga berpesan kepada Bupati Manokwari Selatan beserta jajarannya dan semua pihak termasuk Balitbangda agar dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pembangunan, penggunaan dan rencana pengembangan agar nantinya fasilitas ini menghasilkan produk unggulan dan menjadi ikon Kabupaten Manokwari Selatan dan ikon Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Dominggus Mandacan, rencananya akan mengalokasikan dana Rp 15 Miliar untuk pengembangan produk Kakao Ransiki. Tahun ini Rp 7 Miliar untuk Pembangunan Gedung Inovasi Produk Kakao, sisanya pada tahun berikut untuk pembangunan fasilitas lainnya. " Selama saya masih menjadi Gubernur, saya akan terus memberikan perhatian untuk pengembangan Kakao Ransiki," ucapnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof.



Pelepasan ekspor biji kakao kering secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dalam laporannya menjelaskan luas Gedung Inovasi Produk Kakao yang akan dibangun ini berukuran kurang lebih 750 meter persegi (50 m x 15 m) dengan spesifikasi rangka baja yang sesuai dengan standarisasi untuk mendapatkan perijinan dalam hal pemasaran produk Kakao nantinya.

Prof. Heatubun juga menjelaskan jika Pemerintah Papua Barat dalam hal ini lewat Balitbangda Provinsi Papua Barat telah berbagi peran dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan Mitra Pembangunan. Pemda Mansel berperan sebagai penyedia tanah, Balitbangda Papua Barat membangun sarana prasarana gedung, sedangkan Mitra Pembangunan dalam hal ini Pertumbuhan Ekonomi Hijau akan menyediakan peralatan mesin-mesin pengolah Biji Kakao.

Pelaksana harian Bupati Manokwari Selatan, dr. Hengky V Tewu berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua

Barat yang terus memberikan perhatian kepada petani Kakao di Manokwari Selatan. Dirinya berharap perhatian ini akan semakin memacu semangat para petani Kakao di Manokwari Selatan.

Diketahui bahwa Pembangunan Gedung Inovasi Produk Kakao oleh Gubernur Papua Barat ini merupakan bagian dari rencana pembangunan kompleks pengembangan teknologi dan inovasi (*Sains Teknopark*) Papua Barat.

Hadir dalam acara ini, Gubernur Papua Barat dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat, sejumlah pimpinan OPD, Anggota DPR-RI, DPRD Papua Barat, sejumlah perwakilan Mitra Pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari Selatan, salah satu Deputi Bank Indonesia dan para karyawan Koperasi Eiber Suth Ransiki.

● Penulis : Alberth Yomo/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Pimpinan dan Seluruh Staf BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan

"Selamat & Sukses"

Pelaksanaan PESPRAWI XIII Se-Tanah Papua Tingkat Provinsi Papua Barat, 17 s/d 28 Februari 2021



StAR Project: Upaya Pemulihan Populasi Hiu Belimbing Melalui Translokasi Ex-Situ Pertama di Dunia



Hiu Belimbing (*Stegostoma tigrinum*) Dewasa. DOK. MARK ERDMANN

Hiu belimbing (*Stegostoma tigrinum*), yang juga dikenal sebagai hiu bintang atau hiu tokek, adalah jenis ikan hiu yang bercorak seperti zebra saat anakan dan macan tutul saat dewasa. Jenis ikan ini paling sering dijumpai di perairan dangkal berpasir di seluruh wilayah Indo-Pasifik, dan memiliki kekerabatan spesies terdekat dengan hiu paus. Selain memiliki peran penting di ekosistem laut, hiu belimbing juga menjadi daya tarik utama para penyelam dan

snorkelers karena sering ditemui di seluruh wilayah jelajahnya pada tahun 1980-an. Namun di 30 tahun terakhir, populasi hiu belimbing di seluruh wilayah jelajahnya kecuali Australia telah mengalami penurunan yang drastis akibat degradasi habitat dan perburuan sirip hiu di Asia Tenggara yang intensif pada tahun 1990-an dan awal 2000-an.

Sementara itu Raja Ampat sendiri sebagai salah satu habitat penting spesies ini

yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Wilayah Raja Ampat memiliki jejaring sembilan kawasan konservasi perairan (KKP) yang terhubung secara ekologis dan paling terefektif di Asia Tenggara, dan telah terbukti sukses dalam memulihkan populasi dari sejumlah spesies hiu karang, namun populasi hiu belimbing sendiri belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Padahal hiu belimbing ini sebelumnya sering dijumpai di seluruh Kepulauan Raja Ampat. Diperkirakan seba-

gian besar telah punah dari wilayah tersebut pada awal tahun 2000-an. Hal ini mendorong dugaan bahwa tekanan perburuan sirip hiu yang marak terjadi di Kepulauan Raja Ampat pada akhir tahun 90-an telah mendorong populasi hiu belimbing di Raja Ampat ke ambang kepunahan lokal. Selain itu, saat Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN (*IUCN Red List*) melakukan peninjauan ulang status ancaman kepunahan hiu belimbing di tahun 2016, mereka menaikkan status spesies tersebut dari kategori Rentan (*vulnerable*) ke Terancam Punah (*endangered*), dengan dugaan penurunan populasi lebih dari 50% dalam 30 tahun terakhir kecuali sub-populasi di Australia yang dianggap sehat dan relatif aman dari tekanan perikanan.

Tanpa adanya intervensi pengelolaan yang eksplisit (akurat), kemungkinan pemulihan hiu belimbing di Raja Ampat dan daerah sekitarnya di masa mendatang akan menjadi katepungan hilangnya spesies ini. Dengan hadirnya program inovatif dan terstruktur di Raja Ampat memberikan kesempatan bagi daerah yang unik untuk pertama kalinya di dunia mengimplementasikan program translokasi konservasi (pemulihan populasi/stok) hiu belimbing dengan menggunakan anakan yang dikembangkan dari populasi ex-situ atau yang disebut Proyek StAR.

Terbentuknya Proyek StAR (*Stegostoma tigrinum Augmentation and Recovery*)

Proyek StAR merupakan proyek translokasi konservasi yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri lebih dari 40 lembaga termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat, UPTD Pengelolaan KKP Kabupaten Raja Ampat, Universitas Sunshine Coast, IUCN Conservation Planning Specialist Group, Thrive Conservation, Misool Foundation,



Seekor hiu belimbing remaja (*S. tigrinum*) yang dipancing di Raja Ampat. DOK. SHAWN HEINRICH

Raja Ampat Research and Conservation Centre, Conservation International dan akuarium anggota AZA (Association of Zoos and Aquarium) seperti Akuarium Seattle, Akuarium Georgia dan Akuarium Virginia.

Tujuan utama dari proyek StAR adalah untuk membangun kembali populasi hiu belimbing yang sehat dan memiliki keragaman genetik, melalui pengembangan telur yang bersumber dari induk yang memiliki galur genetik yang tepat di lembaga-lembaga AZA dan dikirim ke Raja Ampat untuk penetasan, pemsaran dan pelepasan ke alam liar. Selain itu, Proyek StAR juga mengharapkan hasil sampingan

lainnya diantaranya:

- Terbentuknya protokol translokasi konservasi untuk spesies hiu dan pari ovipar yang dapat diimplementasikan di tempat lain di Papua Barat, Indonesia bahkan dunia.
- Terbentuknya kader-kader pengasuh hiu profesional dari Raja Ampat yang siap untuk mendukung implementasi proyek serupa lainnya.
- Meningkatkan prestasi Papua Barat dan menunjukkan Papua Barat sebagai *conservation leader* dan destinasi pariwisata yang inovatif.
- Peningkatan kesadaran, pengertian, dan dukungan publik terhadap program konservasi hiu dan pari.

Raja Ampat memperoleh kesempatan yang untuk pertama kalinya di dunia dalam mengimplementasikan program inovatif dan terstruktur dalam hal translokasi konservasi (pemulihan populasi/stok) hiu belimbing dengan memanfaatkan anakan yang dikembangkan dari populasi ex-situ atau yang disebut Proyek StAR.

Implementasi Proyek StAR di Raja Ampat, Indonesia

Persiapan untuk mengimplementasikan Proyek StAR di Raja Ampat sudah berjalan sejak akhir tahun 2019 di berbagai negara dan lembaga. Saat ini, ada tujuh jenis kelompok kerja yang mempunyai tugas-tugas khusus untuk menjalankan Proyek StAR secara sukses seperti: *Steering Committee, Husbandry, Indonesian, Veterinary, Reproduction, Communication, dan Research Group*. Kegiatan-kegiatan penting yang sedang dijalani kelompok kerja Proyek StAR sebelum pengiriman telur adalah pemilihan pasangan indukan yang tepat, percobaan metode monitoring, dan

tikan telur-telur sampai dengan aman dan dapat menjalani karantina di Jakarta sebelum dikirim ke dua tempat fasilitas penetasan/pembesaran (*hatchery*) yang direncanakan di Raja Ampat (RARCC dan Yayasan Misool). Para pakar pemelihara dari instansi AZA juga akan melatih sejumlah calon-calon pengurus hiu lokal yang akan mulai direkrut pada pertengahan tahun 2021. Harapannya, pengurus-pengurus hiu ini akan memiliki kapasitas husbandry dengan taraf internasional dan dapat mengurus segala keperluan penetasan dan pembesaran hiu-hiu belimbing dalam rangkaian implementasi proyek ini.

Setelah menetas, anakan akan diberi ma-

Translocation Specialist Group, setiap pelepasliaran harus menjalani monitoring pasca pelepasliaran (*post-release monitoring*) secara komprehensif untuk memantau tingkat mortalitas dan pola pergerakan. Maka dari itu, saat anakan hiu mencapai panjang total 70 cm dan berat badan sekitar 1 kg, penanda akustik (*acoustic tag*) dan penanda RFID (*radio frequency ID tag*) akan dipasangkan secara internal menggunakan protokol teruji yang dipelopori oleh Universitas Queensland dan Aquarium Des Lagon (New Caledonia), agar dapat dimonitor secara aktif saat dilepaskan di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan KKPD Misool Tenggara. Harapannya, dengan adanya program jangka panjang pelepasan individu untuk 6-10 tahun kedepan, populasi hiu belimbing di Raja Ampat dapat berkelanjutan secara mandiri, sebagaimana ukuran kelimpahan alami hiu belimbing yang ditemukan di wilayah Australia, begitu juga dengan asumsi daya tahan hidup anakan yang tinggi dari pasca-pelepasan.

Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) sedang bekerja sama dengan para mitra dari konsorsium Proyek StAR untuk menyiapkan dokumen SOP serta permohonan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat mengimpor telur hiu belimbing. Harapannya, pengiriman pertama dari Aquarium Seattle dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2021. Disamping itu, dalam waktu yang bersamaan sebuah fasilitas khusus untuk mengumpulkan telur dari induk yang dianggap tepat secara genetik di Raja Ampat akan dibangun secara paralel agar proyek pemulihan hiu belimbing dapat segera diimplementasikan. Saat ini proyek StAR juga sedang menjadi perhatian dan diamati oleh banyak pemangku kepentingan konservasi hiu dan pari global (termasuk IUCN *Shark Specialist Group*), mengingat proyek translokasi untuk pemulihan populasi hiu belimbing ini merupakan inovasi konservasi hiu yang baru pertama kali dilakukan di dunia. Sehingga, marilah kita bersama-sama mendukung dan mensukseskan Proyek StAR yang akan membawa prestasi tinggi untuk Raja Ampat, Papua Barat serta Indonesia sebagai *conservation leader*.

● Penulis : Neshia/Thrive Conservation Editor : Antoni Ungirwalu



Anakan hiu belimbing (*S. tigrinum*) di Aquarium Seattle, AS. DOK. GRANT ABEL

pembuatan SOP untuk pemeliharaan dan pengiriman. Pemilihan indukan yang tepat merupakan tugas yang paling penting guna menghindari polusi genetik di Raja Ampat, sekaligus memastikan pengembangbiakan telur memiliki varietas genetik yang beragam dan tidak dari satu pasangan hiu saja. Selain itu, Proyek StAR juga mengikuti workshop IUCN Conservation Planning Specialist Group untuk memastikan jumlah individu/populasi yang harus dilepasliarkan di Raja Ampat dapat berkelanjutan secara mandiri.

Telur yang dikirim ke Indonesia akan dibawa oleh pakar pemelihara (*husbandry specialists*) dari institusi AZA untuk memas-

kan dan dipelihara di kandang pembesaran (*sea pens*) sesuai protokol pemeliharaan hiu belimbing yang telah dikembangkan oleh lembaga AZA selama dua dekade terakhir. Anakan hiu akan tetap berada di kandang pembesaran selama jangka waktu 3 - 4 bulan, dimana selain pemberian makanan suplemen yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan pertumbuhan secara baik, tetapi juga mengamati kemampuan mereka untuk mencari mangsa secara mandiri. Sesuai persyaratan dari IUCN Conservation

SMART Perangkat Yang Friendly “Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Papua Barat”



Pelatihan jaga laut kaimana. DOK. LAURIO LEONALD/CI

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat bekerjasama dengan Conservation International Indonesia melaksanakan rangkaian pelatihan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi di Papua Barat secara berkelanjutan. Rangkaian pelatihan dimulai dari 8-12 Februari di Kota Sorong kemudian dilanjutkan di Taman Wisata Alam (TWA) Sorong tanggal 20-25 Februari 2021 untuk meningkatkan penguasaan dan pemantauan kawasan. Pelatihan SMART juga dilaksanakan di Kaimana untuk pengelola kawasan konservasi dan tim jaga laut, diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penge-

lolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Conservation International Indonesia pada tanggal 15-18 Februari 2021. Melalui rangkaian pelatihan SMART diharapkan para pengelola kawasan dapat mengoptimalkan kinerja mereka utamanya dalam proses perencanaan, dokumentasi, analisis, dan pembuatan laporan.

SMART merupakan perangkat yang dapat dengan mudah digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola data khususnya data terkait monitoring, pelaporan, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem penting di Papua Barat. Pelatihan ini bertujuan mendukung mekanisme pengelolaan kawasan yang efektif dalam mencapai komitmen

Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melindungi 70% kawasan lindung, sesuai dengan visi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. SMART merupakan salah satu sistem yang dikembangkan dan telah diadopsi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2017 untuk mengelola data hasil kegiatan patroli maupun data kawasan secara umum. Berbagai data yang dapat diolah melalui sistem SMART diantaranya data hasil monitoring satwa liar, inventarisasi potensi, kegiatan penyuluhan, dan penegakan hukum, serta pendataan kegiatan pengelolaan lainnya. SMART dan SMART Mobile bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan

Eksplorasi Situs Purbakala Teluk Wondama



Tim kajian Sejarah Purbakala Teluk Wondama, 2020. DOK. GEORGE MENTASAN

Goresan Narasi Etnografis Situs Purbakala Teluk Wondama

Kabupaten Teluk Wondama memiliki 13 Distrik, 75 kampung dan 1 kelurahan. Distrik dan kampung tersebar pada daerah pesisir dan pulau di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) serta daerah pegunungan dengan luas wilayah keseluruhan yakni 14.953,8 Km². Ketiga distrik yang berada pada bagian utara kabupaten ini yaitu: Distrik Roon, Distrik Roswar dan Distrik Rumberpon. Secara umum distrik kepulauan dengan mata pencarian masyarakatnya adalah nelayan dan petani diselingi juga dengan berburu serta tokok sagu. Masyarakat pada pulau-pulau bagian utara Teluk Wondama memiliki hubungan kekerabatan dan relasi sosial yang cukup erat namun mempunyai perubahan yang relatif cepat dibandingkan dengan masyarakat

lain yang berada di daratan dan pegunungan. Hal ini disebabkan karena kontak dengan orang luar lebih mudah dan sebagian besar penduduk di pulau tersebut merupakan masyarakat migrasi dari Biak-Numfor, Doreri, Serui dan Nabire. Secara historis sebelum injil masuk ke Tanah Wondama, kehidupan masyarakat teluk masih mengandalkan keyakinan pada arwah dan roh orang mati sehingga tampak berbagai peninggalan-peninggalan sejarah pada wilayah tempat tinggalnya.

Kawasan Roon, kawasan Roswar dan kawasan Rumberpon memiliki banyak situs peninggalan purbakala dalam bentuk situs cagar budaya dan situs peradaban Kristen yang belum banyak di eksplorasi. Oleh karena itu guna menopang semangat promosi dan konservasi budaya lokal maka kajian-kajian situs purbakala di Teluk Wondama penting dilakukan dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan sejarah purbakala dan peradaban masyarakat sasar wondama.

Cagar budaya adalah kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sekitarnya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan agar diperlukan langkah strategis berupa upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Geliat pariwisata mulai menemukan wujudnya di Teluk Wondama saat dilakukan Festival Pulau Roon tahun 2019 tepatnya tanggal 24 sampai 27 Juli. Festival yang sama direncanakan dilanjutkan pada tahun 2020 namun tertunda akibat Pandemi COVID-19. Akan tetapi kebangkitan dan semangat menggali potensi sumber daya laut, nilai-nilai kearifan lokal, atraksi budaya, kuliner, dan sejarah purbakala terus menggelora yang nantinya akan menjadi menu andalan dalam penyelenggaraan Festival Pulau Roon di Teluk Wondama mendatang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya seksi Sejarah Purbakala melakukan kajian yang terkonsentrasi pada pulau-pulau bagian Utara yaitu Pulau Roon, Pulau Roswar dan Pulau Rumberpon. Situs sejarah purbakala di Teluk Wondama dalam sebuah narasi etnografis yang dilengkapi dengan peta letak dan koordinatnya.

Peserta Pelatihan Smart Kota Sorong February 2021. DOK. DESYANTI NABABAN/BBKSDA PAPUA BARAT

tapak dengan cara penggunaan yang mudah tanpa membutuhkan keterampilan khusus sehingga dapat digunakan berbagai pihak termasuk masyarakat.

“Upaya monitoring dan pengelolaan kawasan yang baik sangat penting untuk mendukung komitmen Pemerintah Papua Barat dalam melindungi minimal 70% daratan Papua Barat, termasuk mangrove dan gambut sebagai ekosistem kaya karbon yang penting dalam mendukung penerapan Pembangunan Rendah Karbon oleh Pemerintah Provinsi”, ujarnya.

Rangkaian pelatihan SMART merupakan tahap awal pengenalan perangkat untuk mengumpulkan data dan menyusun laporan sebagai upaya Pemerintah Daerah Papua Barat dalam meningkatkan perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring tindak lanjut untuk mengimplementasikan SMART dalam upaya pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung dan ekosistem penting di Papua Barat.

● Penulis : Tim Media/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding



Peserta Pelatihan Smart TWA Sorong. DOK. DESYANTI NABABAN/BBKSDA PAPUA BARAT

kawasan, serta mudah digunakan dengan tanpa memerlukan keterampilan khusus.

Pelatihan SMART yang dilaksanakan di Kota Sorong dihadiri oleh berbagai peserta dari BKSDA dan KPH wilayah Sorong, Waisai, Teminabuan, Manokwari, Bintuni, Kaimana, Fakfak dan Manokwari. BBKSDA Papua Barat dan KPH yang tersebar di berbagai wilayah di Papua Barat sebagai pengelola kawasan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat mendukung peran BBKSDA Papua Barat dalam mendukung pelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan pemanfaatannya secara lestari, serta mendukung peran KPH sebagai pengelola di tingkat tapak. Tidak hanya mendukung peran BBKSDA dan KPH, pelatihan SMART juga memberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan untuk pengelola di tingkat tapak seperti tim jaga laut, UPTD KKP di Kaimana, dan pengelola TWA Sorong. Pelatihan SMART di Kaimana diharapkan dapat mendukung optimalisasi kinerja pengelola kawasan dalam proses monitoring, perencanaan, dan pengelolaan kawasan laut dan konservasi; sedangkan pelatihan di TWA Sorong diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan habitat di kawasan.

Kepala BBKSDA Papua Barat Ir. R. Basar Manullang, M.M. pada saat pembukaan pelatihan SMART di Kota Sorong menyampaikan bahwa penggunaan SMART dapat menjadikan data lapangan menjadi terukur dan terstandarisasi sehingga evaluasi dan perencanaan dapat dilakukan dengan baik. SMART dan *Cyber Tracker* merupakan alat yang fleksibel dan bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan, dan dirancang untuk digunakan di tingkat

Peta sebaran situs sejarah purbakala di Distrik Roon, Roswar dan Rumberpon Teluk Wondama



Situs Karawar.

Situs Penguburan Karawar

Situs Karawar terdapat di kampung Syabes Pulau Roon tepatnya di sisi tebing di atas perbukitan batuan cadas. Fragmen tulang belulang ditempatkan pada ceruk dinding batu yang dijajarkan dengan tulang tengkorak sebanyak lima buah dan fragmen lainnya berupa tulang paha dan rahang. Koordinat: 020 21' 53.9" Lintang Selatan dan 1340 31' 35.5" Bujur Timur.



Situs Korbiena dan Swangini.

Situs Korbiena dan Swangini

Situs Korbiena adalah gambar cadas di batuan metamorf yang berlapis-lapis. Posisi situs berada di pesisir pantai bagian tanjung Korbiena. Situs korbiena menunjukkan bentuk buaya, garis gelombang, penyu dan abstrak yang digambar dengan bahan berwarna merah. Sayangnya lukisan-lukisan dinding ini mulai pudar. Koordinat: 020 24' 42.9" Lintang Selatan dan 1340 31' 54.5" Bujur Timur.

Selain situs lukisan tersebut, di daratan tanjung ini terdapat lekukan dinding tebing dimana diletakkan fragmen tulang manusia berupa tulang paha dan betis serta fragmen tembikar dalam bentuk kendi yang dibuat dari tanah liat.



Situs Suwef Somoko.

Situs Suwef Somoko

Situs Suwef Somoko adalah tempat penguburan yang terletak pada sisi tebing dan fragmen tulang manusia dan fragmen keramik yang diletakkan di atas batuan. Situs ini merupakan penguburan dengan enam buah tengkorak, 1 tulang rahang, dan lima fragmen keramik dalam bentuk yang berbeda-beda. Situs ini terletak pada koordinat: 020 23' 46.5" Lintang Selatan dan 1340 34' 20.8" Bujur Timur.



Situs Kanggon Batu Mawi.

Situs Kanggon Batu Mawi

Situs ini menunjukkan sebuah batu andesit yang berbentuk lumping berukuran kecil dan juga ada dua batu di sisinya. Ukuran batu Mawi ± memiliki panjang 50 cm dan lebarnya 30 cm dengan ketebalan 20 cm. Masyarakat setempat percaya bahwa ketika seseorang mampu mengangkat Batu Mawi dan merasa ringan, maka harapan yang diungkapkan secara diam-diam dalam hati akan terkabulkan, akan tetapi jika terasa berat maka harapan yang diinginkan tidak akan terkabul. Lokasi pada koordinat: 020 23' 37.6" Lintang Selatan dan 1340 34' 35.8" Bujur Timur.



Situs Gua Tengkorak Minori.

Situs Gua Tengkorak Minori

Situs Minori berada cukup jauh dari Kampung Yomber Pulau Roswar. Pada lokasi ini terdapat gua penguburan tulang-belulang moyang dari marga Manauw. Untuk menjangkau gua ini membutuhkan waktu tempuh dengan berjalan kaki dari bibir pantai sejauh ± 478 m menuju puncak gunung berbatu dengan ketinggian ±100 mdpl. Pada tempat ini akan ditemukan tumpukan tulang tulang tengkorak kepala, lengan, jari-jari, tulang kaki yang disimpan pada celah batu dan beberapa tulang lainnya berada di bawah batu. Koordinat: 02005.833' Lintang Selatan dan 134023.134' Bujur Timur.



Situs Ambesibui.

Situs Ambesibui

Situs Ambesibui merupakan gambar-gambar yang terdapat di tebing batuan gamping dan terjal yang diyakini oleh masyarakat setempat dilukis oleh orang asing atau orang tidak dikenal dari mana asalnya. Pada dinding-dinding batu ini terdapat lukisan warna merah berbentuk kadal, manusia, penyu, ikan, sulur-suluran, geometris, garis silang, bulatan dan garis-garis. Adapula beberapa gambar yang telah ditutupi oleh travertine yaitu bentuk batu kapur yang didepositkan oleh mata air mineral terutama air panas. Posisi situs ini berada pada koordinat 020 01' 00.0" Lintang Selatan dan 1340 08' 11.1" Bujur Timur.



Situs Sanepa.

Situs Sanepa

Arti Sanepa adalah ingat. Pada situs ini menunjukkan bentuk rekahan gamping berupa lubang ceruk cukup besar dan juga beberapa dindingnya runtuh dan berwarna kekuningan. Rekahan dinding batu gamping ini terdapat lukisan berupa kadal, segitiga, bulatan, dan beberapa gambar telah pudar sehingga sulit dideteksi bentuknya. Koordinat: 020 01' 31.7" Lintang Selatan dan 1340 09' 00.3" Bujur Timur.

Situs sejarah purbakala yang terangkum dalam tulisan ini masih jauh dari sentuhan dan perhatian masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperlakukannya sebagai

pusara sejarah peradaban. Ritual adat pada situs/cagar budaya tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam masyarakat terhadap tempat-tempat sejarah yang dimiliki. Hal ini diduga karena dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen yang telah mengambil tempat dan menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat di pulau dan pesisir pantai bagian Utara Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat.

● Penulis : George Mentasan, dkk/UNIPA
Editor : Antoni Ungirwalu





**Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
DI TANAH PAPUA**



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut. M.Si, FLS
Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat



Igya ser hanjop
Jurnal Pembangunan Berkelanjutan



Call for papers

Jurnal Igya Ser Hanjop Pembangunan Berkelanjutan Volume 3

Igya Ser Hanjop : Jurnal Pembangunan Berkelanjutan merupakan jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan. *Igya Ser Hanjop* menerbitkan manuskrip original penelitian yang berfokus pada hasil penelitian tentang berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. *Igya Ser Hanjop* diterbitkan secara on-line dan dicetak dua kali dalam setiap volume oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Kami mengundang para peneliti, pengajar, mahasiswa, aktivis, ASN Se - Provinsi Papua Barat untuk berpartisipasi dengan mengirimkan artikel (Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris) baik hasil riset lapangan atau review.

Syarat dan ketentuan :

- Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah manapun
- Panjang artikel minimal 38.000 dan maksimal 40.000 karakter tanpa spasi
- Untuk template penulisan silahkan unduh di <https://jurnal.papuabarprov.go.id/index.php/ish/libraryFiles/downloadPublic/1>
- Referensi minimal 15 artikel Jurnal Ilmiah elektronik terkini (10 tahun terakhir)
- Panduan penulisan lainnya dapat dilihat pada <https://jurnal.papuabarprov.go.id/index.php/ish/about/submissions>

Pengiriman artikel dan Proses publikasi artikel tidak dipungut biaya (gratis).

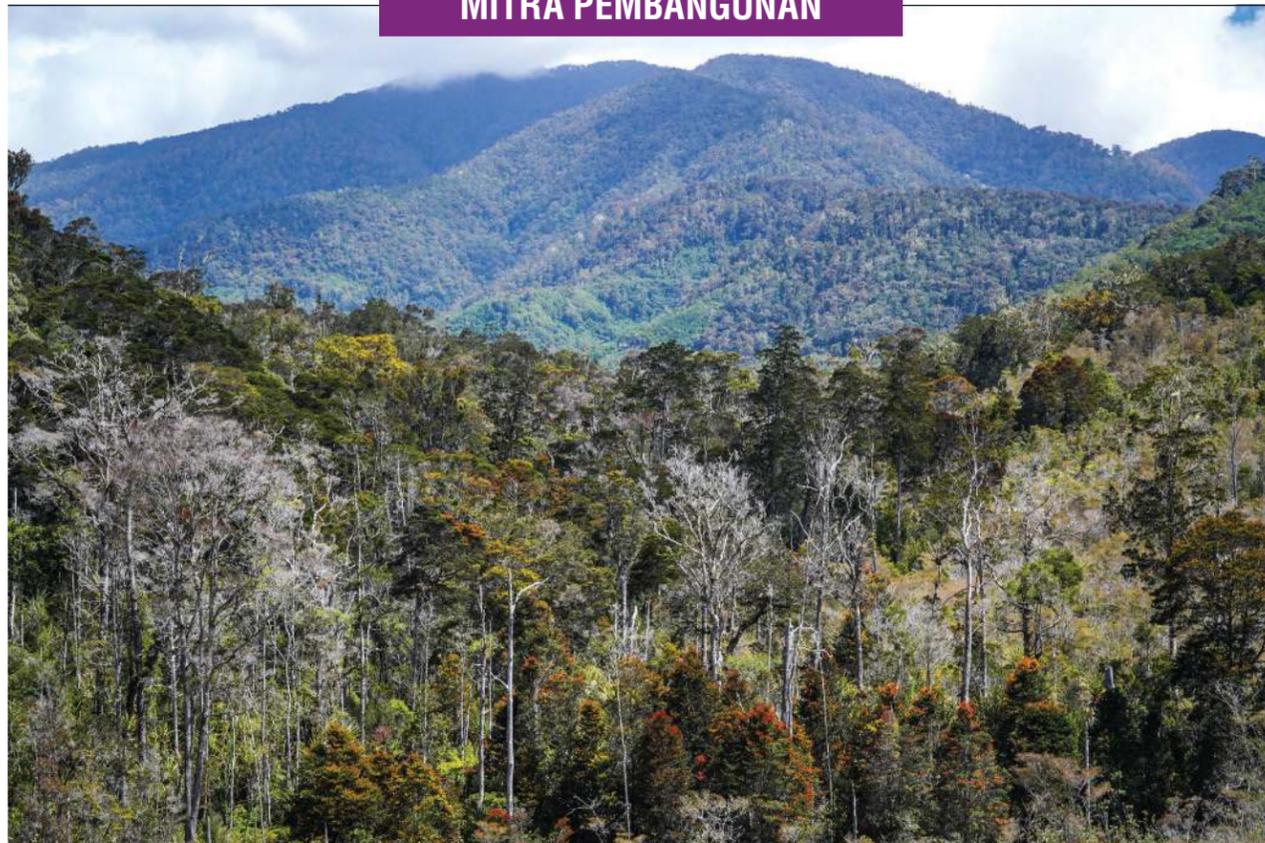
Submit artikel :

- <https://jurnal.papuabarprov.go.id/index.php/ish/about/submissions>
- igyaserhanjop@balitbangdapapuabar.com

Rp. 1jt
bagi penulis
yang artikelnya
dimuat dalam
setiap edisi

Alamat : Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3,
Arafai - Manokwari

INFORMASI WA : +62 852-5460-7856 /LINCE BARANSANO



Ekosistem hutan di Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. DOK. YUSUF AHMAD/WRI INDONESIA

Provinsi Papua Barat memiliki tutupan hutan yang sangat luas mencapai 8,8 juta ha. Ekosistem hutan hujan tropis di Tanah Papua ini merupakan rumah bagi beranekaragam jenis flora dan fauna dengan tingkat endemisitas yang tinggi. Selain memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis di Papua Barat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat adat sekitar hutan dan menjaga kestabilan iklim global.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan bahwa dalam strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup Pulau Papua harus mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% dari luasan pulau tersebut. Di Provinsi Papua Barat, Penetapan kawasan lindung telah memperhatikan dan mengarusutamakan kepentingan dari masyarakat setempat. Selain itu penetapan kawasan lindung juga memertingkatkan hubungan antara manusia dengan sumber daya hutan yang telah lama terba-

Papua Barat Berkomitmen Mengalokasikan 70% Luas Daratan Sebagai Kawasan Lindung

ngun dan telah terbukti dapat menjaga hutan tetap lestari dan memiliki fungsi lindung yang besar.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan serta mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menandatangani Deklarasi Manokwari pada tahun 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan

Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua. Salah satu komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Manokwari adalah komitmen penataan ruang yang mengakomodir sedikitnya 70% luas daratan sebagai kawasan lindung.

Sebagai tindak lanjut mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) No. 10 tahun 2019

tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dukungan Mitra Pembangunan, serta berbagai pihak terkait lainnya terus berupaya untuk mencapai komitmen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan termasuk diantaranya komitmen untuk mengakomodir sedikitnya 70% luas daratan sebagai kawasan lindung.

Dilihat dari segi penataan ruang, RTRW Provinsi Papua Barat, berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2013, membagi porsi 65,86% atau 6.5 juta ha sebagai Kawasan Budidaya dan 34,14% atau 3.3 juta ha sebagai Kawasan Lindung. Selanjutnya pada revisi RTRWP yang masih sementara berproses, telah diusulkan pembagian pola ruang kedalam tiga kategori: kawasan lindung, kawasan pemanfaatan berkelanjutan, dan kawasan budidaya. Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan berkelanjutan adalah kawasan budidaya yang bentuk pemanfaatan lahannya dilakukan secara berkelanjutan dan berskala lokal atau tradisional. Kawasan ini bertujuan untuk tetap memelihara tutupan hutan namun juga tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini proses revisi RTRWP telah menetapkan luas kawasan lindung dan kawasan pemanfaatan berkelanjutan sebesar 67,01%, sedangkan kawasan budidaya yang tidak termasuk kawasan pemanfaatan berkelanjutan sebesar 32,99%.

Sebelumnya telah ada berbagai studi terkait kawasan lindung dan pelestarian alam di Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga penelitian termasuk Universitas Papua. Studi ini merekomendasikan perlunya suatu kajian terkait komitmen pembangunan berkelanjutan, khususnya komitmen untuk mengalokasikan 70% kawasan darat sebagai kawasan lindung. Kajian tersebut perlu mengaitkan berbagai studi yang sudah ada serta mengkaji secara ilmiah sebagai narasi baru yang menjelaskan komitmen 70% kawasan darat sebagai kawasan lindung dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat bersama WRI Indonesia telah menye-



Penyerahan Draft Naskah Akademik Komitmen 70% Luas Daratan Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Lindung oleh Kepala Balitbangda kepada Tim Penyusun. DOK. BALITBANGDA PB

lenggarakan "Kickoff Penyusunan Naskah Akademik Komitmen 70% Luas Daratan Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Lindung." Acara kickoff telah dilakukan pada hari Rabu, 03 Februari 2021 di Café Laut Hotel Mansinam Beach diikuti oleh Asisten II Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait serta tim pakar yang berasal dari Lembaga Perguruan Tinggi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Universitas Papua).

Pada kegiatan tersebut, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Naskah Akademik Komitmen 70% Luas Daratan Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Lindung kepada perwakilan Tim Pakar yang diwakili oleh Marcus R. Maspaitella, Sp, M.Agricomm dan disaksikan oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Melkias Werinussa, SE, MH.

Gubernur Papua Barat dalam kegiatan kickoff tersebut, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat atas dukungan mitra pembangunan, serta berbagai pihak terkait lainnya terus berupaya untuk mencapai komitmen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan termasuk diantaranya komitmen untuk mengakomodir sedikitnya 70% luas daratan sebagai kawasan lindung. Hal ini membutuhkan suatu kajian mendalam yang ilmiah dari berbagai aspek, seperti aspek spasial, ekologi, sosial budaya, kelembagaan, dan yuridis formal, tambah Melkias Werinussa yang mewakili Gubernur Papua Barat.

Kepala Balitbangda, Prof. Heatubun menekankan bahwa nantinya hasil penyusunan Naskah Akademik tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan atau arahan teknis dan ilmiah terkait komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang telah tertuang dalam Deklarasi Manokwari dan Perdasus No. 10 Tahun 2019. Naskah Akademik ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat, termasuk dokumen RTRWP dan RPJMD.

● Penulis : Lody Maturbongs/WRI
Editor : Yance de Fretes

Survei Cepat Identifikasi Potensi Mata Pencaharian Alternatif Di Kawasan Mangrove Teminabuan



1

Papua Barat memiliki kawasan mangrove dengan luas 479.481 Ha (sekitar 4,5 kali lipat Kota Sorong). Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana, dan Fakfak merupakan tiga kabupaten dengan luasan mangrove yang terbesar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat guna karena dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat pesisir serta dapat membantu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Survei cepat sosial ekonomi dapat menjadi landasan dalam pengelolaan kawasan mangrove dalam jangka panjang, dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Yayasan Mange-Mange melaksanakan survey cepat sosial-ekonomi di Sorong Selatan pada bulan November 2020 untuk

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai upaya untuk melestarikan ekosistem mangrove. Survei ini dilakukan di beberapa desa di Sorong Selatan yang merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi potensi mata pencaharian alternatif masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan seperti pembibitan mangrove, produk olahan kepiting, dan budidaya kepiting bakau. Berbagai pengembangan potensi kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang berkontribusi bagi perekonomian setempat, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem mangrove.

Metode survei cepat sosial ekonomi di Sorong Selatan dilakukan dengan diskusi dan wawancara bersama kelompok masyarakat dan kepala kampung di sekitar kawas-

Pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat guna dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat pesisir serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- 1 Aktifitas nelayan di kawasan mangrove Teminabuan
DOK. YETI KURNIASARI/CI
- 2 3 Pelaksanaan survei cepat di Sorong Selatan
DOK. YETI KURNIASARI/CI

an mangrove untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap mangrove secara umum, serta identifikasi potensi pengelolaan dan pemanfaatannya. Melalui sesi diskusi dan wawancara, survei mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Hasil survei mengidentifikasi minimnya pengetahuan masyarakat lokal terhadap pemanfaatan mangrove untuk produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), padahal Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan mangrove yang cukup luas, sekitar 15 persen dari total mangrove Papua Barat. Namun sudah ada beberapa bentuk pemanfaatan eko-



2



3

sistem mangrove secara lestari oleh masyarakat setempat di sejumlah desa, antara lain sebagai tempat untuk mencari kepiting, ikan, dan sagu.

Oleh karena itu, edukasi dalam pengolahan berbagai jenis makanan dan obat-obatan. Untuk mencapai pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan perlu

dilakukan sosialisasi terus-menerus tentang fungsi dan potensi sumber daya mangrove untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat, termasuk beberapa alternatif potensial seperti budidaya madu dan kerajinan dari mangrove.

● Penulis : Tim Media/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

PANORAMA



PANTAI ERMUN
Kampung Teluk Etna Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat. DOK. YANCE DE FRETES



ANGGI MART

Tujuan pendirian Anggimart adalah untuk mengangkat ekonomi mama-mama petani Papua dalam bentuk memberikan bantuan pemasaran komoditas pertanian mereka via *online* dan *offline*. Alamat usaha Anggi Mart yaitu berada di Jalan Manunggal Kecil, Amban Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pemesanan *online* sayuran dan produk wirausaha lokal dapat dilakukan dengan mengirim Whats Up ke nomor **082123133975** a.n. **Simon Tabuni**.

PAPUA GARDEN

Papua Garden adalah sebuah badan usaha berbentuk CV yang didirikan oleh Maikel H.R. Kondologit sejak 2020. Usaha ini bergerak dalam bidang perkebunan dan peternakan. Komoditas yang dikembangkan saat ini adalah tanaman kacang kedelai di lahan 1 Hektar dan peternakan Ayam Petelur dengan jumlah ayam mencapai 1000 ekor. Produk ini dapat dijumpai di Anggi Mart atau dapat menghubungi nomor **081248640807** a.n. **Maikel Kondologit**.



PMI dan Kolaborasi Produktif Mendorong Kewirausahaan di Papua

Papua Muda Inspiratif (PMI) adalah sebuah gerakan kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong anak-anak muda Papua menjadi produktif dengan cara pemanfaatan potensi daerah dengan cara pengolahan komoditas pertanian, perikanan, peternakan dan kearifan budaya dan juga mendorong pemuda untuk memaksimalkan potensi diri untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif.

Papua Muda Inspiratif didirikan oleh 23 anak muda Papua yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. PMI berada di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat termasuk Kabupaten Manokwari.

Beberapa Wirausaha muda Papua yang tergabung dalam PMI adalah sebagai berikut:

Hallooo.... Manokwari

Kini Hadir Senja Papua Kuliner
Kami menawarkan produk lokal yang telah di inovasi menjadi cemila kekinian

Sedia

- Selai Nanas Arfak
- Keripik Pisang Kekinian Dengan Varian Rasa
 - Coklat
 - Moka
 - Strobery
 - Coco Pandan

SENJA PAPUA KULINER

Senja Papua Kuliner (SPK) adalah sebuah merek dagang dan badan usaha yang bergerak di bidang pertanian. SPK memberikan nilai tambah pada produk pertanian seperti Nenas Anggi menjadi Selai Nenas Anggi dan Pisang menjadi Keripik Pisang Aneka Rasa. SPK didirikan oleh Merry Ch. Rumanum. Produk-produk Senja Papua Kuliner dapat dibeli di Anggi Mart atau dapat menghubungi nomor **081310355714** a.n. **Merry Rumanum**.

IDEA OF FOOD

IDEF Idea of Food adalah sebuah badan usaha dan merek dagang yang didirikan oleh Ivana D. Faidiban. IDEF bergerak dalam bidang kuliner. Produk-produk yang diciptakan oleh IDEF diantara lain Aneka Jenis Sambal, Abon Tuna dan Cekalng dan Aneka Jenis Cake. Produk-produk IDEF dapat dibeli di Anggi Mart atau dapat menghubungi nomor **082198507719** a.n. **Ivana Faidiban**.

FERDI'S BAKERY
Kitorang pu selera Roti

MENYEDIKAN :

- ROTI LEMBUT ANEKA RASA (Coklat, Keju, Cokju, Piscook, Sosis, Durian, Srikaya, Mexico Bun)
- ANEKA CROISSANT & CROISSANT STICK
- ANEKAKUE BASAH & JAJANAN PASAR.

081344817448 | Ferdi.Bakery
Ferdie's Bakery | Kamp. Bugis, Wosi, Manokwari

FERDY BAKERY

Ferdy Bakery adalah sebuah merek dagang dan badan usaha yang didirikan oleh sepasang kekasih Ferdy dan Dian. Usaha mereka berdua bergerak di bidang Kuliner dengan produk yang diproduksi yaitu Roti Boy khas Manokwari dengan aneka topping Ikan Asar Saireri dan Aroma Kopi Anggi. Selain Kuliner, mereka juga bergerak di bidang perikanan darat dengan membuat Café Ikan dimana disana mereka menjual aneka benih ikan dan ikan dewasa. Produk-produk Ferdy Bakery dapat dibeli di Kampung Bugis, Wosi atau dapat menghubungi nomor **081344817448** a.n. **Dian Anggi**.

EXOTIS PAPUA

Exotis Papua adalah sebuah merek dagang dan usaha yg didirikan oleh Meiji Akwam. Bidang usaha Exotis Papua bergerak di sektor pertanian dan design kreatif. Produk yang diproduksi oleh Exotis Papua dalam bidang pertanian adalah Minyak Kelapa Apus, VCO, Bon Rica dan Gandum/Pokem Numfor. Sedangkan design kreatif Exotis Papua memproduksi Baju Kreatif, Tas, dan Payung bergambarkan motif-motif kreatif. Pemesanan produk Exotis Papua dapat dilakukan dengan mengunjungi pondok terletak di Jalan Merapi Fanindi Dalam, Kabupaten Manokwari atau dapat menghubungi nomor **082238204073** a.n. **Meiji Akwan**.

Exotis Papua

Menyediakan

- Minyak Kelapa Apus
- Virgin Coconut Oil (VCO)
- Marisan Komin
- Rica Gilang Halus
- Rica Giling Sedang
- Rica Giling Kasar
- Sisir Bambu

Jl. Maripi Fanindi Dalam
Manokwari - Papua Barat

f Maymytyaq | 082238204073

- Kemin Punya -

PAPUA SIRBEH
UMKM PAPUA BARAT
Pelestarian Budaya Papua Barat

BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TELAH DI DUKUNG OLEH:
- KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM
- DISPERINDAGKOP KAB. MANOKWARI
- DINAS KOPERASI UKM PROPINSI
- PAPUA MUDA INSPIRATIF

BERBAHAN DASAR UTAMA SABUN DETERJEN DAN BEBERAPA BAHAN KIMIA SERTA EKSTRAK JERUK



MENGHASILKAN 4 JENIS PRODUK
1. DETERJEN PAKAIAN
2. SABUN CUCI PIRING
3. CAIRAN PEMBERSIH LANTAI
4. CAIRAN PENCUCI TANGAN

MEMILIKI 4 KEHARUMAN YANG BERBEDA WANGI JERUK KOP, BUNGA DAN AROMA DAUN TEH.

MEMPRODUKSI 200 LITER / BULAN DI PRODUKSI DI REREMI SPMA MANOKWARI

PAPUA SIRBEH



OLIVE'S KITCHEN

Olive Kitchen adalah sebuah merek dagang dan badan usaha yang didirikan oleh Olivia U. Waren sejak 2021. Usaha Olive Kitchen bergerak dalam bidang kuliner dimana dengan mengolah buah labu kuning sebagai bahan dasar pembuatan aneka kue. Salah satu yang telah dikembangkan yaitu Kue Donat Labu Kuning. Produk Olive Kitchen dapat menghubungi nomor **081240327119 a.n. Olivia Waren.**

SIRBE_PAPUA

Sirbe_Papua adalah sebuah merek dagang dan badan usaha yang didirikan oleh Simson Bonggoibo. UMKM ini memproduksi deterjen pembersih berupa aneka sabun diantara lain Sabun Cuci Tangan, Sabun Cuci Piring, dan Sabun Cuci Pakaian. Produk Sirbe_Papua dapat dijumpai di Anggi Mart dan Juga Pondok Sirbe Papua yang terletak di Kompleks SPMA/Polbangan Manokwari. Atau dapat menghubungi nomor **085212286034 a.n. Simson Bonggoibo.**

PT. DOA JAYA ABADI

PT Doa Jaya Abadi merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh Robert Rumsayor. PT ini mempunyai tujuan yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal-hal negatif dan membantu masyarakat di daerah kampung dengan memberikan nilai tambah pada produk mentah mereka. Beberapa unit usaha yang telah didirikan dan dijalankan yaitu pengolahan sagu menjadi tepung sagu, pencucian motor, pompa bensin mini dan perkebunan. Ada sekitar 20 anak muda yang dipekerjakan. Produk dan jasa dari UD dapat dipesan dengan mengunjungi tempat produksi mereka di Samping Hotel Triton Manokwari atau dapat menghubungi nomor **085244376953 a.n. Robert Rumsayor.**

KOPI GUNTING RAMBUT

Kopi Gunting Rambut adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh Ronal Rumsaro. Usaha ini bergerak di bidang jasa gunting rambut. Berbeda dengan pangkas rambut/*barber shop* lain, Ronal lebih memanfaatkan teknologi terkini dan beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ronal menerima panggilan untuk melakukan pangkas rambut di rumah pemesan. Ia dapat menghubungi **082397960010 a.n. Ronal Rumsaro.**

PETERNAKAN AYAM PETELUR LOKAL
Ujung Jurang, Reremi Puncak

TELUR SEGAR dengan KUALITAS TERBAIK



Info Pemesanan :

HP : 0812 4531 6881 (John)
0821 9839 2532 (Alfonsina)
fb : John Mychael Adonia Dowansiba Alfonsina Maryana

PETERNAKAN AYAM PETELUR

Peternakan Ayam Ujung Jurang adalah sebuah badan usaha milik John Towansiba. Badan usaha ini bergerak di bidang peternakan khususnya peternakan Ayam Petelur. Ayam yang dipelihara berjumlah 160 ekor dengan rata-rata produksi telur 150 butir per hari. Telur per rak dijual dengan harga Rp. 65.000. Harga ini terbilang cukup kompetitif bagi telur lokal. Produk John dapat dijumpai di Anggi Mart atau dapat menghubungi nomor **081245316881 a.n. John Towansiba.**

Kopi Manna
Mengangkat komoditi kopi Papua dan Papua Barat untuk mensejahterakan para petani kopi di pedalaman serta memperkenalkan nikmatnya cita rasa kopi Papua



KOPI MANNA

Kopi Manna merupakan merek dagang sekaligus badan usaha yang bergerak di bidang kuliner. Kopi Manna didirikan oleh Roland Thung Raweyai dan bergerak membantu petani kopi Papua dalam mengembangkan pertanian kopi mereka sehingga memberikan manfaat ekonomi yang maksimal. Produk Kopi Manna dapat dipesan dengan menghubungi nomor **081344040021 a.n. Roland Thung Raweyai.**

BORARSI 96

Borarsi 96 adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh Ruth Sikowai. Usaha ini bergerak di bidang design baju kreatif dan membantu memasarkan produk-produk kerajinan tangan mama-mama Papua. Outlet penjualannya terletak di Borarsi Manokwari. Pemesanan dilakukan dengan menghubungi nomor **082398320460 a.n. Ruth Sikowai.**

WILCHOF

Wilchof merupakan merek dagang dan badan usaha yang bergerak di bidang kuliner dan beverage. Wilchof didirikan oleh Willy Sombuk. Dalam bidang kuliner, Wilchof mengelola kopi untuk memberikan nilai tambah berupa produk roasting kopi kemasan. Kopi yang dikelolanya berasal dari Papua (Kopi yang berasal dari Wamena, Paniai, Serui) dan luar Papua

(Kopi dari Bali, Jawa). Dalam bidang beverage, Willy mendirikan sebuah Cafe yang diberi nama Wilchof Cafe, terletak di Jalan Merdeka Manokwari. Produk-produk Kopi Wilchof dapat dijumpai dengan berkunjung ke Wilchof Café atau menghubungi nomor **081248867884 a.n. Willy Sombuk.**

PAPUA RISEN SURFING

Papua Risen Surfing adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata spesifiknya Wisata Air. Papua Risen Surfing didirikan oleh Papua D. Dimara. Wisata air yang didorong adalah Surfing (selancar) dimana Papua Risen Surfing menawarkan penyewaan Papan Selancar dan membuka kelas kursus selancar. Selain selancar Papua Risen Surfing juga membuka penyewaan penginapan terletak di Pantai Batu Papan (kampung Petrus Kafiari), Amban Pantai Manokwari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor **085254315571 a.n. Papua Dimara.**

KAMTAMBAY HOMESTAY

Kamtambay Homestay adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Kamtambay Homestay didirikan oleh Wolter Gaman, seorang putra asli suku Maya Raja Ampat, dan terletak di Teluk Mayalibit Raja Ampat. Raja Ampat terkenal dengan wisata bawah laut, namun paket wisata yang ditawarkan Wolter berbeda dan pertama di Raja Ampat yaitu Paket wisata jelajah alam (*tracking*), bird watching, dan penginapan (*homestay*). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor **081288863768 a.n. Wolter Gaman.**

GARKINS MANOKWARI

Garkins Manokwari adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh Frans B. Wabdaron. Produk yang ditawarkan adalah design aneka gambar pada casing HP, Laptop dan lain sebagainya. Pemesanan dapat dilakukan dengan mengunjungi pondok garkins Manokwari terletak di Jalan Merapi Fanindi, Manokwari atau dapat menghubungi nomor **082397144307.**

GARSKIN MANOKWARI

Sedia berbagai macam Garskin & Custom Gelas:

- Garskin Handphone
- Garskin Laptop
- Custom Gelas

Bisa Request Gambar/Foto atau Tulisan Sendiri

Kualitas terjamin! Harga Terjangkau



Jl. Merapi Fanindi depan SMA Oikumene.
IG: @Garskingelas_mkw / WA: 082397144307

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT

“Fokus Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah Hingga Skala Rumah Produksi”

Lince Idorway, SH, M.M.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat.
DOK. DINAS PMK PAPUA BARAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penunjang pembangunan dan pengembangan daerah maupun nasional sehingga dalam menjalankan tugas serta pelayanannya diharapkan dapat dilakukan seoptimal mungkin melalui penataan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam serta peningkatan peran masyarakat sebagai upaya menekan angka kemiskinan. Mengingat pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam menjembatani berbagai pemberdayaan masyarakat di kampung maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dituntut agar dapat menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksinya melalui revitalisasi penataan kelembagaan, penguatan lembaga usaha ekonomi rakyat dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejarah Terbentuknya

Pada awal dibentuk tahun 2009, OPD Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat masih berbentuk/berstatus “Badan” berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Papua Barat serta Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat. Lembaga teknis daerah ini dipimpin oleh Kepala Badan.

Namun memasuki tahun 2016, setelah melalui berbagai tahapan kajian dan evaluasi serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 41 Tahun 2016 sehingga pada



Kepala Dinas dan Seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat. DOK. DINAS PMK PAPUA BARAT

tahun 2017 Organisasi ini berubah nama dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat yang dipaloi oleh Kepala Dinas.

Sejak berdirinya di awal tahun 2009 hingga awal tahun 2017 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat telah dipimpin oleh tiga Pejabat Eselon II. Ketiga pejabat tersebut masing-masing adalah Editha Rahaded, S.Sos. M.H, pada periode Maret 2009 sampai Desember 2011, Drs. Simon Amalo, M.M, pada periode Maret 2012 sampai Maret 2013 dan Drs. Johnny Rumburen, M.Si. periode Maret 2013 sampai Maret 2017. Sedangkan setelah

menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat pada April 2017 hingga saat ini, dipimpin oleh 2 (dua) Pejabat Eselon II, yaitu Drs. Johnny Rumburen, M.Si. pada periode April 2017 sampai Juni 2019 dan Lince Idorway, SH, M.M. yang memimpin sejak Juli 2019 sampai sekarang.

Sejak menjabat sebagai Kepala Dinas PMK, Lince Idorway, SH, M.M., perempuan pekerja keras asal Teluk Bintuni ini berkomitmen untuk memajukan potensi unggulan daerah Provinsi Papua Barat. Lince Idorway bertekad untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah yang ada di Provinsi Papua Barat hingga ke skala rumah produksi melalui program-program Dinas PMK yang ada, juga me-

lalui program-program dari Kementerian terkait maupun bekerjasama dengan mitra pembangunan Papua Barat. Harapan besarnya adalah lahir rumah-rumah produksi di berbagai daerah di Provinsi Papua Barat sehingga komoditas-komoditas unggulan yang ada di daerah dapat dikembangkan agar kemudian dapat bersaing hingga skala nasional maupun internasional.

Visi dan Misi

■ Visi

Mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Papua Barat “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat” berda-

sarkan kepada tugas dan fungsi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat, oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ikut dalam mewujudkan visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat yang melakukan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 Tahun kedepan (2017 – 2022). Penjelasan dari visi tersebut sebagai berikut:

● **AMAN:** Terwujudnya sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

● **SEJAHTERA:** Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

● **BERMARTABAT:** Di wujudkan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Papua Barat

■ **Misi**

Dilihat dari beberapa misi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Misi tersebut. Dari beberapa Misi Provinsi Papua Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat masuk dalam Misi ke tujuh, yaitu :

“Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis Masyarakat Berketahanan Sosial.”

Dalam arti memperkuat pemberdayaan

masyarakat melalui sistem pemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar dan pendayagunaan sumber daya serta pengembangan usaha ekonomi kampung dapat menjawab masalah strategis yang ada di lingkungan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengembangkan pembangunan di wilayah kampung yang ada di Provinsi Papua Barat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok: Merumuskan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Fungsi

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah :

1. Penyiapan bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pemerintahan Kampung;

4. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan usaha ekonomi kampung;

5. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pelayanan dasar dan pendayagunaan sumber daya;

6. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat kampung;

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas PMK Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 terdiri dari 12 program yang dijabarkan ke dalam 126 kegiatan.

Program prioritas Dinas PMK Provinsi Papua Barat di tahun 2021 yaitu rutin kantor dan beberapa program lain yang difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan yang ada. Komoditas unggulan itu seperti markisa dan nanas di Kabupaten Pongkor (Pegaf), anggarannya telah dianggarkan dari tahun 2020 sehingga peralatannya telah ada, namun pelaksanaan untuk rumah produksi di tahun 2021 tidak dapat dijalankan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, di Kabupaten Teluk Bintuni dengan pabrik pengalengan yang seharusnya telah dibangun rumah produksinya namun karena pada tahun 2020 terjadi rekofusing anggaran sehingga baru akan didorong di tahun 2021 oleh Bupati. Rumah produksi ini diperuntukkan untuk pengalengan kepiting, udang, ikan kuah kuning, sayur garnisun dan papeda, sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) komoditi unggulan yang menjadi prioritas adalah kakao.

Kemudian melalui program TEKAT (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) dari Bappenas yang berfokus pada pengolahan produk unggulan daerah, Dinas PMK di tahun 2021 akan mendorong penuh komoditi-komoditi unggulan yang ada di setiap daerah untuk dikembangkan hingga skala rumah produksi. Program TEKAT ini memperoleh sumber anggaran dari dana APBN dan dana loan yang berasal dari Pemerintah Roma, Italy sebagai

negara pendonor. Program TEKAT untuk saat ini hanya terdapat di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Raja Ampat, Maybrat, Pegaf, Mansel dan Manokwari. Oleh karena itu, “Saya kemarin ketika mengikuti kegiatan di Jakarta, saya minta di Kementerian kalau boleh untuk penerima Program Tekat ini ditambah untuk Kabupaten Wondama, Teluk Bintuni dan Sorong Selatan yang memiliki Potensi Unggulan Daerah” jelas Kepala Dinas PMK ketika diwawancarai.

Melalui program TEKAT, Raja Ampat berfokus pada komoditi perikanan namun terkendala adanya zona larangan sehingga produk yang ada hanya berupa ikan asin, bakso ikan serta kerupuk ikan. Sedangkan untuk Fakfak dan Kaimana, fokus komoditi unggulannya adalah pala. Selain itu, Kementerian melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Daerah Tertinggal telah melakukan pengembangan pala di Fakfak yang berfokus pada pengolahan turunannya menjadi balsem dan minyak gosok.

Terlepas dari program Tekat, tahun ini Dinas PMK mencoba untuk melakukan intervensi ke Kabupaten Pegaf, Mansel dan Teluk Wondama. Untuk Kabupaten Teluk Wondama sendiri, Dinas PMK telah melakukan dukungan berupa pemberian bantuan perahu kepada petani rumput laut. Selanjutnya, Dinas PMK berencana untuk memberikan dukungan bantuan berupa gudang penyimpanan yang sesuai standarisasi sehingga rumput laut ini dapat dikembangkan kemudian menjadi turunan-turunannya dan siap untuk bersaing ke pasar nasional maupun internasional.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 diarahkan pada lima (5) tujuan dan sebelas (11) sasaran. Tujuan pertama yaitu, meningkatkan keberdayaan masyarakat kampung, dengan sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya cakupan pembinaan kelompok

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kampung, meningkatnya peran aktif PKK di kampung, dan meningkatnya peran aktif Posyandu di kampung. Tujuan kedua yaitu, meningkatkan ekonomi masyarakat kampung dengan sasaran meningkatnya cakupan pembinaan kelompok usaha Orang Asli Papua (OAP). Tujuan ketiga yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung, dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat membangun kampung, meningkatnya peran aktif LSM, Meningkatnya cakupan pembinaan kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam berprestasi. Tujuan keempat: meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kampung, dengan sasaran meningkatnya kapasitas aparat dalam mengelola pemerintahan kampung dan tujuan kelima yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat lokal Papua, dengan sasaran meningkatnya kelompok usaha Orang Asli Papua dan meningkatnya kemandirian kampung.

■ **Strategi** ■



● Arah Kebijakan ●



Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan terkait pencapaian program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat, meliputi :

1. Pola pikir masyarakat yang rendah, sehingga perlu pengembangan pola pendekatan program pemberdayaan masyarakat;
2. Wilayah geografis yang terkendala oleh jarak dan jangkauan. Perlu adanya dukungan pimpinan daerah mengintensifkan serta meningkatkan biaya koordinasi dan pendampingan kepada masyarakat antar wilayah kabupaten/kota;
3. Lembaga kampung belum sepenuhnya memahami peran dan fungsinya. Perlu perhatian pemerintah daerah dalam ke-

giatan meningkatkan kemampuan kapasitas lembaga desa terhadap peran dan fungsinya;

4. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan berbagai program pembangunan dalam mengatasi persoalan di wilayah perkampungan, adalah masih lemahnya partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Lemahnya partisipasi ini lebih disebabkan oleh kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan masih rendah, kemampuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh pengurus, dan masih rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan;
5. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat

kesehatan masyarakat di wilayah perkampungan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi;

6. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi masih menjadi salah satu persoalan utama. Keadaan ini lebih disebabkan masih terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat.

● Penulis : Chris Maweikere/Balitbangda PB
Editor : Ezrom Batorinding

Majalah Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dalam mendeskripsikan aktifitas kelitbangan dan Inovasi di Papua Barat.

Majalah Kasuari Inovasi terbit setiap enam bulan sekali yaitu Juni dan Desember. Majalah ini terbit perdana pada Desember 2019.

Redaksi Majalah Kasuari Inovasi menerima sumbangan artikel dari berbagai pihak sesuai dengan rubrikasi yang disediakan.

Rubrikasi Majalah Kasuari Inovasi antara lain :

1. Profil Tokoh
2. Laporan Khusus
3. Opini
4. Serba-Serbi
5. Kearifan Lokal

6. Penelitian dan Pengembangan
7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8. Panorama
9. Promosi
10. Galeri Foto

11. Mitra Pembangunan
12. Profil Organisasi Perangkat Daerah

Sumbangan artikel atau permintaan peliputan, dapat menghubungi redaksi Majalah Kasuari Inovasi pada alamat di bawah ini :

Email : redaksi@kasuariinovasi.com
atau
Telp/WA : +62 852 5460 7856



KASUARI INOVASI
ALAMAT REDAKSI:
Balitbangda : Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3, Arfai - Manokwari
Website : <http://balitbangda.papubaratprov.go.id>





2686-4827

Hiu belimbing (Stegostoma tigrinum), adalah jenis hiu yang bercorak seperti zebra saat anakan dan macan tutul saat dewasa, memiliki kekerabatan jenis dengan hiu paus dan sering dijumpai pada perairan dangkal berpasir di wilayah Indo-Pasifik

-Steg Alex Kydd-